

D.N. AIDIT

DEKON

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

D.N. Aidit



DEKON DALAM UDJIAN

- * DEKON DAN SJARAT² PELAKSANAANNJA
- * DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!
- * KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!
 - * SELAMATKAN DEKON!
 - * DEKLARASI EKONOMI



JAJASAN „PEMBARUAN“
DJAKARTA 1963

penerbit progresif
PEMBARUAN

PENGANTAR PENERBIT

Dalam brosur ini dimuat tiga buah tjeramah Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit sekitar *Deklarasi Ekonomi* dan tjara² pelaksanaannya. Tjeramah pertama berdjulud *Dekon dan Sjarat² Pelaksanaannya* jang diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Dalam tjeramah ini Kawan Aidit sudah mentjelaskan adanya pertjobaan² untuk menjelewengkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi itu dan menjerukan Rakjat mempertinggi kewaspadaannya.

Tjeramah kedua berdjulud *Dekon dalam bahaya, selamatkan Dekon!* adalah tjeramah dalam Musjawarah Besar Mengenai Ekonomi dan Keuangan jang diadakan oleh Madjelis Usaha Veteran Indonesia (MUVI), sedangkan tjeramah ketiga berdjulud *Kaum Buruh Adalah Pembela Dekon Jang Gigih!*, jaitu tjeramah dihadapan para pegawai Departemen Perburuhan. Kedua tjeramah ini diberikan setelah pengumuman peraturan² 26 Mei dan berbagai penetapan tarif dan harga, jang semua dikatakan „untuk pelaksanaan Dekon“. Maka dalam kedua tjeramah itu dibuktikan oleh Kawan Aidit bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei dan kenaikan tarif dan harga samasekali tidak sesuai dengan semangat Dekon, bahkan merupakan pelanggaran dan penjelewengan terhadap Dekon. „Penjelewengan 26 Mei“ itu berusaha mendiskreditkan Dekon dimata Rakjat. Tapi Dekon „tahan udjian“ itu, Rakjat bangkit membela Dekon dan memulai perjuangan untuk melawan penjeleweng²nja.

Demi mendorong madju perjuangan Rakjat itu, guna pelaksanaan Dekon setjara sesungguhnya dan konsekwen, maka dibukukan ketiga tjeramah Kawan Aidit ini dengan diberi djudul *Dekon Dalam Udjian*. Pernjataan Politbiro CC PKI *Selamatkan Dekon!* dan *Deklarasi Ekonomi (Dekon)* itu sendiri dilampirkan pula, sehingga lebih lengkaplah bahan²nja untuk membuka kedok para „Dekonis munafik“ dan untuk menegakkan Dekonisme sedjati.

Djakarta, Djuli 1963

DEKON DAN SJARAT-SJARAT PELAKSANAANNJA

Pertama-tama, perkenankanlah saja mengutjapkan penghargaan atas inisiatif jang diambil oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI) dalam mengadakan rangkaian tjeramah ini guna mendengar ulasan² dari partai² NASAKOM tentang Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Inisiatif ini membuktikan bahwa Sdt², sebagai sardjana-sardjana jang ingin menjumbangkan keahliannya masing-masing dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubungannya soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakjat jang terorganisasi, jaitu dengan persatuan nasional atau kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM.

Sebagai wakil daripada salahsatu partai NASAKOM, jaitu wakil PKI, saja menjedari sepenuhnya betapa berat tanggungjawab jang terletak diatas pundak Partai jang saja wakili untuk ber-sama² dengan partai² lain dan ber-sama² dengan semua golongan, mengadakan usaha² jang sungguh² untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Dalam pekerdjaan besar ini, para sardjana kita djuga mempunjai rasa tanggungjawab jang dalam, dan saja yakin bahwa rangkaian tjeramah² ini akan merupakan satu langkah madju lagi dalam mengerahkan seluruh potensi Rakjat sesuai dengan apa jang diserukan didalam Deklarasi Ekonomi.

Saja djuga merasa gembira mendengar, bahwa HSI akan menjelenggarakan suatu Seminar Ekonomi dengan maksud menghimpun sumbangan² fikiran masyarakat guna membantu pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Mudah-mudahan Seminar itu mentjapai sukses.

Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang *pertama* mengenai pengertian² setjara umum tentang prinsip² Dekon, dan jang *kedua* berupa sumbangan fikiran tentang pelaksanaan langkah² jang ditetapkan didalam Dekon sebagai kebidjaksanaan djangka pendek.

PRINSIP² POKOK DEKLARASI EKONOMI

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Sukarno telah mengumumkan Deklarasi Ekonomi yang menentukan *strategi dasar ekonomi Indonesia* serta menetapkan kebidaksanaan jangka pendek dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Peristiwa ini merupakan salahsatu peristiwa yang terpenting dalam perkembangan-perkembangan politik di Indonesia sedjak diumumkannya Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dekon telah disambut dengan hangat sekali oleh seluruh Rakjat Indonesia. Sambutan² dari seluruh lapisan Rakjat sudah mulai mengalir sedjak beberapa djam sadja setelah Dekon diumumkan. Sampai sekarang sambutan-sambutan masih mengalir, malahan berbagai organisasi sudah mengadakan konferensi² dan seminar tentang Dekon.

Ini adalah wadjar, karena Dekon menjangkut dua segi dari Revolusi Indonesia yang sangat penting, yaitu disatu pihak ikut melempangkan pengertian tentang Revolusi dengan menegaskan sekali lagi adanja dua tahapan Revolusi kita, dan mendjelaskan tentang watak daripada susunan ekonomi yang harus kita bangun pada tahap pertama daripada Revolusi, sedangkan difihak lain Dekon menjangkut perutnja seluruh Rakjat karena menetapkan tjara² yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi yang sudah sedemikian djauhnya dan menjebakkan penderitaan² yang sedemikian beratnja.

Disamping sambutan² hangat dari Rakjat, ternjata bahwa di-kalangan² tertentu, Dekon disambut dengan suara² sinis. Kalangan² itu berusaha menimbulkan perasaan ketjewa terhadap Dekon karena, katanja, „tidak ada sesuatu yang baru didalamnja”, „semuanja itu telah ber-ulang² dikatakan dan toh keadaan tidak mendjadi lebih baik, malahan sebaliknja”. Kalangan² itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap

usaha yang mau didjalankan oleh Bung Karno ber-sama² Rakjat untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi pada saat ini. Mereka berusaha membikin Rakjat ketjewa terhadap Bung Karno dan mau membikin Bung Karno tidak pertjaja pada kekuatan Rakjat. Mereka mengetahui benar bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno memang akan dapat mendobrak keadaan yang suram yang sedang menjengkeram negeri kita, dan bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno akan dapat mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme yang merupakan *conditio sine qua non* atau sjarat mutlak untuk perbaikan ekonomi.

Kaum sinis terhadap Dekon sebenarnja dapat dibagi dalam dua golongan. *Satu golongan*, mereka yang dengan sadar memang berusaha menggagalkan perjuang-an Rakjat pada saat ini untuk menjiptakan suatu kekuasaan politik gotongrojong berporoskan NASAKOM, yang benar² sesuai dengan susunan ekonomi yang mau dibangun. Kaum sinis ini mewakili kepentingan² kaum imperialis dan feodal yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini; mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah yang kepentingan²nja memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan Dekon demi kepentingan massa Rakjat yang luas. Kaum sinis ini ternjata pula mendapat angin dan inspirasi dari bahan² ratjun berbentuk buletin² atau stensilan² periodik yang pada saat ini diedarkan oleh pengchianat Sumitro dan agen²nja di-kalangan² pegawai perusahaan² negara, kantor² Pemerintah dan lain² bagian daripada aparatur pemerintahan dan ekonomi negeri kita. Kaum Manipolis munafik djuga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanya dalam kata² menjatakan menerima dan menjokong Dekon tetapi dalam praktek menjelewengkan pelaksanaan Dekon atau „atasmama Dekon” mengadakan tindakan² yang anti-Dekon, yang merugikan Rakjat banjak.

Golongan kedua, adalah orang² sinis yang memang ternjata tidak mengerti Dekon itu dan karena melihat didalamnja rumusan² yang pernah diutjapkan sebelumnya, maka menganggap bahwa tidak mengandung hal² yang baru dan karena itu menganggapnya tidak berguna. Mereka tidak mengerti bahwa Dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu

dokumen yang mentjerminkan keinginan² Rakjat banjak yang telah lama dinjatakan dalam berbagai bentuk. Sedjak tahun yang lalu, sedjak keadaan ekonomi mulai merosot dengan sangat tjepat, dan chususnja sedjak pidato *Tahun Kemenangan* (Takem) dimana Bung Karno menjatakan kesanggupannya untuk memberi perhatian yang khusus terhadap tugas menanggulangi kesulitan² ekonomi, chususnja sandangpangan, jaitu Program pertama dari Triprogram Pemerintah. Rakjat kita telah setjara giat membitjarakan soal² ekonomi dan merumuskan usul² mereka dalam bentuk pernjataan², resolusi², hasil² berbagai seminar, konferensi² produksi yang diadakan achir² ini dan djuga didalam dokumen² resmi yang disusun oleh DPRGR. Djika ternjata bahwa Dekon memang dalam banjak hal memuat usul² yang diadakan oleh Rakjat dalam berbagai bentuk itu, malahan pada pokoknja didasarkan pada usul² tersebut, ini samasekali tidak merupakan alasan untuk mentjemoohkan Dekon itu dengan mengatakan „tidak mengandung sesuatu yang baru”. Sebaliknja, ini menggambarkan suatu kemenangan penting bagi Rakjat Indonesia karena dengan ini berarti bahwa untuk pertama kalinya Rakjat kita setjara langsung dan aktif ikut menjusun politik Pemerintah dibidang ekonomi, jaitu suatu bidang yang selama ini dianggap sebagai bidang terlarang untuk Rakjat, suatu bidang yang katanja hanya dapat difikirkan dan diperbintjangkan oleh tenaga² ahli tertentu yang sudah terbukti samasekali tidak berhasil mengatasi kesulitan² ekonomi dan keuangan selama ini.

Untuk mengambil satu tjontoh sadja, Dekon dengan tegas menetapkan bahwa Pemerintah tidak akan mendjalankan devaluasi atau tindakan² moneter yang drastis. Penetapan ini benar² mentjerminkan perasaan dan tuntutan Rakjat yang kepentingan²nja telah berulang kali dirugikan oleh adanya devaluasi² serta tindakan² moneter yang lalu. Djika sebelumnja, „ahli² ekonomi” dibidang keuangan dapat mengambil langkah² yang demikian penting itu atas kerugian Rakjat, maka untuk pertama kalinya penolakan Rakjat terhadap devaluasi dan tindakan² moneter yang merugikan telah dapat menentukan politik Pemerintah. Bukankah ini merupakan kemenangan konsepsionil yang penting? Bukankah ini merupakan sesuatu yang baru, suatu pukulan bagi pihak² yang sebenarnja sudah lama mengandjurkan supaya se-

kali lagi didjalankan suatu devaluasi terbuka sesuai dengan desakan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan maksud lebih memperkuat dominasi dolar atas ekonomi dan keuangan Indonesia dan mengontrol serta membikin perdagangan luarnegeri kita lebih tergantung lagi pada dolar Amerika Serikat? Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sudah terlalu puas dan tidak perlu waspada terhadap muslihat² lain dibidang moneter, dan bahwa kemenangan tersebut tidak perlu diperkuat dan dikonsolidasi lebih landjut. Djangan² misalnja, devaluasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadja diadakan perubahan² dalam peraturan² export dan import dengan berbagai matjam transaksi-kurs yang pada hakekatnja tidak lain daripada devaluasi yang diselimuti.

a) STRATEGI DASAR EKONOMI DAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK MERUPAKAN SATU KESATUAN

Seperti diketahui, Dekon terdiri dari dua bagian; yang pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan yang kedua menetapkan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Dalam menilai Dekon sangat perlu ditekankan tentang taker-pisah²kannya kedua bagian ini. Djika hal ini dilupakan, dan djika ada tendens untuk hanya memberi perhatian kepada kebidjaksanaan djangka pendek karena ini dianggap sebagai satu²nja bagian yang langsung dapat mempengaruhi keadaan ekonomi, sedangkan strategi dasar dianggap sepi dan diremehkan, maka ini berarti menghilangkan hakekat dan arti pokok daripada Dekon itu. Demikian pula adalah keliru untuk meremehkan kebidjaksanaan djangka pendek dan hanya menganggap penting strategi dasar ekonomi. Strategi dasar ekonomi hanya dapat dilaksanakan melalui sesuatu atau beberapa kebidjaksanaan djangka pendek.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, susunan ekonomi yang harus dibangun pada tahap pertama daripada Revolusi Indonesia ialah „susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa *'exploitation de l'homme*

par l'homme." (lihat *Deklarasi Ekonomi*, fasal 3).

Penegasan strategi dasar ini bukan hanya berarti bahwa tahap pertama harus diselesaikan sebelum kita bisa mulai dengan tahap kedua; ia juga berarti bahwa karena Sosialisme merupakan perspektif daripada Revolusi Indonesia, maka langkah² yang diambil untuk menyelesaikan tahap pertama tidak boleh berlawanan atau merintang tugas membangun ekonomi Sosialis yang menjadi tugas tahap kedua.

Penegasan strategi dasar ekonomi Indonesia ini mempunyai arti yang sangat penting. Sudah terlalu lama ada orang² bitjara pandjang lebar tentang membangun Sosialisme Indonesia. tentang membangun ekonomi Sosialis, tetapi tidak bitjara tentang mutlak perlunya ekonomi Indonesia lebih dulu dibersihkan dari sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme. Mereka bitjara setjara gagah²an tentang „menghantjurkan kapitalisme“, tapi diam dalam seribu bahasa tentang menghantjurkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Ini adalah sama dengan omongkosong, karena membangun Sosialisme didalam satu masyarakat dimana masih terdapat sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme adalah tidak mungkin samasekali, atau akan merupakan „Sosialisme imperialis“ dan „Sosialisme feodal“. Malahan djika ada orang² berbitjara mengenai membangun Sosialisme tanpa berbitjara tentang mutlak-perlunya membersihkan ekonomi Indonesia dari imperialisme dan feodalisme, ini pada hakekatnja berarti melindungi imperialisme dan feodalisme atas nama „Sosialisme“.

Tentu sadja, yang diperlukan bukan hanya berbitjara mengenai mutlak-perlunya membersihkan masyarakat Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme, melainkan lebih² mengambil tindakan kongkrit guna membersihkan sisa² itu. Bukankah salahsatu tjiri orang revolutioner ialah satunja kata² dengan perbuatan?

Mengapa strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebidaksanaan djangka pendek seperti yang dikemukakan didalam Dekon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di-pisah²kan? Kebidaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi adalah langkah² praktis dan segera yang harus diambil oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia dalam rangka menjusun ekonomi anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sedangkan kebidaksanaan djangka

pendek hanya akan dapat direalisasi djika dilakukan sesuai dengan strategi dasar, jaitu dengan berpegang teguh pada prinsip² membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme harus menjadi dasar dalam menentukan setiap langkah dibidang kebidaksanaan djangka pendek.

Dekon selanjutnja menegaskan baliwa „Agar terjapai kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi, maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat yang terorganisasi“ dan pula bahwa pengintegrasian itu selanjutnja dapat ditjapai „dengan mengintensifkan rituling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah²,, dibawah pimpinan saja sendiri“ (Presiden Sukarno) (Lihat Dekon, fasal 34). Penegasan² ini merupakan salahsatu bagian yang amat penting daripada seluruh Deklarasi Ekonomi. Kalau bagian pertama tentang strategi dasar ekonomi menetapkan rintangan² strategis yang harus disingkirkan dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini, jaitu imperialisme dan feodalisme, sedangkan kebidaksanaan djangka pendek menetapkan tugas² yang sangat urgen yang harus segera diselenggarakan dibidang ekonomi, maka penegasan² tentang kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM, pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi serta pelaksanaan rituling dibawah pimpinan Presiden Sukarno adalah merupakan sjarat² mutlak guna melaksanakan Dekon.

Gelombang sambutan sedjak segera sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret 1963 ditandai bukan hanya oleh pernyataan² dukungan terhadap Dekon itu melainkan lebih² ditekankan didalam hampir setiap pernyataan sambutan bahwa sjarat-sjarat pelaksanaan untuk program yang baik ini harus ada, jaitu supaja segera dibentuk Kabinet Gotong Rojong yang berporoskan NASAKOM. Tuntutan ini mentjerminkan kesadaran dan kejakinan tekad Rakjat yang sudah lama timbul berdasarkan pengalaman kegagalan berbagai program dibidang ekonomi. Tentu sebab² dari kegagalan² itu matjam². Ada yang disebabkan karena program² itu sendiri mengedjar tudjuan² yang tidak tepat sehingga tidak didukung malahan dilawan oleh Rakjat dan dengan sendirinja tidak dapat ditjapai. Ada

jang menetapkan tudjuan² jang tepat tetapi tjara² jang ditentukan untuk mentjapai tudjuan² itu tidak tepat, tidak berdasarkan kenjataan² jang kongkrit, tidak berdasarkan kekuatan² Rakjat atau merugikan kepentingan² Rakjat.

Dengan diumumkannja Dekon, maka Rakjat Indonesia sekarang mempunjai program ekonomi dengan tudjuan² dan tjara² pelaksanaannja jang tepat, jang pada pokoknja berdasarkan kepentingan dan kekuatan Rakjat. Tetapi djika sjarat² mutlak bagi pelaksanaannja, terutama dibidang politik, tidak terwujud, maka program itupun tidak akan berhasil dan akan mengalami nasib jang sama dengan ber-matjam² program ekonomi sebelumnya.

Djika saja berbitjara dimuka Sdr², dimuka para sardjana, tentang pentingnja sjarat² pelaksanaannja, maka ini berarti bahwa kita tidak mengakui adanja garis pemisah antara dalil² ilmiah dengan sjarat² pelaksanaan, antara masalah ekonomi dengan masalah politik. Dan bahwasanja Sdr.² mengundang saja untuk berbitjara tentang Dekon berarti bahwa Sdr.² sendiri djuga samasekali tidak berpegang pada gagasan jang palsu, jang memisahkan dalil² ilmiah dengan pelaksanaan, jang memisahkan soal² ekonomi dari soal² politik. Memang ada sardjana² jang berpendapat bahwa tugas mereka terbatas kepada merumuskan dalil², sedangkan mengenai pelaksanaan adalah urusan kaum politisi, atau berpendapat bahwa soal² ekonomi harus dipetjahkan setjara ekonomi dan oleh sardjana² ekonomi, tak perlu dihubungkan dengan soal² politik, tak mungkin dipetjahkan oleh kaum politisi. Sardjana² jang demikian, menurut pendapat saja berbuat bertentangan dengan prinsip² ilmiah. Apa gunanja sesuatu dalil, betapapun sempurna, lengkap, indah dan mengagumkan, djika konsepsi itu tidak sekaligus menetapkan sjarat² pelaksanaannja, djika dalil² itu tidak sesuai dengan sjarat² jang mungkin ditjptakan, atau dengan perkataan lain djika dalil² atau teori² itu terpisah dari politik. Sebagaimana kita ketahui, politik adalah pusat pentjerminan dari ekonomi, atau sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan politik bukanlah tudjuan revolusi tetapi hanja suatu „djembatan emas“ atau alat untuk membangun suatu sistim ekonomi jang membebaskan Rakjat kita dari penghisan dan kemiskinan. Sardjana² me-

mang perlu setjara aktif memperhatikan dan berurusan dengan kal² pelaksanaan dan dengan sjarat² jang diperlukan untuk mendjamin pelaksanaan sesuatu dalil. Ini berarti benar² memenangkan prinsip „ilmu untuk Rakjat“ dan mengalahkan prinsip „ilmu untuk ilmu“.

Ketetapan-hati jang timbul dikalangan Rakjat untuk memperdjuaangkan sjarat², terutama sjarat² politik bagi pelaksanaan Dekon karena tidak mau melihat program ekonomi jang baik ini mengalami kegagalan, adalah berlainan samasekali dengan semangat apatisisme dan defaitisme jang sengadja di-sebar²kan oleh kaum reaksi-oner jang sinis. Mereka sengadja memobilisasi tjontoh² kegagalan daripada program ekonomi dan keuangan selama ini untuk men-tjoba² mejakinkan bahwa Rakjat Indonesia tidak mampu mengatasi kesulitan² ekonomi jang sedang menimpa negerinja. Tudjuan lebih djauh jalah untuk menjebarkan konsepsi mereka supaja kita mendasarkan usaha² kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada penanaman modal monopoli asing, pada „bantuan“ ekonomi AS setjara langsung atau tak langsung dengan sjarat² politik anti-NASAKOM serta anti-ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol. Pada hakekatnja, sinisme mereka bersumber pada penolakan mereka terhadap prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang djustru mendjiwai Dekon. Dekon mengharuskan adanja semangat patriotisme dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan Dekon menetapkan bahwa kesulitan² itu hanja dapat diatasi dengan mendasarkan diri pada kekayaan alam negeri kita sendiri, pada kekuatan² dan potensi Rakjat, pada kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Sedangkan bagi Rakjat djustru prinsip dan semangat ini, djustru ketentuan ini membuka kemungkinan bagi berhasilnja Dekon itu.

Jang penting bagi Rakjat sekarang jalah mendjamin supaja sjarat² pelaksanaannja berwujud, jaitu *Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan NASAKOM*. Gagasan NASAKOM telah terwujud didalam banjak Lembaga Negara, jaitu didalam DPRGR, MPRS, MPN, MPPR, Depernas, DPA, dibanjak DPRD dan BPH. Demikian pula, NASAKOM merupakan poros didalam Front Nasional jang bertugas untuk menghimpun kekuatan² Rakjat dan jang harus memegang peranan penting dalam pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Malahan pimpinan Bank Pembangunan Indonesia se-

karang sudah berkomposisi NASAKOM. Kenyataan² ini merupakan kemajuan yang penting sekali dalam perjuangan Rakyat Indonesia untuk mentjapai perubahan dilapangan sistim politik. Tetapi kemajuan² ini hanya akan berubah mendjadi suatu kemenangan yang pasti djika telah tertjapai tuntutan Rakyat supaya poros NASAKOM diwujudkan pula didalam badan eksekutif negara, jaitu didalam Kabinet yang merupakan badan negara yang menentukan dan yang setjara langsung bertanggungjawab atas semua tindakan pemerintahan disemua bidang.

Negeri kita telah mentjapai kemerdekaan politik yang sekanang dilengkapi lagi dengan berachirnja riwayat kolonialisme Belanda di Irian Barat. Tetapi kemerdekaan politik tidak bisa penuh, ia hanya setengah², selama kemerdekaan ekonomi belum tertjapai. Tugas terpenting didalam tahap pertama daripada Revolusi Indonesia, seperti ditetapkan didalam Dekon, ialah untuk menjusun suatu ekonomi yang nasional dan demokratis, atau yang bersih dari imperialisme dan feodalisme. Tugas ini adalah sama dengan mentjapai kemerdekaan ekonomi yang berarti untuk membikin penuhnja kemerdekaan politik. Atau dengan kata² lain, djika tahap pertama telah diselesaikan, maka negeri kita akan mendjadi negeri yang merdeka penuh, dan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 dapat diselesaikan sampai ke-akar²nja.

Oleh karena itu, kuntji daripada suksesnja tahap pertama itu ialah perjuangan untuk mentjapai ekonomi nasional dan demokratis. Tetapi kuntji daripada suksesnja perjuangan ini ialah terbentuknja kekuasaan politik yang sesuai dengan susunan ekonomi yang harus dibangun. Djika dikatakan bahwa Kabinet berporoskan NASAKOM adalah merupakan kekuasaan politik yang sesuai dengan susunan ekonomi yang mau dibangun, ini adalah karena poros NASAKOM merupakan djaminan bagi suatu kekuasaan politik yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Adalah tidak mungkin samasekali untuk menjusun suatu ekonomi yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme tanpa suatu kekuasaan politik yang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme pula.

Dengan demikian djelaslah bahwa pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM merupakan sjarat mutlak, baik untuk tertjapainja strategi

dasar ekonomi Indonesia maupun untuk berhasilnja kebidaksanaan djangka pendek. Sudah tentu kekuasaan politik berporoskan NASAKOM ditentang keras oleh kaum imperialis dan kakitangan²nja, karena kekuasaan demikian bisa konsekwen anti-imperialis. Soalnja sekarang ialah, mendengarkan otjehan dan gertakan imperialis atau memenuhi tuntutan Rakyat.

b) ARTI TUGAS MEMBERSIHKAN EKONOMI INDONESIA DARI SISA² IMPERIALISME DAN FEODALISME

Saja ingin mengemukakan beberapa hal yang lebih kongkrit mengenai tugas untuk membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Dengan adanya Dekon, maka telah ditetapkan dengan sangat tegas bahwa setiap usaha yang diambil dalam bidang ekonomi harus didjwai oleh prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Dekon dengan sangat tegas mengatakan bahwa sisa² imperialisme dan feodalisme harus *dibersihkan*, harus *dikikis habis*. Dibersihkan berarti benar² bersih, tidak ada bekas²nja. Dikikis habis menekankan, harus *habis*; bukan hanya dikikis, tetapi dikikis *habis*.

Ini adalah merupakan tugas yang tidak ringan yang meminta perhatian dan perjuangan yang terus-menerus. Dan perjuangan itu tidak akan bisa dilakukan apalagi mentjapai sukses djika kita tidak mengetahui dengan djelas lebih dahulu imperialisme² yang mana yang harus dibersihkan, dikikis habis, djika tidak diketahui setjara kongkrit tjara² yang dipergunakan oleh imperialisme untuk mempertahankan dirinja didalam ekonomi kita dan untuk memperluas sajapnja ataupun untuk memulihkan posisinya.

Setelah riwayat imperialisme Belanda di Irian Barat habis, sedangkan posisi² pokok modal Belanda telah dapat dirombak dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda (ketjual modal Belanda dalam Shell dan Unilever), maka imperialisme yang paling berbahaya bagi Rakyat Indonesia dan oleh karena itu mendjadi musuhnja yang nomor satu, adalah imperialisme Amerika Serikat. Imperialisme AS mempunjai kedudukan² penting didalam ekonomi kita, terutama dibidang minyak (Stamvac, Caltex). Mereka tidak hanya memegang monopoli ber-sama² dengan modal Inggris-Belanda (Shell) melainkan djuga memperoleh hak² istimewa mengenai

penggunaan devisa. Minyak kita yang dikuasai oleh mereka merupakan sumber keuntungan yang sangat besar bagi kaum kapitalis monopoli AS. Ekspor minyak mentah setahun rata-rata 30% dari seluruh ekspor Indonesia. Disamping itu, imperialisme AS sudah lama mengadakan hubungan ekonomi dengan Indonesia dengan memberikan apa yang dinamakan „bantuan“ ekonomi kepada Indonesia (sebanjak \$ 639 juta sejak 1950, menurut Duta Besar AS di Jakarta, H. Jones). Hingga sekarang AS masih merupakan trading partner Indonesia yang terpenting. Kita mengetahui pula bahwa imperialisme AS sedang berusaha keras untuk memperdalam dan memperkuat posisinya melalui „bantuan“ ekonomi yang lebih banyak dan melalui matjam tjara penetrasi seperti misalnya pengiriman „peace corps“ terutama diperguruan tinggi, keolahragaan dan sebagainya.

Jang sangat perlu diperhatikan pada saat ini ialah usaha imperialisme AS untuk menjampuri hal ekonomi kita melalui „bantuan ekonomi“ yang mau diberikan kepada kita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa „bantuan ekonomi“ tersebut disertai dengan berbagai sjarat dibidang politik luarnegeri dan politik dalam negeri, dan diselubungi dengan apa yang dinamakan „program stabilisasi ekonomi“. Apakah jang menjadi tujuan pokok daripada „program stabilisasi ekonomi“ kaum imperialis Amerika itu? Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bahan yang disusun oleh kalangan pemerintah AS, termasuk rombongan ahli ekonomi yang pernah berkunjung ke Indonesia dalam tahun 1961. Hal ini bisa kita pelajari dari bahan yang terkenal dengan nama „Humphrey Report“ yang telah beredar luas sehingga sudah menjadi rahasia umum.

„Program stabilisasi ekonomi“ buatan AS itu berarti a.l. : meniadakan artipenting serta menghentikan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. II mengenai Pola Pembangunan yang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal itu karena dianggap „tidak mutlak“, „tidak realistis“, „terlalu ambisius“ dan matjam lagi; tidak meneruskan usaha untuk menjapai self-sufficiency dalam bahan sandangpangan yang pokok, terutama beras dan tekstil karena menurut kaum imperialis AS, Indonesia „lebih beruntung“ djika tetap membeli bahan itu dari luarnegeri; tidak membangun industri dasar; tidak mewe-

ujudkan politik supaya negara memegang peranan memimpin dalam ekonomi, baik mengenai sektor negara, jaitu perusahaan negara dibidang produksi dan distribusi yang vital, maupun mengenai peranan negara dalam memimpin perkembangan ekonomi pada umumnya; menghentikan segala usaha untuk mengendalikan harga-harga dan membiarkan harga sepenuhnya ditetapkan oleh faktor didalam pasaran; menaikkan pajak yang memberatkan beban Rakyat; memperbesar penanaman modal AS didalam ekonomi Indonesia dengan djaminan tentang transfer keuntungan dsb; menghentikan politik luarnegeri yang anti-imperialis. Demikianlah setjara ringkas pokok „program stabilisasi ekonomi“ yang mau dipaksakan kepada Indonesia.

Deklarasi Ekonomi djika dilaksanakan sungguh merupakan suatu penolakan yang tegas terhadap „program stabilisasi ekonomi“ yang sedang giat diandjurkan oleh kaum imperialis AS dan kakitangan luarnegeri.

Beberapa minggu jl. kita semua dikedjutkan oleh kurangadjaran penasehat Presiden Kennedy, Djenderal Louis C. Clay yang mengandjurkan supaya Indonesia djangan diberikan „bantuan ekonomi“ sebelum Indonesia mau „menghentikan petualangan internasional“ (maksudnya perlawanan kita terhadap gagasan Federasi Malaysia dan terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme pada umumnya) dan sebelum Indonesia mau „membereskan ekonomi dalam negeri“. „Nasehat“ itu seluruhnya satu nada dengan saran yang dimuat dalam „Humphrey Report“. Bedanya hanya, bahwa „Humphrey Report“ berusaha menjelmiti saran yang kurangadjar itu dengan segala matjam pernjjanaan „setudju“ dengan ekonomi terpimpin, ekonomi gotong-rojong dsb, sedangkan Djenderal Clay tidak ambil pusing dengan kemunafikan itu, dan menjatakan pendapat kaum imperialis AS tanpa tedeng aling.

Seperti sudah dikatakan diatas, tidak bisa diharapkan bahwa kaum imperialis akan membantu kita untuk membangun suatu ekonomi yang bersih dari sisa imperialis, akan membantu kita untuk mengikis habis sisa imperialisme itu. Dengan ini terasa betapa tepatnja Dekon yang menekankan bahwa dalam mengatasi kesulitan ekonomi, kita harus berlandaskan dan berorientasi setjara mutlak pada potensi dan kekuatan Rakyat, kepada usaha untuk menggali kekayaan alam negeri kita sen-

diri.

Kemerdekaan ekonomi hanya akan bisa ditjapai djika prinsip ini dipegang teguh. Betapa prinsip ini digerowoti dan diputarbalikkan oleh kaum imperialis dapat kita lihat dari "Humphrey Report" jang dengan tidak tahu malu, berbitjara mengenai kejakinannya tentang *„kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui bantuan asing”* ("Humphrey Report"). *„Kemerdekaan”* dimata kaum imperialis AS berarti ketergantungan kepada kaum imperialis AS seperti halnya *„dunia merdeka”* adalah dunia jang tergantung kepada mereka. Apa jang baru saja kutip dari "Humphrey Report" membuktikan betapa besar peranan *„bantuan”* AS dalam mempertahankan *„kemerdekaan”* jang tergantung itu.

Selanjutnya, mengingat hal² jang saja gambarkan diatas, ketetapan Dekon bahwa bilamana kekuatan² kita sendiri tidak mentjukupi maka barulah ditjari kredit² luar negeri, haruslah diartikan, bahwa, sesuai dengan dasar² ekonomi jang anti-imperialis, hanjalah negara² jang anti-imperialis pula, terutama negara² Sosialis, bisa diharapkan membantu kita sebagai partner jang sederajat berdasarkan prinsip² persamaan hak dan saling menguntungkan, bisa diharapkan membantu kita dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan dalam membangun suatu ekonomi nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Hanja si Pandir dan kaum Manipolis munafik jang suka omongkosong bahwa kaum imperialis dapat membantu dalam membangun ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Perdjuangan untuk membersihkan ekonomi kita dari sisa² imperialis memang merupakan perdjuangan jang banjak meminta perhatian dan tenaga. Perdjuangan ini harus dilakukan tidak hanya terhadap sisa² imperialis jang masih ada didalam ekonomi kita, melainkan pula terhadap usaha² kaum imperialis untuk *memperbesar* peranan mereka didalam ekonomi kita dengan melalui tjara² baru, jaitu neo-kolonialisme, dengan menggunakan sisa² imperialis itu sebagai pangkalan dan mengambil untung dari kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Djika hal itu dibiarkan, maka ini berarti bahwa sisa² itu bukannya dikikis habis tapi malahan dikembangkan. Djadi, dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, kita

sudah harus melawan neo-kolonialisme.

Dalam hubungan ini, saja merasa perlu menjinggung peranan Dewan Moneter Internasional (IMF) dimana Indonesia masih mendjadi anggotanja. DMI itu merupakan suatu organisasi jang pada pokoknja dimaksudkan untuk menggunakan kesulitan² moneter negara² didunia kapitalis jang timbul sebagai akibat adanya krisis² ekonomi periodik, untuk memaksakan politik moneter jang diandjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudahkan kaum monopolis AS untuk mengontrol dan menjampuri setjara intensif politik moneter negara² anggota² DMI.

DMI itu sebenarnya apa? DMI benar-benar merupakan organisasi jang sepenuhnya dikuasai negara² imperialis, terutama imperialisme AS. Karena djumlah suara masing² anggota ditentukan menurut kwota uang sero masing² dan bukan menurut prinsip *„satu negara satu suara”*, maka Amerika Serikat sendiri memegang tidak kurang dari 28% daripada suara didalam DMI, dan Inggris memegang 13,4%, sehingga dua negara imperialis itu sadja sudah memegang lebih dari 41% daripada suara didalam DMI. Djika ini ditambah dengan negara² imperialis lainnya di Eropa Barat, maka djelaslah bahwa negara² imperialis itu mempunyai mayoritas jang mutlak. Djangan ditanja mengenai persentase Indonesia dalam suara DMI; satusetengah persentase pun tidak sampai.

Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia didalam badan tersebut jang sepenuhnya dikuasai oleh "the old established forces" samasekali tidak sesuai dengan politik luar negeri kita; ia djuga membuka kemungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan politik negeri kita dalam bidang jang begitu penting, jaitu bidang moneter.

DMI itulah jang paling giat mengandjurkan supaya Indonesia suka mengadakan devaluasi. DMI itulah jang setiap tahun mengadakan penelitian² jang dalam mengenai keadaan devisen kita. DMI itulah jang setjara terang²an mau dipergunakan oleh imperialisme AS untuk ikut memaksa negeri kita supaya suka mendjalkan *„program stabilisasi ekonomi”* jang telah saja sebut tadi. DMI itulah jang sekarang mau dipergunakan oleh kaum monopoli Belanda untuk mendesak negara kita supaya mau membajar *„ganti-kerugian* jang

lajak" kepada perusahaan² Belanda yang telah diambil-alih.

Bukankah semuanya ini membuktikan, bahwa DMI merupakan salahsatu „sisa imperialis" atau lebih tepat imperialis itu sendiri yang benar² harus „dikikis habis" ?

Sifat ketergantungan ekonomi Indonesia pada pokoknya terletak dalam kenyataan bahwa sektor import-eksport masih memegang peranan yang sangat menentukan dalam seluruh ekonomi, terutama sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber barang² konsumsi yang pokok serta barang² yang diperlukan untuk berlangsungnya seluruh sektor produksi, termasuk produksi industri. Selama sifat ini belum diachiri, adalah tidak mungkin untuk membangun suatu ekonomi yang benar² merdeka. Untuk mentjapai tujuan ini, Dekon memberikan dasar² yang sangat kokoh, yaitu dengan menetapkan bahwa „yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar² untuk industrialisasi", dan bahwa „..... kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan" (lihat Dekon fasal 6), atau dalam kata² lain, kita harus membangun ekonomi nasional dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis dan dengan industri sebagai tulang punggung.

Disamping usaha² yang mutlak perlu didalam negeri untuk mentjapai tujuan ini, maka perubahan² dalam struktur perdagangan luarnegeri kita djuga sangat dibutuhkan. Sifat ketergantungan tersebut diatas memang timbul sebagai akibat politik kaum kolonialis Belanda dalam memperkembangkan hubungan² ekonomi negeri kita dengan luarnegeri yang terus-menerus mempertahankan posisi kita sebagai sumber bahan² mentah dan sebagai pasaran barang² industri negara² kapitalis yang maju. Hubungan² ekonomi dengan negara² kapitalis yang manapun selalu pada pokoknya mengedjar tujuan² yang demikian, karena negara² itu sangat berkepentingan supaya negara² yang ekonominya masih terbelakang (termasuk Indonesia) tetap menjadi pasaran bagi barang² hasil industrinya sendiri dan karena itu berkepentingan untuk menghambat perkembangan² industri yang dapat menjadi saingan bagi industri mereka sendiri.

Hubungan² dagang Indonesia dengan luarnegeri masih untuk sebagian yang terbesar sekali ditudjukan ke-

negara² kapitalis. Disamping hal² diatas, ini djuga berarti bahwa ekonomi kita selalu sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya tingkat kegiatan ekonomi di-negeri² kapitalis yang makin sering dilanda oleh krisis. Oleh karena itu semua, perubahan² fundamental dalam struktur perdagangan luarnegeri memegang peranan penting dalam mentjapai ekonomi yang bersifat nasional-demokratis, ekonomi progresif. Seperti dinjatakan didalam Dekon, maka „pelayanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif" (Dekon, fasal 23). Dekon djuga dengan sangat tepat menekankan tentang bahajanya blok² ekonomi (yang dimaksudkan dengan ini ialah khususnja Pasaran Bersama Eropa) karena „menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari 'the old established forces'". Selandjutnja dinjatakan pula bahwa „Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, yang tidak hanya menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi yang disamping itu ter-lebih² menekan perkembangan pembangunan ekonomi di-negara² yang baru sadja memasuki alam kemerdekaan". (fasal 10).

Dengan demikian Dekon memberi petunjuk² yang sangat djelas mengenai politik perdagangan luarnegeri Republik kita. Satu²nja dasar yang kokoh bagi politik perdagangan luarnegeri kita ialah memperluas hubungan-hubungan ekonomi, khususnja hubungan² dagang dengan "the new emerging forces" berdasarkan prinsip² persamaan dan saling menguntungkan, terutama dengan negara² Sosialis. Belakangan ini, disamping Indonesia, sudah banjak negara² Asia-Afrika yang menentang Pasaran Bersama Eropa karena tindakan² diskriminasi kaum monopoli Eropa Barat terhadap negara² bukan anggota PBE yang sangat merugikan negara² yang ekonominya terbelakang. Adalah samasekali tidak tepat fikiran sementara orang bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi diskriminasi negara² kapitalis, terutama PBE, ialah dengan mengadakan sematjam asosiasi dengan PBE itu atau malahan untuk menjadi anggotanja. Ini berlawanan samasekali dengan tujuan² menghapuskan sifat ketergantungan ekonomi kita. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa ide supaya Indonesia ber-

asosiasi dengan atau menjadi anggota PBE ternyata menjadi idam²an kaum kapitalis monopoli Belanda yang sedang berusaha untuk menjusup kembali kedalam ekonomi Indonesia.

Kalau dibidang olahraga sadja kita sudah bersebojan "games of the new emerging forces" (Ganefo), maka dibidang perdagangan luarnegeri sudah lebih daripada semestinja djika kita bersebojan "trade with the new emerging forces". Sembojan ini dengan sendirinja tidak berarti bahwa Indonesia seharusnya menghentikan perdagangannya dengan negara kapitalis, tetapi ia menggambarkan *orientasi yang seharusnya dikembangkan dalam hubungan² dagang berdasarkan prinsip² persamaan hak dan saling menguntungkan*. Hanja perdagangan luarnegeri yang berorientasi kepada "the new emerging forces" dan tidak pada "the old established forces" seperti yang berlaku sekarang ini, dapat merupakan sendi kuat bagi usaha² kita untuk mentjiptakan suatu ekonomi nasional yang benar² merdeka.

c) MENGIKIS HABIS SISA² FEODALISME

Demikianlah heberapa pokok mengenai pelaksanaan Dekon yang khususnja berhubungan dengan tugas mengikis habis sisa² imperialisme. Disamping tugas itu, Dekon djuga menetapkan tugas untuk mengikis habis sisa² feodalisme sebagai rintangan strategis dalam tudjuan kita pada tahap pertama ini untuk membangun suatu ekonomi yang nasional dan demokratis. Memang benar demikian. Adanja sisa² feodalisme yang masih meradjalela dalam ekonomi Indonesia bukan hanja merupakan dasar sosial daripada imperialisme — dan oleh karena itu memang sengadja dipertahankan dan dipupuk oleh kaum kolonialis Belanda — ia djuga merupakan penghambat dalam membangun ekonomi yang berindustri dimana sektor pertanian menjadi basis yang kokoh dan bukan sumber kemiskinan dan penghisapan kolonial dan feodal seperti halnya sekarang.

Djika saja katakan bahwa sektor pertanian (disamping perkebunan) harus menjadi basis daripada ekonomi negeri kita, ini berarti bahwa sektor pertanian harus dapat menjediakan bahan² pokok, khususnya pangan. Sektor pertanian harus dikembangkan begitu rupa sehingga tidak hanja mampu untuk memenuhi kebutuhan

dalamnegeri, melainkan djuga untuk dapat dieksport dan dengan demikian menghasilkan devisa untuk membeli barang² modal serta lain² kebutuhan industri. Selama sektor pertanian belum mampu memegang peranan ini, negeri kita akan terus-menerus tergantung kepada import untuk sebagian dari bahan² pangan dan tidak akan bisa memperbesar daya penghasilannya supaja dapat mentjukupi kebutuhan² kita dalam masa pembangunan.

Penghambat yang terpokok dalam mentjapai tudjuan ini ialah djustru masih bertjokolnja sisa² feodalisme, yang harus disapu bersih itu. Sisa² feodalisme yang pada pokoknja berupa sistim monopoli pemilikan tanah oleh tuantanah² merupakan sebab utama mengapa produksi pertanian dinegeri kita masih sangat terbelakang.

Dekon dengan tepat menjebut Undang² Perdjudjian Bagi-Hasil dan Undang² Pokok Agraria sebagai landasan-landasan terpenting dalam menanggulangi persoalan ekonomi. Kedua undang² ini disokong dan dituntut pelaksanaannya oleh PKI. Undang² Perdjudjian Bagi-Hasil memberi kemungkinan bagi kaum tani untuk memperoleh sebagian yang lebih besar daripada hasil tanaman mereka, sedangkan Undang² Pokok Agraria ditudjukan untuk membatasi pemilikan tanah tuantanah². Kedua Undang² ini merupakan alat yang penting dalam tangan kaum tani, khususnya bagi tanimiskin dan tani tak bertanah, untuk mengurangi penghisapan feodalisme. Adanja dua Undang² ini merupakan langkah² penting dalam memobilisasi kaum tani untuk berdjung melawan sisa² feodalisme dan untuk menuntut langkah² yang lebih radikal lagi guna mengachiri samasekali sisa² feodalisme, jaitu melalui suatu landreform atau perubahan tanah yang benar² mengikis habis sisa² feodalisme.

Undang² Pokok Agraria berbeda dengan Program Agraria PKI. UU Pokok Agraria hanja bertudjuan untuk membatasi penghisapan feodal agar dapat menguntungkan kaum tani, sedangkan Program Agraria PKI menuntut pensitaan tanah tuantanah serta pembagian tanah tuantanah itu kepada kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani, dengan tjuma².

Jang sangat penting pada waktu ini ialah untuk mendjamin supaja kedua undang² tersebut dilaksanakan dengan konsekwen dan benar² dapat diselesaikan pe-

laksanaannya tepat pada waktunya. Ternyata bahwa pelaksanaan Undang² Pokok Agraria berdjalan dengan sangat lambat. Manipulasi banjak terdjadi, negara ditipu oleh tuantanah² dengan setjara formil mem-bagi² tanah² jang luas kepada anggota² keluarga jang bukan penggarap. Dari tanahlebih dan tanah² lain seluas kira² 1 djuta Ha jang harus dibagikan sebelum achir tahun ini, belum 1% jang telah selesai dibagikan. Selain daripada itu, tjara membagikan tanahlebih sering tidak sesuai dengan penetapan undang², sehingga jang menerima tanahlebih itu malahan seringkali adalah keluarga tuantanah sendiri jang bukan penggarap. *Semua ini dimungkinkan, karena operasi jang didjalankan bukan operasi radikal.* Selanjutnya perlu ditjatat bahwa sjarat² pembajaran sering sangat memberatkan kaum tani jang menerima tanahlebih sehingga dibberapa daerah mereka merasa lebih beruntung dengan pelaksanaan Undang² Perdjudjian Bagi-Hasil karena memperoleh bagian jang lebih besar dari hasilnya daripada djika harus membayar tjtijilan untuk tanahlebih jang mereka dapat. Kaum tani telah menjambut baik pernjjataan Menteri Agraria dan Pertanian beberapa minggu jl. jang mendjandjikan bahwa pembagian tanahlebih dalam rangka UUPA, akan selesai dilaksanakan sebelum achir tahun ini. Bagi kaum tani tidak djelas langkah² apa jang akan diambil oleh Menteri, tetapi karena sesuai dengan kepentingannya, kaum tani telah menjatakan kesanggupannya untuk berdjuaug terus guna mendjamina suksesnya pelaksanaan UUPA tepat pada waktunya. Sikap ini adalah sangat sesuai dengan Dekon.

Sampai sekarang masih banjak sekali rintangan jang dialami kaum tani dalam perdjuaugannya untuk melaksanakan kedua undang² ini, karena ternyata bahwa aparatur pemerintahan di-daerah² jang diserahi tugas dalam hal ini masih banjak mewakili kepentingan² tuantanah. Disamping itu, kaum kapitalis birokrat ternyata sekarang makin banjak terdjalin kepentingan²nja dalam mempertahankan sisa² feodalisme sebagai sumber penghisapan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, kaum tani dalam perdjuaugannya melawan sisa² feodalisme harus melakukan perdjuaugan jang terus-menerus melawan kaum penghisap besar, jaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah.

Dalam hubungan dengan hal ini, memang dikalangan

sardjana² tertentu terdapat pendapat bahwa pemilikan tanah feodal pada umumnya tidak merupakan persoalan di Indonesia dan dengan demikian mereka berusaha membantah pendirian bahwa di Indonesia terdapat sisa² feodalisme jang kuat. Kaum tani sendiri jang mengalami penghisapan feodal setiap hari telah memberi djawaban jang tepat terhadap pendapat, jang sangat keliru ini dengan mengadakan berbagai, bentuk aksi terhadap tuantanah. Saja berpendapat, bahwa para sardjana djuga dapat memberikan sumbangannya jang berharga sekali dalam ikut mengadakan penelitian mengenai hubungan agraria, dilihat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan kebudajaan. Dengan demikian, para sardjana akan bisa ikut setjara aktif dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi.

d) PERANAN SEKTOR KOPERASI DAN SEKTOR SWASTA

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjera-mah ini mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia, saja ingin memberi beberapa penjelasan mengenai ketentuan Dekon jang menjatakan bahwa: *„Dalam perdjuaugan untuk menjelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Negara“.* (Lihat Dekon, fasal 5). Ini berarti bahwa pada tahap pertama revolusi kita, ekonomi harus terdiri dari tiga sektor, jaitu sektor negara jang memegang posisi komando, sektor koperasi dan sektor swasta.

Umumnya sudah ada pengertian jang boleh dikatakan merata mengenai posisi memimpin jang harus dipegang oleh sektor negara. Jang masih sering kurang djelas ialah fungsi serta posisi daripada sektor koperasi dan sektor swasta. Adakalanya kedua sektor itu hanja dibedakan dalam arti bentuk-juridis daripada perusahaan jang bersangkutan. Koperasi sering dianggap sebagai salahsatu bagian daripada sektor swasta; bahkan tidak sedikit „koperasi“ jang sebenarnya adalah gabungan perusahaan² swasta jang menjalahgunakan nama koperasi guna memperoleh berbagai fasilitas.

Pengertian ini adalah keliru. Sektor koperasi djustru mempunyai suatu fungsi tertentu jang sangat berbeda dengan sektor swasta, jaitu untuk mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannya masing² dan untuk menghambat proses diferensiasi antara produsen-produsen ketjil, dan melalui persatuan dan kerdjasama ini Rakjat pekerdja dapat mengurangi penghisapan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak dan kapitalis² atas diri mereka. Dengan demikian, sektor koperasi membantu Rakjat pekerdja, terutama kaum produsen ketjil untuk membela diri terhadap penghisapan feodal dan terhadap penghisapan kapitalis. Tugasnja terbatas pada mengurangi penghisapan dan bukan menghapuskannya. Penghisapan baru dihapuskan pada tahap kedua, jaitu dalam ekonomi Sosialis. Tetapi sektor swasta dengan sendirinja tidak mempunyai tugas untuk mengurangi penghisapan, apalagi untuk menghapuskannya. Tugas sektor swasta jalah untuk menghimpun "funds and forces" nasional dan domestik dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Penghisapan masih tetap terdjadi disektor swasta. Jang perlu bagi kaum buruh jalah memperoleh atau memperluas hak² demokrasi² untuk membela kepentingan²nja dalam batas² jang tidak merugikan perdjjuangan melawan musuh bersama seluruh Rakjat, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Dalam menghambat proses diferensiasi antara produsen ketjil, maka koperasi dengan demikian menghambat lahirnja kapitalis² baru atas kerugian mereka jang ekonominja lebih lemah. Djika ini berhasil, maka koperasi dapat membawa produsen² ketjil langsung menudju ke-koperasi² Sosialis setelah tahap pertama revolusi selesai. Demikianlah fungsi daripada sektor koperasi pada tahap pertama, jaitu tahap untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis.

Dengan pendjelasan ini, maka mendjadi teranglah bahwa bentuk² koperasi jang terpenting jalah *koperasi kredit* untuk melepaskan produsen ketjil dari tjengkeraman tukang² idjon dan lintahdarat, *koperasi produksi* untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan atau keradjinan tangan, dan *koperasi djual-beli* untuk membela kepentingan² bersama produsen ketjil dalam marketing dan dalam memperoleh bahan² jang mereka perlukan bagi usaha² produktif mereka. Koperasi² jang

demikian memegang peranan jang penting dalam usaha² untuk mempertinggi produksi sehingga sangat sesuai dengan tudjuan Dekon dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini.

Disamping itu, kaum buruh dan pegawai djuga sangat membutuhkan *koperasi konsumsi* guna melindungi kepentingan²nja sebagai konsumen dan melawan kenaikan² harga.

Demikian setjara singkat mengenai sektor koperasi pada tingkat revolusi sekarang. Sekarang beberapa pendjelasan mengenai sektor swasta.

Ada orang jang merasa sangat heran mengapa PKI menjetudjui adanya sektor swasta, dan malahan merasa tjuriga, apakah ini bukan suatu tipumuslihat jang lihay. Perlu saja menjatakan dengan tegas disini bahwa PKI tidak hanja menjetudjui adanya sektor swasta (nasional dan domestik) tetapi malahan mengandjurkannya. Dan sikap ini bukanlah sikap baru bagi PKI, ia merupakan sikap jang tegas dinjatakan dalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI jang dilangsungkan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959). jaitu sbb. :

„Ekonomi Indonesia disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpin, tidak seharusnya menentang industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan terus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. Proteksi dan fasilitas harus diberikan kepada kapitalis² nasional, untuk berkembang dalam batas² jang tidak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara, dan disamping itu ekonomi individuil Rakjat pekerdja harus dibantu”.

Menurut PKI, persoalannya dalam ekonomi Indonesia jalah bukannya bahwa terdapat terlalu banjak kapitalis² nasional atau pengusaha² nasional, tetapi sebaliknya, masih terlalu sedikit. Kaum pengusaha nasional terutama mereka jang berusaha dibidang industri, harus diadjak untuk mengerahkan potensi²nja dalam membangun suatu ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal. Kaum pengusaha nasional sangat berkepentingan dalam usaha² untuk mengachiri sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme, sebab ke-dua²nja merupakan halangan besar, halangan strategis, bagi perkembangan industri² nasional.

Sisa² imperialisme sangat membatasi perkembangan industri dalam negeri karena kaum imperialis berkepentingan untuk tetap memelihara negeri kita sebagai pasaran bagi hasil² industri mereka sendiri, sedangkan sisa² feodalisme merupakan penghalang terpenting dalam menjapai kesatuan pasaran nasional yang stabil yang merupakan syarat mutlak bagi perkembangan industri nasional. Oleh karena itu, setjara objektif kaum pengusaha nasional, terutama pengusaha² industri memang dapat diadjak ikutserta dalam perjuangan Rakjat Indonesia melawan sisa² imperialisme dan feodalisme itu.

Kaum pengusaha nasional terutama dapat memainkan peranan yang penting dalam membangun sektor industri yang djustru sangat lemah sebagai akibat politik kolonial. Dengan demikian, kaum pengusaha nasional dapat membantu dalam menaikkan taraf produksi yang merupakan kuntji bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Dengan adanya industri nasional yang giat, maka makin banjaklah bahan² mentah hasil kita sendiri yang akan bisa diolah didalam negeri, makin besar kemungkinan untuk mengurangi import barang² industri, dan makin luas lapangan kerdja bagi kaum buruh. Pada saat ini, mengerahkan potensi swasta, seperti yang ditetapkan dalam Dekon, harus berarti chususnja membuka kembali kemungkinan² bagi industri nasional yang sudah ada untuk menjapai kegiatan² pada tingkat kapasitas penuh, mengingat bahwa ada perusahaan² yang sudah terpaksa tutup atau bekerdja pada tingkat kapasitas yang sangat rendah karena kekurangan atau tidak adanya bahan² baku yang mereka perlukan, yang terlalu sering merupakan objek spekulasi, terutama oleh kaum kapitalis birokrat. Disamping itu, ia harus berarti pula melindungi industri² yang sudah ada, memberikan fasilitas² yang lebih luas kepada mereka serta memungkinkan dibangunkannya industri² baru dengan mempergunakan modal nasional dan domestik.

Dalam menentukan sikap kita terhadap sektor swasta, selalu perlu diingat, seperti ditegaskan pula didalam Dekon, bahwa perspektif daripada Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Ini berarti bahwa sektor swasta harus memegang peranan sebagai pembantu sektor negara dan bahwa ia tidak mempunyai perspektif untuk berkembang menjadi kapitalisme monopoli yang menguasai seluruh kehidupan ekonomi.

Mendorong perkembangan swasta nasional samasekali tidak berarti membiarkan kapitalis² komprador yang hidup dari djasa² mereka dalam memelihara hubungan erat dengan kaum imperialis, dan djuga tidak dimaksudkan untuk membiarkan kapitalis² birokrat yang djustru merupakan salahsatu penghambat bagi perkembangan industri nasional.

Selanjutnja, perlu djuga ditekankan bahwa kaum imperialis sangat menentang adanya sektor negara yang memimpin didalam ekonomi kita, sudah dan akan terus berusaha untuk mendapatkan partner-partner mereka dalam sektor swasta guna melakukan penetrasi ekonominja dinegeri kita. Oleh karena itu, dari kaum pengusaha nasional sangat diharapkan semangat patriotisme, semangat menolak untuk memainkan peranan kaki-tangan imperialis, peranan menghambat penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Sektor swasta nasional yang patriotik hanya akan bisa berkembang djika diantara sektor itu dengan sektor negara terdapat hubungan yang erat dan yang saling membantu. Pemerintah membantu sektor swasta dengan memberikan fasilitas², perlindungan, pesanan² dan lain sebagainya, sedangkan sektor swasta membantu sektor Negara dengan mengerahkan seluruh potensinja untuk membangun industri nasional, dalam mempertinggi produksi nasional dan dalam menjediakan lapangan kerdja yang lebih luas. Perlu ada ketetapan yang djelas tentang bidang² bergerak bagi swasta nasional, tentang bidang² yang mana yang terbuka bagi swasta nasional dan bidang mana yang hanya terbuka bagi negara saja.

Demikian beberapa pokok yang ingin saja kemukakan mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia seperti ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi. Dari uraian ini, dapat kita simpulkan setjara kongkrit sebagai berikut: *Usaha² untuk menjapai susunan ekonomi yang anti-imperialis dan anti-feodal, untuk menjapai susunan ekonomi yang progresif, harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan² mereka yang mewakili dan membela imperialisme dan sisa² feodalisme, jaitu dengan mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa², atau kongkritnja tuantanah², kapitalis² birokrat dan kaum komprador, dan dengan membela kepentingan² Rakjat. Kemampuan seseorang untuk setjara ichlas dan sungguh² melaksanakan Dekon harus diukur berdasarkan kesungguhannya dalam melakukan tugas ini.*

II

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK

Didalam bagian kedua daripada tjeramah ini, ingin saja mengemukakan beberapa pandangan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek. Per-tama² saja ingin menekankan kepada tiga hal yang harus mendjadi pegangan bagi setiap usaha Pemerintah dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek ini :

Pertama, langkah² yang diambil tidak boleh bertentangan, malahan harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan ini berarti merealisasikan tujuan untuk membersihkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Djadi, tidak boleh memperkokoh posisi ekonomi kaum imperialis dengan djalan membuka pintu bagi penanaman modal monopoli asing setjara klasik atau setjara neo-kolonialisme.

Kedua, faktor yang paling menentukan dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini, dan dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek ialah usaha² untuk menaikkan tingkat produksi dengan berorientasi pada tenaga produktif yang pokok, jaitu kaum buruh dan kaum tani. Ini harus berarti bahwa tidak boleh ada tindakan² yang merugikan tenaga² produktif itu, karena ini dengan sendirinja akan berarti bertentangan dengan tujuan untuk mentjapai kenaikan produksi.

Ketiga, usaha² untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini harus berdasarkan mobilisasi kekuatan dan potensi Rakjat dengan mentjiptakan kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM disegala bidang, dan menggali serta mengexploitasi kekayaan alam Indonesia sendiri. Merehabilitasi semua potensi ekonomi yang ada dan menggunakan segala dana rupiah dan devisa yang ada atau bisa disediakan setjara efektif dengan men-

tjegah pemborosan serta memberantas salahurus disegala bidang ekonomi dan keuangan.

Dekon dengan setjara tepat mengemukakan prinsip yang harus dipegang dalam menghadapi persoalan² ekonomi seperti inflasi, kekurangan devisa dsb. dengan mengatakan sbb. : „Keadaan yang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah yang berdiri sendiri. Lebih² tidak mungkin kita atasinja hanya dengan tindakan moneter konvensional belaka. Sebaliknya, tidak ada djalan mudah yang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita”. (lihat Dekon, fasal 13).

Dengan demikian Dekon dengan tegas menolak pandangan sementara orang, termasuk pula ahli² ekonomi Indonesia tertentu yang masih berpegang pada teori² liberal atau burdjuis, bahwa kesulitan² ekonomi yang kita hadapi sekarang adalah merupakan suatu "viciouse cirkel" atau lingkaran yang tak berujung-pangkal. Pandangan ini saja anggap sangat perlu mendapat perhatian sardjana² progresif, terutama sardjana² ekonomi. Berpegang pada pandangan "viciouse cirkel" berarti beranggapan bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini ialah dengan mengundang penanaman modal serta „bantuan" ekonomi dari negara-negara imperialis. Berpegang pada pandangan "viciouse cirkel" berarti beranggapan bahwa hanya tindakan-tindakan teknis-moneter yang drastis saja yang akan mampu mengachiri keadaan kritis pada dewasa ini, jaitu tindakan² yang merugikan Rakjat dan menguntungkan modal monopoli asing karena memperkuat posisi dolar didalam ekonomi kita.

Sikap yang diambil didalam Dekon seperti saja kutip diatas merupakan dasar yang kuat bagi usaha² menjlesaikan kesulitan² ekonomi sesuai dengan semangat patriotisme, sesuai dengan penolakan dan perlawanan terhadap neo-kolonialisme yang selalu siap pada setiap saat untuk „membantu" kita keluar dari "viciouse cirkel" dan dengan demikian memasukkan kita kedalam perangkap mereka.

Kebidjaksanaan djangka pendek pada pokoknja berkisar disekitar usaha² untuk dengan selekas mungkin menjediakan pangan yang tjukup, terutama beras, dan

untuk menjadikan bahan² baku dan penolong serta spare-parts bagi industri dan sektor produksi. Dua hal itu ditentukan sebagai prioritas utama dalam jangka waktu 2 tahun ini. Dekon juga menetapkan bahwa dua hal tersebut harus dibijai dengan kekuatan kita sendiri, dan hanya „bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjajikan kredit² luar negeri dengan sjarat² sesuai dengan ketentuan² dalam Ketetapan MPRS No. II, tahun 1960” (lihat Dekon fasal 30).

Ada pihak yang menarik kesimpulan bahwa Dekon merupakan sematjam program 2 tahun. Ini samasekali tidak benar. Kesimpulan sematjam ini menunjukkan bahwa Dekon samasekali tidak difahami. Dekon adalah merupakan program untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia tahap pertama. Program untuk menyelesaikan sesuatu revolusi dengan sendirinja tidak bisa diikat dengan waktu. Ini tergantung seluruhnja dari keadaan objektif serta imbangannya kekuatan.

a) TENTANG "IRON STOCK" BERAS

Dekon menetapkan bahwa „Pemerintah harus mempunyai dan menguasai 'iron stock' beras” (fasal 30). Ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah harus dapat menguasai persediaan dan distribusi beras pada umumnya. Maksud-tudjuan "iron stock" ialah untuk dapat menguasai pasaran beras guna mentjegah kenaikan harganya. "Iron stock" dipergunakan untuk mengachiri perdagangan gelap beras dan untuk memungkinkan seluruh Rakjat membeli beras yang dibutuhkannya dengan harga resmi. Djadi, maksudnja ialah untuk menurunkan kembali ongkos² hidup yang sudah sedemikian tinggi itu.

Karena hal ini merupakan sesuatu yang perlu diselenggarakan dengan segera, maka usaha² kearah tudjuan ini harus meliputi tindakan² jangka pendek untuk dengan segera menaikkan produksi pangan, terutama beras. Hal yang demikian memerlukan fasilitas² segera kepada kaum tani, untuk membantu usaha² produktif mereka, dan terutama mendirikan Dewan² Produksi dimana kaum tani yang terorganisasi diikutsertakan. Dalam rangka ini pula, perlu segera diambil tindakan² untuk mengachiri rintangan² yang dihadapi oleh kaum tani, khususnya rintangan² yang timbul karena penguasa² daerah yang berwatak feodal atau kapitalis birokrat.

Sumber "iron stock" beras yang paling tepat ialah dari produksi beras dalam negeri dan ini dengan sendirinja berarti bahwa disamping usaha² untuk mensukseskan target kenaikan produksi padi harus pula diadakan peninjauan kembali setjara seksama mengenai pembelian padi pemerintah yang mengalami kegagalan dalam tahun yang lalu.

Karena kesimpangsiuran yang sangat meradjalela di bidang statistik maka kita menghadapi kenyataan bahwa angka yang dapat dipertjaja mengenai produksi padi dalam tahun 1962 tidak ada. Yang ada ialah angka Biro Pusat Statistik jaitu 17.8 djuta ton, angka Komisi Djuned (Menteri Research Nasional) jaitu 18.3 djuta ton dan angka Departemen Agraria dan Pertanian 19.8 djuta ton dan 20.1 djuta ton. Entah yang mana yang benar, tetapi yang djelas ialah bahwa dari semua angka ini tidak ada satu yang mentjapai target produksi padi untuk tahun 1962 seperti yang ditetapkan oleh MPRS, jaitu 20.4 djuta ton. Program "self-supporting beras" telah diakui suatu kegagalan dan Padi Sentra ternjata telah menjadi sentra² korupsi dan ketidakberesan yang sangat merugikan.

Saja berpendapat bahwa bidang statistik masih dihindangi kesimpangsiuran serta tjara² mengumpulkan statistik ternjata masih berdasar metode² kaum kolonialis Belanda dulu dengan samasekali mengabaikan pengalaman tenaga² produktif sendiri, khususnya kaum tani dan kaum buruh di-pabrik². Hal yang tidak memuaskan ini patut mendapat perhatian yang serius daripada sardjana Indonesia. Perentjanaaan dan penelitian tanpa statistik adalah laksana membikin kuwe tanpa bahan². Tetapi lebih tjelaka lagi ialah perentjanaaan dan penelitian dengan statistik yang salah, sebab perentjanaaan dan penelitian sematjam itu dapat dipastikan akan meleset dari sedjak semula. Mudah²an para sardjana akan berhasil dalam ikut memperbaiki keadaan yang tidak memuaskan di bidang statistik ini, dan akan mengadakan penelitian ber-sama² dengan tenaga² produktif, untuk mengumpulkan bahan² statistik yang benar, khususnya di bidang produksi pangan. Ini akan merupakan suatu sumbangan kongkrit yang sangat berguna bagi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Seperti halnya dengan program kenaikan produksi padi, maka pembelian padi pemerintah djuga telah

mengalami kegagalan, karena kaum tani sebagai produsen padi ternyata tidak diadjak untuk berunding mengenai penetapan djatah jang masukakal dan mengenai harga jang pantas. Sedangkan pada umumnja tidak di-djalankan usaha² untuk melaksanakan pembajaran dengan tjara² jang mudah dan tjepat dengan disertai usaha² efektif dalam membantu kaum tani untuk membeli kebutuhan² dengan harga pantas, seperti misalnja garam, ikan asin, minjaktanah, tekstil, alat² pertanian, pupuk dan sebagainja. Dibeberapa daerah Pemerintah belum melunasi harga² padi jang dikumpulkan dari kaum tani.

Pada pokoknja kegagalan² jang dialami dalam mentjapai kenaikan produksi beras dan dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah disebabkan karena usaha² itu tidak didasarkan setjara kokoh pada tenaga produktif disektor pertanian, jaitu kaum tani. Saja berpendapat, bahwa lebih² daripada di-bidang² lain, ketentuan Dekon mengenai mutlak perlunja „*menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat*” harus didjalkan dengan konsekwen dibidang produksi pangan, chususnya padi. Potensi dan kekuatan Rakjat akan bisa digerakkan dibidang pertanian djika *kepentingan² kaum tani dibela dan kepentingan² kaum tuantanah serta kapitalis birokrat dikorbankan*. Ini merupakan hal jang sangat urgen, ini merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai kenaikan produksi, untuk mensukseskan program pembelian padi dan untuk mendjamin adanja “iron stock” beras ditangan Pemerintah. Perlu ditekankan bahwa satu²nja djaminan untuk mentjapai sukses dibidang produksi pangan jalah djustru dengan mengikis habis sisa² feodalisme itu. Dengan demikian djelaslah kiranja betapa satunja tugas mengatasi persoalan pangan dengan tugas menjelesaikan tuntutan² revolusi pada tahap sekarang ini, tahap nasional demokratis.

Dalam hubungan dengan tugas untuk menguasai suatu “iron stock” beras ada beberapa tafsiran jang mengartikan hal ini sebagai andjuran untuk memperbesar import beras sebagai satu²nja djalan memperoleh beras itu. Saja tidak membantah bahwa dalam keadaan jang sangat mendesak dimana terdapat kekurangan² beras sehingga mengganggu kelantjaran roda ekonomi, maka import beras mendjadi suatu keharusan. Tetapi menggantungkan diri pada import beras sadja tidak me-

rupakan djalan keluar jang tepat. Malahan djika perhatian terlalu banjak diarahkan kesana, sektor pertanian kita sendiri dapat mengalami kerugian² besar. Setiap kali Pemerintah mengimport beras, ini berarti suatu kegagalan dibidang produksi dalam negeri, karena masih terlalu banjak devisen digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengorbankan sektor produktif. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu achir² ini import beras telah mentjapai volume jang sangat besar, jaitu 1.3 djuta ton dalam tahun jang lalu. Apakah dengan demikian persoalan pangan telah diatasi? Samasekali tidak! Malahan sebaliknya! Volume import beras telah mentjapai rekord dalam tahun 1962, tetapi kekatjauan dalam persediaan dan distribusi beras djuga telah mentjapai rekord dalam tahun itu!

Dalam hubungan dengan persoalan ini, saja ingin pula menjebut suatu pendapat jang sangat keliru tentang pengaruhnja sesuatu inflasi terhadap pertanian. Menurut ahli² ekonomi tertentu, sesuatu inflasi dianggap hanja merugikan golongan² jang berpenghasilan tetap, jaitu kaum buruh dan pegawai, sedangkan tenaga produktif dibidang pertanian tidak mengalami kerugian² karena, katanja, harga penghasilan mereka selalu disesuaikan dengan kenaikan harga jang terdjadi dalam rangka inflasi itu. Teori ini dipergunakan untuk menjebarkan ide bahwa kaum tani Indonesia tidak mengalami kesulitan² sebagai akibat inflasi pada saat ini.

Pandangan ini adalah sangat keliru dan samasekali mengabaikan kenjataan bahwa disektor pertanian kita masih terdapat sisa² feodalisme jang berat. Seandainja halnja memang demikian, saja rasa Rakjat Indonesia jang lk. 70% hidup dari pertanian, tidak akan begitu berkeberatan djika terdjadi inflasi sebab, menurut teori itu, jang rugi hanja sebagian ketjil sadja.

Pandangan ini hanja berlaku terhadap tuantanah dan tanikaja, tetapi samasekali tidak berlaku terhadap kaum tanimiskin dan mereka jang tidak mempunjai tanah samasekali, jaitu buruhtani, sedangkan djumlah tanimiskin dan buruhtani djustru meliputi bagian terbesar daripada mereka jang hidup dideesa. Tanimiskin dan buruhtani mengalami kesulitan² jang amat besar karena hampir semua kebutuhan mereka harus dibeli, termasuk pula beras. Kaum tani dipedusunan di Djawa dan Madura telah mengalami kenaikan harga jang sangat be-

rat sekali sedjak tahun 1960 seperti jang dapat dilihat dari index harga 12 barang makanan pokok dan barang² tekstil didaerah pedusunan, sbb. :

Tahun	12 bahan makanan pokok	Tekstil
1960	388	926
1961	1243	836
1962 (Maret)	1910	1176

Sumber : BPS

1953 = 100

Disamping itu, sistim distribusi barang sandang-pangan jang sedikit atau banjak mulai berdjalan dibeberapa kota besar, walaupun dengan berbagai kematjetan, samasekali tidak didjalankan di-desa². Kaum tani djuga mendjadi sasaran tengkulak² lama dan tengkulak² baru alias kapitalis² birokrat jang dengan tepat sudah dinjatakan oleh kaum tani sendiri sebagai „tikus kaki-dua“.

Kaum tani djuga mengalami kesulitan² jang sangat besar karena makin rusaknja seluruh aparatatur pengangkutan termasuk djalan². Ada berita misalnja disalahsatu daerah di Sumatera Selatan jang banjak menghasilkan bahan² hasil ekspor bahwa satu²nja tjara jang tinggal untuk mengangkut hasil² mereka itu jalah dengan tenaga manusia sadja.

Teori, atau lebih tepat dikatakan „dongengan“ mengenai tidak ruginja kaum tani diwaktu inflasi ini, sebenarnja hanja meneruskan kebohongan jang suka disebarkan oleh kaum kolonialis Belanda dulu bahwa Rakjat Indonesia umumnja tidak menderita diwaktu krisis ekonomi karena selalu bisa ditampung oleh desa. Orang² atau sardjana² jang masih pertjaja pada dongengan² ini perlu „turun kebawah“ untuk melihat dengan mata kepalanja sendiri betapa kemelaratan di-desa² pada saat ini.

Inflasi djustru memperkuat posisi ekonomi kaum tuan-tanah dan kaum penghisap lainnja di-desa² dan membikin lebih berat lagi kehidupan kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani. Kenyataan ini harus diperhitungkan dalam menetapkan langkah² untuk menaikkan produksi pangan.

b) USAHA² UNTUK MEMULIHKAN KEMBALI APARAT PRODUKSI

Tudjuan kedua daripada kebidjaksanaan djangka pendek jalah untuk „menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini“. Tugas ini, disamping tugas untuk menjediakan „iron stock“ beras, dinjatakan harus diberi prioritas utama dalam waktu² tahun ini. Kedua tugas ini dimaksudkan „supaja dapat memperbesar daja-produksinja, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbangannya daripada beredarnya uang“ (Dekon, fasal 30).

Penegasan ini berarti bahwa prinsip pokok daripada Dekon dalam menanggulangi kesulitan² ekonomi jalah untuk mentjapai kenaikan tingkat produksi. Penegasan ini adalah sangat penting dan harus didjadikan dasar bagi setiap langkah jang mau diambil. Kongkritnja, prinsip ini berarti bahwa pada pokoknja, mulai dengan diutjapkanja Dekon, setiap tindakan dibidang ekonomi dan dibidang politik pada umumnja harus ditinjau dari sudut : apakah tindakan itu mendorong produksi ataukah sebaliknya, menghambat produksi; apakah tindakan itu menguntungkan tenaga² produktif, ataukah sebaliknya, merugikan tenaga² produktif.

Dekon menetapkan bahwa usaha² untuk memulihkan aparat produksi harus pada tingkat pertama dipusatkan kepada memperlantjar kembali persediaan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Sudah diketahui setjara umum betapa sektor industri serta sektor pengangkutan menghadapi kematjetan² jang sangat mendalam pada saat ini karena kekurangan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Walaupun tidak ada suatu angka jang menjeluruh mengenai tingkat produksi disektor industri pada umumnja, saja rasa tidak ber-lebih²an djika diperkirakan bahwa industri dalamnegeri pada saat sekarang hanja bekerdja rata² 25% daripada kapasitas penuhnja.

Adalah suatu kenyataan bahwa negeri kita masih sangat tergantung kepada luarnegeri untuk persediaan² spare-parts dan bahan² baku/penolong, walaupun dapat diketahui pula bahwa bukan hanja persediaan bahan-bahan baku dari luarnegeri jang mengalami kema-

tjetan-kematjetan dewasa ini. Pun bahan² baku jang terdapat didalamnegeri sangat kurang, atau distribusinja matjet karena didjadikan objek spekulasi. Sedangkan dimana telah diambil tindakan² jang dimaksudkan untuk mengatasi kematjetan² dan ketidakberesan itu, seperti misalnja dengan sistim pengawasan ban² jang baru² ini, ternjata mempunjai efek jang djustru sebaliknya, jaitu lebih mematjetkan bidang² jang sudah demikian matjetnja itu.

Ketergantungan sektor produksi kepada luarnegeri untuk spare-parts tersebut berarti bahwa tugas pokok daripada sektor import pada dewasa ini harus ditekankan pada melajani kebutuhan² tersebut. Disamping pembelian bahan² konsumsi pokok jang masih harus diimport, sektor import harus dikerahkan khususnja untuk mendatangkan kebutuhan² sektor produksi. Dalam hubungan ini, Dekon djuga menegaskan bahwa kita harus *„mengurangi sedjauh mungkin import bahan² luar“* (Dekon, fasal 30).

Saja anggap hal ini sangat penting dalam rangka mendjaga kebebasan kita dibidang import bahan² baku dan spare-parts. Telah diketahui bahwa kaum imperialis AS, Belanda dan lain² telah siap untuk „membantu“ kita dalam mengatasi kesulitan² spare-parts tersebut. Misalnja, dalam bulan Februari jbl, telah ditandatangani persetujuan kredit dengan AS sebesar \$ 17 djuta khususnja untuk spare-parts dan bahan² penolong. Kaum imperialis ternjata melihat bidang ini sebagai suatu kemungkinan jang baik untuk mengikat ekonomi kita setjara lebih efektif kepada ekonomi mereka dan untuk mengabadikan posisi mereka sebagai sumber barang-barang keperluan industri. Ini berarti bahwa, lebih² disektor ini, kita harus berusaha untuk membiajai import barang² tersebut dengan penghasilan devisa kita sendiri dan sedjauh mungkin tidak dengan kredit² dari negara² kapitalis jang disertai sjarat² jang merugikan Indonesia.

Disamping kekurangan import, persediaan bahan² baku penolong djuga sangat dikatjaukan karena berbagai penjelewengan dan korupsi serta manipulasi dibidang distribusi. Benang mendjadi objek korupsi dan manipulasi, ban mobil mendjadi objek korupsi dan manipulasi, semen mendjadi objek korupsi dan manipulasi. Ja, tak ada satu bahanpun jang tidak dikorupsi dan

dimanipulasi oleh kaum kapitalis birokrat. Ini berarti bahwa tindakan² untuk memberantas korupsi dan meritul tukang² salahurus adalah sangat erat hubungannja dengan tugas untuk menaikkan tingkat produksi.

e) DEKONSENTRASI DALAM SOAL MANAGEMENT

Salahsatu ketentuan dalam Dekon jang perlu mendapat perhatian ialah mengenai akan diadakannja dekonsentrasi dalam management. Hal ini dikemukakan karena dirasakan betapa kurang baik berdjalannja pengurusan atau management pada saat ini khususnja didalam perusahaan² negara, sehingga salahurus itu sangat mengakibatkan kematjetan² disegala lapangan.

Memang dapat dimengerti bahwa djika „sistim management“ terlalu terpusat, maka ekonomi kita jang meliputi suatu daerah jang sangat luas dengan djaringan komunikasi jang pada umumnja sangat kurang, akan menghadapi berbagai kesulitan dan kematjetan. Salahsatu prinsip jang sangat penting dalam hal pengurusan ekonomi sektor negara ialah supaya mereka jang bertanggungjawab terhadap satu perusahaan atau didalam satu perusahaan terhadap satu bagian, tjabang atau daerah, diberi otoritet atau wewenang serta tanggungjawab perseorangan jang tjukup karena hanja dengan demikian, perusahaan atau tjabang² jang bersangkutan akan bisa berdjalan dengan lantjar. Tentuja, tanggungjawab tersebut harus sepenuhnya dilakukan sesuai dengan garis² atau kebidjaksanaan umum dan tidak boleh diartikan sebagai ketentuan jang membuka kemungkinan bagi orang² untuk setjara se-suka²-nja menentukan langkah² jang bersifat kedaerahan jang sempit atau hanja menguntungkan kepentingan pribadi si-manager sendiri.

„Dalam menetapkan perlu adanja dekonsentrasi dalam management, Dekon dengan tepat menekankan bahwa ini harus didjalankan *„dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik“*, bahwa dekonsentrasi itu dimaksudkan berlaku hanja *„mengenai sesuatu hal, jang hanja mengenai daerah atau wilayah tjabang itu sendiri“*, dan bahwa dekonsentrasi ini *„tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam perencanaan (planning) dan pengawasan (control) terakhir, jang ada ditangan pihak pusat“*. Djuga ditekankan

bahwa „dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkkan dalam otonomi lokal” (fasal 24).

Syarat² ini memperlihatkan dengan sangat djelas bahwa dekonsentrasi hanya ditunjukkan kepada mentjapai efisiensi dalam mendjalankan perusahaan² dan dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan² teknis karena keadaan geografis serta kekurangan² perhubungan jang terdapat pada saat ini. Dekonsentrasi samasekali tidak boleh mengurangi kesatuan ekonomi dan politik nasional dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan usaha² kaum separatist chususnja kaum pemberontak PRRI-Pernesta beberapa tahun jang lalu jang memang sngadja mempergunakan keluh-kesah Rakjat di-daerah² tertentu serta kesulitan² komunikasi antara daerah dan pusat untuk mentjapai maksud²nja jang djahat dalam menghantjurkan Republik Kesatuan kita.

Perlu saja kemukakan pula bahwa penetapan mengenai dekonsentrasi itu tidak berarti bahwa salahurus hanja terdjadi karena management terlalu banjak dipusatkan di Djakarta. Ketentuan Dekon ini samasekali tidak mengurangi konstataasi bahwa faktor terpenting dalam pengurusan jalah manusianja, dan bahwa kesulitan² jang dialami oleh perusahaan² atau bank² negara di-daerah pada pokoknja disebabkan oleh karena banjaknja orang jang salahduduk. Dari pengalaman dapat diketahui bahwa banjak sekali pemimpin² perusahaan² negara di-daerah merupakan orang² jang tidak tjakap, jang tidak djudjur dan tidak Manipolis sehingga mereka mudah diperalat oleh kalangan² tertentu untuk kepentingan²nja sendiri.

Kalau seandainya salahduduk dan salahurus hanya menimbulkan inefisiensi dan kelalaian, mungkin tidak seberapa djelek pengaruhnja terhadap ekonomi. Tetapi jang kita hadapi jalah salahduduk dan salahurus jang mengakibatkan pensalahgunaan kekajaan negara, penjtolengan, korupsi dan pemborosan setjara besar²an. Karena itu, salahduduk dan salahurus, apalagi ditempat-tempat jang djauh dari pengawasan pusat, harus segera diachiri.

Dekonsentrasi pengurusan atau management berarti bahwa lebih daripada sebelumnya, faktor manusia harus diperhatikan. Djika orang² jang tidak tjakap dan tidak djudjur membikin segalanja katjau dalam keadaan dimana pusat mempunjai wewenang jang besar, orang²

itu akan lebih² sangat membahayakan djika mereka diberi wewenang jang luas. Dapat kita bajangkan bahwa dekonsentrasi bisa berarti suatu „zaman emas” untuk tukang² salahduduk dan salahurus itu.

Dekonsentrasi harus berarti bahwa lebih daripada sebelumnya harus segera dilakukan rituling, sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam Dekon.

d) PERUBAHAN² DALAM SISTIM PERPADJAKAN

Apa jang ditetapkan dalam Dekon mengenai perpadjakan merupakan suatu kemadjuan jang sangat penting. Dekon menolak sistim perpadjakan jang lama karena sistim itu berpokok kepada padjak² langsung dan tidak langsung jang pada umumnja sangat memberatkan Rakjat. Sistim perpadjakan itu jang sampai saat ini masih tetap berlaku, merupakan satu aspek jang tak bisa dipisahkan dari sifat ekonomi kita sebagai ekonomi jang tergantung, dimana eksport dan import memegang peranan jang menentukan, dimana keuangan negara masih bersandar kepada padjak² langsung dan tidak langsung se-mata². Malahan perpadjakan masih dianggap oleh ahli² ekonomi tertentu sebagai „instrumen pembangunan jang utama”. Dekon menetapkan tiga prinsip baru mengenai perpadjakan, jaitu „(a) untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka; (b) untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan (c) untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selanjutnja”. (fasal 27).

Prinsip pertama dalam mengubah sistim perpadjakan harus menetapkan politik padjak jang berpegangan pada prinsip dari Rakjat kembali ke Rakjat dan dengan sendirinja politik fiskal pada umumnja tidak boleh menghambat kegiatan produksi dan menambah berat beban penghidupan Rakjat. Politik keuangan harus mengabdikan pada produksi dan tidak sebaliknya seperti halnja sekarang ini dimana produksi mengabdikan, atau lebih tepat, dikorbankan karena politik keuangan dan fiskal jang keliru. Sampai saat ini, tjara² jang dipergunakan untuk memperoleh kenaikan penerimaan negara jalah melalui kenaikan tarif padjak, kenaikan harga dan djuga me-

laini matjam² padjak baru, seperti komponen harga, meerwinst dsb. Tjara² jang demikian itu biasanja di-benarkan, djuga dalam textbook² mengenai politik fiskal kapitalis, karena administratif gampang; tetapi segi jang paling gampang dari tjara² itu bisa pindah efeknja kepada para konsumen, jaitu Rakjat, terutama Rakjat pekerdja. Kenaikan pendapatan padjak² langsung dan tidak langsung harus ditjapai bukan dengan tjara itu melainkan melalui perkembangan ekonomi jang sehat. Bertambahnja kegiatan ekonomi dengan sendirinja akan bertambah penerimaan negara dari padjak.

Penegasan Dekon bahwa usaha² untuk menaikkan penghasilan negara harus berpegang pada prinsip untuk "tidak menambah beban Rakjat banjak" (Dekon, fasal 31) berarti bahwa keputusan jang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara hanya tiga hari sesudah Dekon diutjapkan, jang menaikkan tarif listrik dengan 300%, sangat bertentangan dengan Dekon. Ini memperlihatkan betapa perlu dilakukan perdjjuangan jang terus-menerus untuk mendjjamin supaja Dekon dilaksanakan setjara konsekwen dan untuk melawan setiap tindakan jang tidak sesuai dengan prinsip² Dekon.

Politik perpadjakan jang memberikan dorongan kepada inisiatif produsen djuga berarti bahwa bagi mereka (pengusaha² swasta) jang bersedia mempergunakan kekajaannya setjara produktif (dibidang produksi) perlu diberikan kelonggaran² padjak serta lain² fasilitas untuk berkembang, karena kemudian, djika tingkat produksi telah meningkat maka penerimaan dari mereka melalui padjak akan mendjadi lebih besar daripada sebelum usaha² prodaktif itu dimulai. Kelonggaran² itu dapat merupakan dorongan penting bagi kegiatan² prodaktif setjara umum.

Prinsip kedua jang ditetapkan dalam Dekon, jaitu untuk meratakan akumulasi modal, merupakan prinsip jang sangat penting. Karena padjak² pada saat ini untuk sebagian besar didapat dari Rakjat, maka dengan sendirinja akumulasi modal adalah sangat tidak merata dan sangat memberatkan Rakjat. Orang² jang memperoleh keuntungan² besar dari inflasi bisa menghindari pembayaran padjak bukan hanya karena kelitjikan mereka sendiri tetapi djuga karena sistim perpadjakan pada saat ini memang tidak menampung tambahan² besar

dalam kekajaan seseorang. Selain daripada itu, padjak² jang diambil dari Rakjat djustru achirnja lebih memperkaja orang² itu, jaitu uangnja keluar dari kantong Rakjat jang begitu tipis untuk masuk ke-kantong² OKB² jang sudah begitu gemuk. Prinsip, dari Rakjat pekerdja ke OKB² harus diganti dengan dari Rakjat pekerdja kembali kepada Rakjat pekerdja, dan djuga, selama OKB² masih ada di-tengah² kita, dari OKB² ke Rakjat pekerdja. Keadaan inflasi sudah pasti sangat merugikan Rakjat karena harga barang² melondjak dengan tjepat, penghasilan riil Rakjat makin tertekan rendah. Kaum kapitalis birokrat, modal monopoli asing, semuanya bertambah untung dan kaja dalam keadaan inflasi sedangkan Rakjat pekerdja bertambah miskin dan bertambah papa-sengsara.

Dengan demikian Rakjat pekerdja memikul dua beban jang sangat berat, jaitu keadaan inflasi itu sendiri dan disamping itu sistim perpadjakan jang sangat tidak merata, sedangkan OKB² samasekali bebas dari beban² itu.

Keadaan jang demikian djuga terdapat di-desa² dimana tuantanah² menerima penghasilan jang semakin besar dengan adanya kenaikan harga hasil bumi, sedangkan penghasilan mereka itu umumnya terlepas dari padjak. Sebaliknya kaum tani bertambah miskin.

Prinsip ketiga dalam Dekon dalam mengubah sistim perpadjakan sebenarnya merupakan kuntji bagi politik fiskal didalam sesuatu ekonomi nasional dan demokratis jang mau kita bangun. Sektor ekonomi negara harus mendjadi sumber terpenting bagi pendapatan negara. Ini harus ditjapai melalui kenaikan kegiatan atau intensitet perusahaan² negara diberbagai sektor dan tidak melalui kenaikan tarif atau harga. Dengan demikian setingkat demi setingkat sumber pendapatan negara dan pembiajaan pembangunan bisa kita kurangi dari sektor perpadjakan jang sekarang meliputi lebih dari 30 djenis matjam padjak dan mengubah prinsip tersebut sehingga pendapatan negara terutama bersumber pada perkembangan ekonomi sektor negara. Ambillah sebagai misal perusahaan seperti DKA. Djika kapasitas operasi DKA dinaikkan maka tanpa adanya kenaikan harga kartjis atau tarif kereta-api, penerimaan negara akan meningkat, dan ini akan memungkinkan pula bertambahnja penanaman modal baru sehingga terdjadi lagi kenaikan

kapasitet, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, dengan memperketijil operasi DKA seperti halnya sekarang, perusahaan itu dengan sendirinja tambah mengalami kerugian.

Pada saat ini, perlu dikonstatasi bahwa perusahaan² negara bukannya hanya tidak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi malahan sebaliknya, mereka merupakan beban finansil bagi Pemerintah karena banyaknya kredit yang terus-menerus diberikan kepada mereka sedangkan hasilnya samasekali tidak seimbang. Dalam hubungan ini, Dekon menjatakan bahwa perangsang² (incentives) akan diberikan kepada PN² yang dapat mengurangi penggunaan kredit. Ini tentunya tidak mengurangi perlunya rituling setjara intensif untuk mengachiri salahurus yang sangat meradjalela dibidang perusahaan² negara pada saat ini dan yang mendjadi sebab utama daripada pemborosan dan pentjolongan kekajaan perusahaan² itu yang hidup dari kredit bank² negara. Maka dari itu, rituling djuga merupakan sjarat mutlak untuk menjapai prinsip ketiga yang ditetapkan dalam Dekon dalam mengubah sistim perpajakan.

Mengenai kenyataan bahwa Dekon dalam membitjarkan perangsang² kepada perusahaan² negara, khususnya menjebut perusahaan dagang negara (PDN²), ada yang mengartikan ini sebagai usaha untuk meng-anak-mas-kan PDN². Tetapi ini bisa djuga diartikan sebagai tanda bahwa djustru PDN² itu yang paling tidak beres dalam hal memutar modal dengan djumlah kredit yang besar; ini bisa djuga diartikan bahwa djustru PDN² yang perlu diritul!

Bagian yang mengenai perangsang kepada eksportir dalam Dekon tidak boleh disalahtafsirkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dekon yang menolak devaluasi dan tindakan² yang bersifat "moneter konvensional". Pada hakekatnja yang terpenting adalah perangsang kepada produsen barang² eksport dengan menutup kerugian rupiah yang dialami oleh produsen akibat disparitet antara harga pendjualan produsen (ongkos produksi ditambah winstmarge tertentu) dengan harga luarnegeri. Disamping itu eksport didorong maju melalui perluasan pasar dunia, upgrading (peningkatan daripada kualitas), pemberantasan penjelundupan-penjelundupan dengan lebih intensif lagi, perluasan eksport dengan kelebihan barang² djadi hasil

pengolahan sendiri bahan² mentah. Siva yang sekarang ini mengatjaukan harga disemua bidang supaya dihapuskan dan untuk mengatasi keadaan yang sulit sekarang ini Presiden sebagai mandataris MPRS supaya mengambil tindakan² agar Pemerintah menjelenggarakan eksport dan import.

Selanjutnja mengenai politik keuangan, Dekon djuga menetapkan bahwa „menaikkan penghasilan negara ... harus ditjapai dengan menggali sumber² baru serta mengintensifkan penggalian sumber² lama, dan dengan tidak menambah beban Rakjat banjak". Dinjatakan pula bahwa „penjusunan Anggaran Negara ... ditudjukan untuk mendjamin terlaksananja kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana" (fasal 31). Prinsip² ini berarti bahwa Anggaran Belandja harus benar² di-Manipolkan atau di-Dekonkan. Pokok-pangkal dalam menetapkan anggaran harus terletak pada tingkat pembangunan yang perlu ditjapai dengan memperhitungkan kemungkinan² setjara realistis, dan kemudian anggaran pendapatan disesuaikan dengan pokok itu. Disamping itu, anggaran rutine yang pada saat ini dipisahkan dari anggaran pembangunan harus diabdikan kepada anggaran pembangunan itu, dan tidak sebaliknya, jaitu anggaran rutine mendjadi pokok dan anggaran pembangunan hanya memperoleh sisa² sadja atau mendjadi émbél² sadja.

Dalam menetapkan usaha² pembangunan yang perlu diberikan prioritas, disamping prioritas² utama yang diberikan kepada kebidjaksanaan djangka pendek seperti ditetapkan dalam Dekon, maka Dekon memperkuat memorandum MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 mengenai hal tersebut. Skema prioritas MPRS memberi prioritas setjara umum kepada usaha² yang pasti akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnja ditetapkan bahwa projek² yang akan mengatasi kemerosotan ekonomi dan keuangan, terutama projek² sandangpangan harus dilaksanakan, dan djuga projek untuk perkembangan industri yang sudah committed. Disamping itu diberi prioritas pula kepada semua projek dasar untuk perkembangan faktor produksi tenaga kerdja serta kepada projek² infrastruktur yang sudah committed dan yang diperlukan untuk mensukseskan projek² lain yang diberi prioritas. Selanjutnja MPRS telah menekankan bahwa projek² B, jaitu projek² yang harus mendjadi sumber

pembinaan, harus dieruskan, dengan tidak membatasi proyek² itu kepada 8 jenis proyek yang khusus disebut dalam Pola Pembangunan Semesta. Tekanan pada saat ini harus diberikan kepada quickyielding projects, yaitu proyek² yang bisa menambah pendapatan nasional dalam waktu yang pendek.

e) PRODUCTION-SHARING DAN KREDIT LUARNEGERI

Deklarasi Ekonomi, dalam menjebut kemungkinan untuk mendjalankan "production-sharing", mengulangi kembali prinsip² yang terpenting, yaitu bahwa production-sharing *„pada hakekatnja merupakan kredit dari luarnegeri untuk melaksanakn sesuatu projek, yang akan dibayar dengan sebagian dari hasil yang diperoleh projek tersebut: milik dan pimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia”* (fasal 23).

Sedangkan mengenai kredit luarnegeri, Dekon menjatakan bahwa: *Pembiajan untuk mensukseskan politik ekonomi jangka pendek tersebut diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut: (a) dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestik) kita sendiri; (b) bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjarikan kredit luarnegeri, dengan sjarat² sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II, tahun 1960”* (lihat fasal 32).

Prinsip² production-sharing sudah ditetapkan setjara tegas didalam „Pernyataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pindjaman atau kredit atas dasar Production-Sharing” tertanggal 3 Agustus 1962. Pernyataan itu dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II tahun 1960. Djadi, sudah sangat djelas bahwa production-sharing merupakan *kredit atau pindjaman* dimana kechususannja terletak dalam tjara membayar kembali kredit yang bersangkutan, yaitu dari hasil produksi projek yang bersangkutan. Ia sama sekali tidak boleh diartikan atau dipraktekkan sebagai *penanaman modal asing* dalam berbagai bentuk dimana pihak yang menanam modalnja bisa setjara diam² main dibelakang lajar pimpinan atau management nasional dan malahan merasa lebih aman karena „sifat nasionalnja” projek bersangkutan memberi perlindungan terha-

dap „bahaja²” akan terdjadinja nasionalisasi atau pengambilalihan yang selalu begitu ditakuti oleh modal monopoli asing.

Usaha² untuk mensalahtafsirkan prinsip² production-sharing sebagai penanaman modal asing bukanlah suatu fantasi atau kechawatiran yang tak beralasan. Djika kita membatja "Humphrey Report" yang terkenal itu maka ternyata bahwa djustru inilah yang mendjadi pegangan kaum imperialis AS serta kalangan² tertentu dinegeri kita yang ternyata telah memberikan pendjelasan² yang sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa: *„Penanaman modal asing diterima (maksudnja, oleh Indonesia) dalam bentuk persetujuan² production-sharing atau kontrak² dengan perusahaan² lokal, baik milik pemerintah ataupun swasta”*. ("Humphrey Report"). Sedangkan yang dengan tegas ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia ialah, bahwa „pemilikan harus ditangan Indonesia” dijatakan didalam "Humphrey Report" sebagai *„dilution of ownership”* atau *„pemilikan tjampuran”*. Demikianlah pengertian AS tentang production-sharing. Demikianlah bahajanja djika persetujuan² production-sharing mau diadakan dengan modal AS ataupun modal dari lain² negara kapitalis!

Dengan adanya Dekon yang mempertegas kembali bahwa hanjalah kredit² luarnegeri yang dapat diterima, maka mendjadi lebih mendesak lagi supaya Undang² Penanaman Modal Asing tahun 1958 segera dibatalkan sesuai dengan tuntutan² Rakjat. Pembatalan Undang² tersebut sangat dibutuhkan untuk menutupi setiap kemungkinan atau landasan legal bagi kaum reaksi dalam negeri dan kaum imperialis diluarnegeri untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk production-sharing.

Penetapan prinsip² production-sharing memang merupakan suatu kemenangan bagi Rakjat Indonesia, dan tidak boleh terdjadi bahwa setjara diam², prinsip² itu disalahgunakan sehingga djustru memungkinkan sesuatu yang paling ditentang, yaitu penanaman modal asing. Baru² ini oleh Pemerintah diumumkan bahwa suatu kontrak telah ditandatangani dengan modal Cathay di Hongkong untuk melaksanakan projek² berdasarkan production-sharing dalam bidang usaha² yang sangat luas. Berita itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertama-tama, apakah benar bahwa projek² yang bersangkutan memang masuk dalam prioritas² seperti

jang telah ditetapkan oleh MPRS? Apakah benar bahwa seandainya projek² itu memang bersifat prioritas, ia tidak dapat dibiayai dengan "funds and forces" nasional dan domestik? Bagaimana sjarat² daripada kredit itu? Apakah sjarat² itu benar² mendjamin bahwa pemilikan dan pimpinan berada ditangan Indonesia?

Timbulnja ke-ragu²an ini memang wajar, karena kaum kapitalis di-negara² asing memperlihatkan reaksi jang begitu antusias mengenai production-sharing. Malahan pernah dirumuskan oleh Ketua Panitia Production-Sharing bahwa tak kurang dari 20 negara telah menunjukkan perhatiannya terhadap production-sharing. Prinsip² production-sharing memang baik dan pada pokoknja sesuai dengan pendirian Rakjat Indonesia dalam hal kredit luarnegeri. Tetapi kita tidak boleh terlalu naif dalam hal ini. Kita tidak boleh melupakan bahwa prinsip² jang baik itu bisa dipergunakan untuk memberi kepada modal monopoli asing suatu kemungkinan untuk menguasai salahsatu bahan eksport kita dan untuk menguasai pimpinanja walaupun jang resmi menduduki posisi pimpinan adalah orang² kulit sawomatang.

Karena prinsip production-sharing berarti bahwa pinjaman dibayar kembali dari hasil² projek jang bersangkutan, dapat diduga bahwa „sipemberi-kredit“ akan berusaha keras untuk memperoleh posisi jang berpengaruh dalam projek itu dengan dalih untuk mendjamin bahwa modalnja benar² dibayar kembali. Tuntutan sematjam ini merupakan tanda tidak pertjaja kepada fihak Indonesia, oleh karena itu harus ditolak sebagai sesuatu jang bertentangan dengan prinsip production-sharing.

Saja berpendapat bahwa satu²nja djalan untuk menjegah kemungkinan pensalahgunaan production-sharing ialah dengan menempatkan semua persetujuan mengenai hal jang demikian dalam tangan Dewan Kredit Luarnegeri, dimana Pemerintah serta pimpinan lembaga² negara, chususnja DPRGR, MPRS dan Depernas, harus diikutsertakan, dan dengan Nasakom sebagai porosnja. Dewan tersebut perlu diberi wewenang mengenai semua hal jang bersangkutan dengan kredit luarnegeri, chususnja untuk menetapkan apakah sesuatu kredit memang dibutuhkan dan apakah sjarat²nja sesuai dengan prinsip² jang telah ditetapkan oleh Dekon.

Dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai persetujuan² baru dibidang kredit, Dewan Kredit Luarnegeri harus melihat bukan hanya bahwa kredit jang bersangkutan benar² dibutuhkan karena "funds and forces" didalamnegeri tidak tersedia, tetapi harus djuga mendjamin supaya persetujuan² kredit jang telah ditandatangani sudah dipergunakan sebelum mulai mengadakan persetujuan² kredit baru. Dapat diketahui, misalnja, bahwa berbagai kesibukan sedang didjalankan untuk mengadakan kontrak² baru dengan negara² Barat sedangkan masih ada persetujuan kredit jang ditandatangani dengan negara² Sosialis jang belum dipergunakan samasekali atau jang hanya sebagian digunakan. Terajata misalnja bahwa instansi² Pemerintah tertentu „kurang antusias“ terhadap kredit dari negara² Sosialis dengan memberikan segala matjam alasan, seperti dalih bahwa harganja terlalu tinggi, barang²nja belum dikenal dsb, sedangkan alasan jang sebenarnya tak lain dan tak bukan ialah karena adanja kepentingan jang sudah bertjokol alias "vested interest" dan komisi² jang menarik dari kredit² jang diperoleh dari negara² imperialis. Dewan tersebut harus mendjaga supaya politik luarnegeri jang bebas dan aktif benar² dilaksanakan dibidang kredit. Djangan sampai, terhadap negara² Sosialis dituntut segala matjam kelonggaran seperti penundaan pembayaran pertama dan lain sebagainya, sedangkan terhadap negara seperti Djerman Barat, misalnja, jang *nota bene* memindjamkan kredit dengan bunga 5-6% jaitu djauh lebih tinggi daripada apa jang diminta oleh negara² Sosialis, jaitu 2-2½%, Pemerintah bersedia menerima sjarat² pembayaran kembali jang djauh lebih berat.

Kredit luarnegeri menjangkut satu segi jang sangat erat hubungannya dengan usaha² untuk menjusun suatu ekonomi nasional jang benar² merdeka atau bersih dari sisa² imperialisme. Kredit luarnegeri merupakan bidang dimana semangat patriotisme harus didjundjungtinggi dan pelaksanaan prinsip² MPRS serta Dekon harus benar² diawasi.

Dalam hubungan dengan persoalan ini, dan chususnja bahajanja modal asing akan menjusup kedalam ekonomi kita, perlu saja menjebut pula Bank Pembangunan Swasta. Mengenai hal ini, Dekon menjatakan: „Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan

dan penjempurnaan pada lembaga⁹ keuangan, *chususnja Bank² Pembangunan Daerah dan Swasta*". (fasal 34). Sikap hati² ini, jang menekankan pada perlunya perbaikan dan penjempurnaan adalah tepat, djika kita mengingat bahwa pihak modal asing jang, bagaimanapun djuga mereka berusaha untuk setjara tjerdik menjalahgunakan production-sharing, tentu lebih senang dengan tjara² penanaman modal jang klasik dan terbuka, menaruh perhatian dan harapan besar kepada adanja Bank Pembangunan Swasta dan djuga bank² pembangunan daerah. Bank² itu mendapat perhatian khusus didalam "Humphrey Report" karena menurut ahli² ekonomi jang menjusun laporan itu, *„modal swasta belum tjukup efektif dikerahkan sebagai salahsatu sumber jang terpenting*". Modal monopoli AS ternyata sudah siap sedia untuk mempergunakan sumber atau saluran ini setjara „se-efektif²nja". Bahaja ini memperkuat kekuatan jang dikemukakan oleh fraksi PKI didalam DPRGR sewaktu Undang² Bank Pembangunan Swasta dibahas, jaitu tentang adanja bahaja modal imperialis merembes kedalam Bank itu. Lewat Bank Pembangunan Swasta kaum imperialis berusaha mendjadikan kaum swasta sebagai saluran penetrasi modalnja dan dengan demikian memperkuat barisan kapitalis komprador dan kapitalis birokrat. Ini merupakan landasan utama bagi politik reaksioner kaum imperialis.

Memang, ketjuali mereka jang sangat naif, saja rasa tidak ada orang jang tidak mengerti bahwa tudjuan jang sebenarnja daripada modal monopoli imperialis ialah djustru untuk menghidupkan sektor modal swasta sebagai sektor memimpin dan untuk mematikan sektor negara. Sikap ini dengan sangat tegas dinjatakan dalam laporan Djenderal Clay mengenai „bantuan ekonomi" AS, jang dikeluarkan dalam bulan Maret jbl. Dalam laporan itu, dikatakan sebagai berikut: *„Kami berpendapat bahwa AS tidak dapat membantu sesuatu pemerintah asing dalam projek² untuk mendirikan perusahaan-perusahaan industri atau dagang jang dimiliki pemerintah untuk bersaing dengan perusahaan² swasta*" (lihat *Newsweek*, tanggal 8 April, 1963, hal. 42). Mungkin ada jang merasa kutipan ini sebenarnja kurang berguna karena toh hanja merupakan nasehat kepada Pemerintah AS, sedangkan jang penting ialah sikap resmi pemerintah Kennedy. Dalam mendjawab

ke-ragu²an ini, perlu saja djelaskan bahwa Kennedy tentunja tidak akan mengangkat seorang penasehat jang tidak mewakili pendirian Kennedy sendiri. Disamping itu tidak lain daripada Kennedy sendiri jang sudah memberikan suatu reaksi mengenai Laporan Clay dengan mengatakan bahwa Laporan itu adalah *„sangat membesarkan hati"* atau *„most heartening"* (lihat *Newsweek*, tanggal 8 April, 1963, hal. 42).

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Demikian ulasan saja tentang Deklarasi Ekonomi dan sjarat² pelaksanaannya. Berdasarkan fikiran² yang telah saja adjukan diatas, maka dapat kita menarik beberapa kesimpulan sbb. :

Penjusunan Dekon merupakan hasil penting daripada perdjjuangan Rakjat untuk memenangkan gagasan² yang benar dalam menetapkan susunan ekonomi yang harus kita bangun pada tahap pertama Revolusi serta dalam menetapkan tjara² yang tepat guna mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Perdjjuangan itu sekarang harus dilandjutkan untuk mentjapai kemenangan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya penjusunan Dekon hanya bisa ditjapai dengan melalui perdjjuangan Rakjat, maka pelaksanaannya djuga tergantung pada perdjjuangan Rakjat. Dalam hal ini, Front Nasional dengan Pantja Program Front Nasional dapat memainkan peranan yang menentukan.

Hal² yang perlu diperdjjuangkan dalam usaha² memenangkan pelaksanaan Dekon adalah sbb. :

Pertama : untuk mentjapai peng-integrasian antara Pemerintah dengan Rakjat haruslah dilaksanakan rituling disegala bidang dari Pusat sampai ke-Daerah², terutama harus dibentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM. Ini akan membuka kemungkinan seluruh aparat pemerintahan diisi dengan orang² yang bersedia mendjalankan prinsip² Dekon setjara konsekwen, yang bersedia mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa², jaitu kaum tuan-tanah, komprador dan kapitalis birokrat, serta membela kepentingan² Rakjat. Orang² yang melawan atau sabot pelaksanaan Dekon harus dituntut supaya disingkirkan.

Kedua : untuk memenangkan tafsiran² yang tepat mengenai prinsip² Dekon haruslah dilawan tiap² usaha untuk memutarbalikkan prinsip² Dekon dan melaksanakan tindakan² anti-Dekon „atas nama Dekon”.

Ketiga : untuk mengadakan tindakan² yang sesuai dengan prinsip² Dekon dengan tudjuan pokok mening-

katkan produksi, harus diadakan perlawanan yang serius terhadap usaha² sabotase dibidang ekonomi. Perlu pula dilakukan perdjjuangan untuk menolak setiap tindakan yang bertentangan dengan Dekon.

Rakjat harus didjamin hak² demokrasi²nya untuk dapat melakukan perdjjuangan ini, untuk dapat melakukan People's control (pengawasan Rakjat) sebagai landasan guna mentjapai People's support (dukungan Rakjat) yang seluas mungkin bagi setiap usaha dibidang ekonomi. Djika ini tertjapai, maka akan berarti bahwa massa Rakjat bukan hanya ikut langsung dalam menentukan politik ekonomi, jaitu ikut menentukan penjusunan Dekon, melainkan pula turut aktif melaksanakan dan bertanggungjawab atas djalannya politik ekonomi tersebut. Tanpa ini, adalah tidak mungkin untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis, ekonomi progresif.

(Tjeramah dihadapan Himpunan Sarjana Indonesia [HSI], tgl. 11 Mei 1968 di Aula Universitas Indonesia)

DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!

Pertama-tama izinkanlah saja mengutjapkan terimakasih se-besar²nja kepada pimpinan *Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia* jang telah mengundang saja untuk memberikan tjeramah tentang Deklarasi Ekonomi. Saja menjambut kesempatan ini, kesempatan untuk mengemukakan fikiran² serta pendapat² kami, kaum Komunis Indonesia, mengenai soal² hangat dinegeri kita. Kenyataan ini sekali lagi membuktikan betapa sudah mendalamnja pengertian masyarakat terhadap kedudukan partai² politik sehingga makin seringlah musjawarah², seminar² ataupun diskusi² besar, baik jang resmi maupun jang tidak, jang mengadjak partai² NASAKOM untuk menguraikan pendapat-pendapat mereka.

Dari kenyataan ini saja mendapat kesan betapa sudah dirasakan, bahwa suatu musjawarah, seminar atau diskusi besar belum lengkap dan belum memuaskan kalau Nasakom belum diikutsertakan dan didengar. Ini merupakan perwujudan jang nyata daripada perasaan kegotongrojongan nasional kita.

Mungkin akan ada jang mengira bahwa dalam menghadapi permintaan² jang begitu banjak untuk mengadakan tjeramah, saja hanja tinggal mengulangi apa jang pernah saja katakan dalam tjeramah² sebelumnya. Tidaklah demikian, Sdr.² Perkembangan keadaan dinegeri kita berdjalan begitu tjepatnja sehingga setiap waktu, biarpun hanja selisih satu minggu, tentu ada soal² baru jang harus dibahas atau pendapat² baru jang kurang tepat jang harus dilempangkan. Saja benar² merasakan, bahwa setiap kali menghadapi tugas memberi tjeramah, tentu persoalan jang diminta kepada saja untuk dibahas harus ditindjau dari segi² jang baru, berdasarkan perkembangan² baru. Djadi bagi saja sendiri, disamping harus bekerdja keras, ini djuga merupakan kesempatan

jang baik untuk terus-menerus mengadjukan sikap tentang hal² jang baru timbul. Maka dari itu saja benar² merasa berterimakasih pada setiap kesempatan jang sedemikian ini.

PERSOALAN POLITIK BERESKAN DULU!

Saudara² sedang melangsungkan suatu Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi. Memang sudah sewajarnjalah kalau kaum veteran, seperti halnja golongan² Rakjat lainnja, mentjurahkan penhatiannja setjara intensif kepada persoalan keuangan dan ekonomi.

Persoalan keuangan dan ekonomi adalah persoalan pokok jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada saat ini. Kalau saja katakan bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan pokok, ini tidak berarti bahwa persoalan politik mendjadi tidak pokok. Djustru dengan menganggap persoalan ekonomi sebagai persoalan pokok, kita akan senantiasa berhadapan dengan persoalan politik, baik politik dalam maupun luarnegeri. Djadi persoalan ekonomi membikin kita berhadapan setjara langsung dan setjara mendesak dengan persoalan politik dalam arti bahwa soal² ekonomi hanja akan bisa diatasi djika soal politik dibereskan lebih dulu. Bangunan politik harus sesuai dengan susunan ekonomi jang mau kita dirikan. Setiap diskusi tentang persoalan² ekonomi harus berdasarkan sikap ini.

Saja ingin memberikan suatu tjontoh. Kaum imperialis Amerika Serikat melalui pers mereka sering melantjarkan tuduhan² kealamat Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa beliau sengadja mengobar-ngobarkan perasaan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo-kolonialisme Malaysia dan sebagainya dengan maksud untuk menutupi kesulitan² ekonomi didalamnegeri, artinja dengan maksud untuk membelokkan perhatian Rakjat dari kesulitan² didalamnegeri. Dengan demikian Presiden Sukarno „mengurangi oposisi“, demikian katanja. Ini adalah suatu pemutarbalikan jang sangat kasar. Sikap anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo-kolonialisme merupakan sjarat² mutlak djika kita ingin mengatasi kesulitan² ekonomi didalamnegeri dan ingin membangun ekonomi jang bersih dari imperialisme. Selama kita tetap berpegang teguh pada sikap² ini, maka ada djaminan bahwa kesulitan² ekonomi didalamnegeri

akan teratasi dengan tjara jang sesuai dengan kepentingan-kepentingan Rakjat dan dalam semangat patriotisme jang se-tinggi²nja. Tetapi begitu ada ke-ragu²an dalam sikap anti-imperialis, apalagi menghentikan sikap jang demikian untuk mulai main mata dengan imperialis atau mulai memberi konsesi² kepada mereka, maka pada saat itu timbullah bahaya bahwa kesulitan² ekonomi takkan dapat diatasi, atau dapat „diatasi” menurut tjara imperialis, jaitu membuka se-lebar²nja pintu penetrasi ekonomi oleh kaum imperialis.

Memang tuduhan² kaum imperialis jang sedemikian itu mempunyai maksud jang djelas, jaitu untuk membelokkan perhatian kita dari persoalan melawan imperialisme, supaya kita tidak melawan dan menjerah kepada imperialisme dan dengan demikian kaum imperialis bisa memenangkan konsepsi²nja dibidang ekonomi. Oleh karena itu, semakin memuntjak kesulitan² ekonomi, maka sikap anti-imperialis kita harus mendjadi semakin tajam. Kita harus waspada terhadap mereka jang menginginkan sebaliknya.

DEKON MELIPUTI 3 SOAL POKOK

Sdr.² telah meminta kepada saja untuk berbitjara mengenai Dekon, jaitu dokumen bersedjarah jang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret jl. dan jang oleh Sidang Umum MPRS jang ke-II dalam bulan Mei jbl, telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan garis² besar haluan pembangunan dibidang ekonomi. Dekon adalah sendjata penting disamping Manipol dalam perjuangangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan tahap pertama daripada revolusinja. Dekon djuga merupakan sendjata penting bagi perjuangangan Rakjat Indonesia untuk mengatasi kesulitan² ekonomi jang makin hari makin memuntjak.

Dekon meliputi tiga soal pokok jang sangat penting. *Pertama*, Dekon menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia pada tahap revolusi sekarang ini, jaitu tahap revolusi nasional dan demokratis dimana jang mendjadi tugas pokoknja ialah membersihkan atau mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme. *Kedua*, Dekon menggariskan kebidjaksanaan djangka pendek jang harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. *Ketiga*, Dekon menetapkan sjarat²

politik jang mutlak perlu bagi pelaksanaan Dekon itu sendiri, jaitu tertjapainja kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom melalui pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi baik dalam bidang administratif maupun eksekutif, atau dengan kata² lain pembentukan Pemerintah Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Tiga pokok ini membikin Dekon mendjadi sebuah program jang dalam dasar²nja boleh dikatakan membahas persoalan ekonomi dalam keseluruhannja. Strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan jang tak terpisah-pisahkan. Strategi dasar hanya bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek. Pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek harus sepenuhnya didasarkan pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme sesuai dengan strategi dasar ekonomi. Sedangkan sjarat mutlak untuk mendjamin supaya strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek dapat dilaksanakan benar² sebagai satu kesatuan adalah pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi dibidang administratif dan eksekutif.

RESOLUSI MPRS WADJIB DILAKSANAKAN

Disamping Dekon kita sekarang djuga sudah mempunyai dokumen penting lain, jaitu Resolusi MPRS No. I/1963 jang menetapkan berbagai prinsip tentang pelaksanaan pembangunan disetiap lapangan. Resolusi MPRS ini sangat penting karena ia disusun oleh lembaga negara jang tertinggi dimana diwakili segenap lapisan Rakjat jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional. Resolusi MPRS adalah sangat penting karena ia disusun berdasarkan pembahasan jang benar² menje-luruh daripada berbagai dokumen penting jang merumuskan *pengalaman²* pembangunan, jaitu (1) amanat Presiden Sukarno „Ambeg Parama-Arta” tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, tahun 1960; (2) kesimpulan Sidang Pimpinan MPRS tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana; (3) memorandum Pimpinan MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 tentang prioritas² pembangunan; dan (4) intisari hasil karya panitia² MPRS Daswati I. Djadi, Resolusi MPRS itu didasarkan pada bahan² jang

lengkap tentang *pengalaman* sehingga dapat melem-
pangkan kesalahan² yang telah timbul dalam pelaksana-
an Pola Pembangunan dan dapat juga menekankan
prinsip² yang harus dipegang teguh dalam menghadapi
berbagai soal pada saat ini. Resolusi MPRS itu perlu
sekali dipelajari dengan se-baik²nja dalam hubungan
dengan pelaksanaan Dekon.

Saja menekankan pentingnja Resolusi MPRS ini
sebab njatanja ada fikiran pada sementara orang bahwa
Resolusi MPRS bisa dianggap sepi, diremehkan, tidak
didjalankan atau malahan dilanggar. Sikap atau per-
buatan yang demikian adalah samasekali bertentangan
dengan Undang² Dasar 1945, dimana dinjatakan baha-
wa: *„Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilaku-
kan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rak-
jat“*. (Fasal 1, ayat 2), dan djuga bahwa: *„Madjelis
Permusjawaratan Rakjat menetapkan undang² dasar
dan garis² besar daripada haluan negara“* (Fasal 3).
Selama belum ada MPR, MPRS ditetapkan sepenuhnya
mendjalankan kedaulatan Rakjat dan oleh karena itu
Rakjat harus berdjuaug supaya Ketetapan² serta Reso-
lusi MPRS benar² didjalankan. Tugas ini sepenuhnya
sedjalan dengan tugas memperdjuaugkan pelaksanaan
sungguh² daripada Dekon itu sendiri.

Memang sudah menjadi kenjataan dinegeri kita,
bahwa belum tjukup memperdjuaugkan supaya politik²
yang baik diterima sebagai politik resmi. Setelah politik²
yang baik itu diterima maka harus pula dilakukan per-
djuaugan sengit supaya dilaksanakan.

SEKTOR KOPERASI DAN SWASTA HARUS ANTI- IMPERIALIS DAN ANTI-FEODAL

Musjawarah yang sedang diadakan oleh Saudara² ini
tentu dimaksudkan bukan hanya untuk meninjau se-
tjara umum keadaan ekonomi dan keuangan, tetapi di-
samping itu djuga berusaha agar kaum veteran sendiri
bisa memegang peranan, bisa mendapat tempat yang
wajar, bisa mentjuraikan "funds and forces"-nja da-
lam pekerdjaan besar yang dihadapi oleh Rakjat Indo-
nesia pada waktu ini. Kaum Komunis Indonesia me-
njambut dengan hangat usaha² yang demikian karena
kita memang sangat menginginkan supaya segenap
"funds and forces" nasional dan domestik dihimpun dan

dikerahkan. Dalam Dekon ditegaskan, bahwa *„Dalam
perdjuaugan untuk menjelesaikan tahap nasional dan
demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk me-
ngerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah
maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan do-
mestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan
untuk meningkatkan produksi dan menambahkan peng-
hasilan Negara“*. (Deklarasi Ekonomi, fasal 5).

Ada fihak yang sengadja ingin menimbulkan kesan
se-akan² kaum Komunis memusuhi swasta, dan se-akan²
kaum Komunis hanya menjetudjui adanja ekonomi sek-
tor negara dan koperasi. Fitnahan demikian memang
dimaksudkan untuk memetjah-belah potensi nasional
kita supaya kemudian masing² potensi bisa dikuasai oleh
kaum imperialis. Menurut PKI, seperti halnja dibidang
politik dibutuhkan penghimpunan segenap potensi na-
sional yang anti-imperialis dan anti-feodal yang diwu-
djudkan dalam bentuk kegotongrojongan nasional ber-
poroskan NASAKOM, demikian pula segenap potensi
nasional dibidang ekonomi yang anti-imperialis dan anti-
feodal harus dihimpun. Tugas untuk menghimpun po-
tensi dibidang politik dan dibidang ekonomi ini, harus
kita kerdjakan sekaligus demi menjelesaikan tahap re-
volusi sekarang ini dimana seperti dikatakan dalam
Dekon: *„kita harus mentjiptakan susunan ekonomi yang
bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa²
imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme“*. (Dekon,
fasal 3).

Sikap PKI ini bukanlah sikap baru yang tjepat² di-
tetapkan untuk menjesuaikan diri dengan alam Manipol
atau alam Dekon. Sikap ini adalah sikap sedjak lama,
seperti dapat Sdr.² lihat sendiri didalam Program
Umum PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V
yang diadakan dalam tahun 1954 dan yang kemudian
diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959)
dengan kalimat sbb.:

*„Ekonomi Indonesia, disamping mengutamakan eko-
nomi sektor negara yang memimpin, tidak seharusnya
menentang industri dan perdagangan yang diselengga-
rakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus
dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis
dan feodal. . . . Proteksi dan fasilitas harus diberikan
kepada kapitalis² nasional, terutama industrialis² nasio-*

nal, untuk berkembang dalam batas² yang tidak dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, dan disamping itu ekonomi individuil Rakyat pekerdja harus dibantu".

Tetapi tidaklah tjukup djika kita hanya menekankan perlunya ada tiga potensi (ekonomi sektor negara, koperasi dan swasta). Harus pula diingat perspektif Revolusi Indonesia, jaitu Sosialisme Indonesia. Adanja Sosialisme sebagai perspektif mempunyai konsekwensi yang sangat penting bagi potensi² swasta dan koperasi. Adanja Sosialisme sebagai perspektif revolusi berarti bahwa potensi swasta tidak boleh berkembang sedemikian rupa sehingga dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, karena djika ini terdjadi maka perspektif revolusi akan berubah menjadi kapitalisme. Sektor swasta tidak boleh berkembang setjara „liberal", setjara sesuka-sukannya. Demikian pula, tidak boleh dibiarkan sektor koperasi menjadi tempat berkembangnja kapitalis-kapitalis haru dan untuk mematikan produsen² yang lebih lemah. Sektor koperasi djustru harus menghambat proses diferensiasi antara produsen² ketjil supaya dapat membawa mereka langsung menudju ke-koperasi² Sosialis setelah tahap pertama Revolusi kita selesai.

Sektor swasta dan sektor koperasi memegang peranan penting dalam membangun ekonomi nasional dan demokratis djustru karena mereka aktif ikutserta dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Tidak hanya itu. Sektor² koperasi dan swasta yang nasional dan progresif tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Maka dari itu, susunan ekonomi nasional dan demokratis membutuhkan sektor koperasi dan swasta, sebagaimana halnya sektor koperasi dan swasta membutuhkan susunan ekonomi yang nasional dan demokratis.

SEKTOR NEGARA HARUS MEMEGANG PIMPINAN

Diterimanja Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia, seperti yang tertjantum dalam Manipol, mempunyai konsekwensi yang sangat penting bagi ekonomi sektor negara sendiri. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, maka berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkembangkan sehingga dikemudian hari menjadi unsur Sosialis yang terpenting dalam ekonomi Indone-

sia. Sektor negara harus memegang pimpinan bukan hanya dalam politik harga atau mengurus soal² ekonomi dalam arti yang sempit, melainkan djuga dalam menjalankan politik anti-imperialis dan anti-feodal. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, unsur ekonomi yang sudah termasuk sektor negara tidak boleh di-swastakan atau „diliberalkan". Liberalisasi daripada PTT, DKA dll., dengan menjadikannja PN, artinja dengan sangat melonggarkan kontrol Pemerintah dan Parlemen terhadap perusahaan² tsb, adalah bertentangan dengan penerimaan Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia. Disamping itu, sudah tentu PN dan PDN tidak boleh dijadikan sarang² bagi perkembangan kapitalis² birokrat yang memperkaja diri dengan kekajaan negara, dan melalui kedudukan²nja sendiri ataupun kedudukan² kontjokontjonja dalam aparaturnegara akhirnya berhasil menguasai bidang² ekonomi tertentu. Sektor ekonomi negara, atau kongkritnja perusahaan² negara, tidak boleh diserahkan kepada kapitalis² birokrat untuk dijalankan sesuka hatinja. Perusahaan² negara adalah milik negara, dan dengan demikian berarti milik seluruh Rakyat. PN² itu harus dijalankan oleh negara dengan mempergunakan tenaga² yang benar² ahli, tjakap, djudjur, sungguh² dan patriotik, yang berdjawa Manipol, yang bersedia dan mampu menjalankan Dekon setjara konsekwen.

SEKTOR SWASTA STABIL DAN TEPERTJAJA DIBIDANG PRODUKSI

Bagi mereka yang ingin ikut melaksanakan Dekon dengan menjediakan diri baik sebagai potensi swasta maupun koperasi, tentu satu hal yang masih sangat perlu ditegaskan ialah mengenai bidang² ekonomi yang mana yang terbuka dan yang paling baik bagi potensi² itu. Perlu diingat bahwa salahsatu sebab terpenting mengapa sektor perusahaan swasta masih begitu lemah dinegeri kita ialah oleh karena menurut perbandingan masih terlalu banjak yang bergerak dibidang perdagangan, dan masih terlalu kurang yang bergerak dibidang industri. Kenyataan ini membikin sektor swasta lemah bukan hanya setjara ekonomis karena selalu bisa di-ombang-ambingkan oleh fluktuasi² dibidang ekspor dan impor, tetapi djuga setjara politis, jaitu sikap anti-imperialisnja dan anti-feodalisme yang tidak teguh.

Lagipula, harus kita ingat bahwa baik dalam Keputusan MPRS No. II/1960 maupun dalam Dekon ditegaskan bahwa sektor ekspor dan impor harus dikuasai dan/atau diselenggarakan seluruhnya oleh negara sehingga dengan sendirinya, akhirnya tidak akan ada tempat disitu bagi usaha swasta. Sedangkan dibidang distribusi (perdagangan etjeteran) yang harus diberi prioritas menurut Resolusi MPRS No. I/tahun 1963 (fasal 9, ayat 1) ialah koperasi.

Djadi, ditinjau dari segala segi, segi ekonomi maupun segi politik, adalah djelas kiranya bahwa sektor swasta seharusnya mentjurahkan perhatiannya kepada bidang produksi, chususnja sektor industri. Djustru disini diperlukan pengerahan funds and forces progresif se-banyaknja untuk memperkuat daja-produksi ekonomi kita dan djustru disini perusahaan² swasta bisa mendapat kedudukan yang stabil dan tepertjaja didalam tata perekonomian negeri kita.

Persoalan ini tentu akan mendapat perhatian Sdr². Untuk mewudjudkannya saja berpendapat diperlukan dua hal, jaitu: *Pertama*, pengertian dari mereka yang ingin menjumbangkan funds and forces-nya. Dan *kedua*, langkah kongkrit dari Pemerintah yang memungkinkan funds and forces itu disumbangkan se-banyaknja. Hal ini dapat ditjapai djika Resolusi MPRS No. I/1963 dilaksanakan. Disitu ditegaskan bahwa: *„Dalam mengerjakan modal dan tenaga swasta nasional dan domestik, harus ditijptakan iklim yang menarik yang mendjamin fasilitas dan keuntungan serta kepastian hukum yang mendorong investasi dibidang produksi”*. (Resolusi MPRS, No. I/1963, bab 10, ayat f). Kalau fasilitas ini tidak diberikan, maka tidaklah mungkin untuk menghimpun segenap funds and forces. Malahan yang sudah dihimpun akan atau sedang mendjadi lesu dan akhirnya mati.

PERATURAN EKONOMI 26 MEI 1963 BERTENTANGAN DENGAN DEKON

Ja, Sdr², Resolusi MPRS adalah sangat djelas dalam hal ini dan djuga dalam hal² lain. Tetapi kita menghadapi kenyataan bahwa bukan hanya Resolusi yang baik itu (yang nota bene adalah keputusan lembaga negara kita yang tertinggi) tidak dilaksanakan, tetapi malahan

sebaliknya, sudah diambil tindakan² yang djustru bertentangan dengan Resolusi itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa peraturan² ekonomi tanggal 26 Mei 1963 „mentijptakan iklim yang menarik” dan „mendorong investasi dibidang produksi”, kalau akibatnya tak lain ialah kenaikan harga barang yang keterlaluan. Harga barang² yang harus dibeli oleh industrialis serta djasa² yang mereka gunakan seperti listrik, pelajaran, keretaapi, PTT sudah atau sedang meningkat dengan sangat sebagai akibat peraturan baru dibidang impor dan harga serta sebagai akibat kenaikan² tarif. Akibatnya ialah bahwa pengusaha² yang sudah tjukup sulit memfinanciering berdasarkan peraturan² impor atau tarif² yang lama mendjadi semakin sulit. Disamping itu, barang² sandang-pangan djuga sedang meningkat dengan sangat sehingga dengan sendirinya kaum buruh memerlukan upah yang lebih besar untuk bisa hidup pada tingkat yang paling minimal. Kaum pengusaha sulit karena diantjam bahaya gulung-tikar, Kaum buruh sulit karena gadji yang sudah tidak tjukup itu mendjadi semakin tidak tjukup, dan mereka diantjam bahaya pengangguran. Seluruh ekonomi negeri mengalami kesulitan yang lebih besar, karena produksi yang sudah begitu matjet akan mendjadi semakin matjet, dan kemungkinan² untuk mengatasi inflasi mendjadi semakin djauh.

Musjawarah yang Sdr² langsung pada saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membahas Dekon bukan hanya sebagai dokumen resmi tetapi djuga dalam rangka perkembangan² yang telah terdjadi sedjak Dekon itu diutjapkan dua bulan jl. Dalam waktu akhir² ini kita banyak mendengar tentang „pelaksanaan Dekon” dengan keluarnya berbagai Peraturan Pemerintah yang katanja „untuk melaksanakan Dekon”. Tetapi kenyataannya, Dekon disambut hangat oleh Rakjat, sedangkan peraturan² pemerintah yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” itu samasekali tidak disambut, bahkan telah menimbulkan keketjawaan² dan ketjaman² Rakjat. Rakjat yang sangat menunggu pelaksanaan Dekon yang baik itu mulai mengetahui bahwa apa yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” adalah langsung bertentangan dengan Dekon.

Dengan demikian, disamping sekarang ada orang² yang Manipolis munafik atau Manipolis gadungan, se-

karang djuga sudah ada Dekonis² munafik atau Dekonis gadungan, jaitu orang² jang „ber-Dekon dalam kata² tetapi anti-Dekon dalam perbuatan”. Inilah satu²nja kwalifikasi jang paling tepat, jang harus diberikan kepada orang² jang mendjadi konseptor² atau arsitek² peraturan² tanggal 26 Mei serta tukang² menaikkan tarif jang keterlaluan itu.

Salahsatu tugas kaum revolusioner jang sangat penting pada saat ini ialah meratakan pengertian tentang perbedaan Dekon dengan peraturan² 26 Mei 1963 jang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” itu. Ini sangat perlu, karena djika perbedaan ini tidak dimengerti, maka kemarahan Rakjat terhadap peraturan² tersebut bisa berkembang mendjadi kemarahan terhadap Dekon dan selandjutnja terhadap Bung Karno. Ini tidak dapat dibiarkan, karena Dekon adalah program untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi. Melanggar Dekon sama halnja dengan menghambat atau mentjiderai tugas menjelesaikan Revolusi Indonesia.

Dekon sekarang berada dalam bahaya, seluruh potensi nasional harus dikerahkan untuk menjelamatkan Dekon! Menjelamatkan Dekon sama halnja dengan menjelamatkan Manipol, menjelamatkan Ketetapan² dan Resolusi MPRS dan menjelamatkan Revolusi Indonesia.

Dekon menetapkan prinsip² jang sangat penting dan madju, jaitu tentang perlu adanya pengerahan segenap potensi Rakjat, tentang perlu bagi negeri kita untuk berdiri diatas kaki sendiri, untuk tidak *menggantungkan diri* pada bantuan luarnegeri. Prinsip ini harus dijunjung tinggi karena prinsip ini adalah patriotik. Adalah omongkosong tugas membersihkan sisa² imperialisme akan dapat dilakukan tanpa semangat patriotik, dan lebih omongkosong lagi dengan „bantuan” kaum imperialis.

Dekon berbitjara tentang betapa pentingnja usaha² untuk *„memperbesar daja-produksi, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat dijamin bertambahnja peredaran barang didalam masyarakat sebagai imbalanced daripada beredarnya uang”*. (Dekon, fasal 30).

Dekon djuga menetapkan bahwa: *„Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh*

Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan”. (Dekon, fasal 26).

Dalam semangat jang sama pula, Dekon mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan devisen tidak mungkin diatasi dengan tindakan² moneter konvensional belaka melainkan harus diatasi dengan djalan *„menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita”*. (Dekon, fasal 13).

Peraturan² ekonomi 26 Mei jl., samasekali tidak sesuai dengan tiga prinsip Dekon jang baru saja kutip itu, jaitu *prinsip memperbesar daja-produksi, prinsip memperhatikan kepentingan Rakjat dan prinsip mengatasi inflasi dengan menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat*. Adalah tidak mungkin untuk memperbesar daja-produksi dengan djalan menaikkan harga disegala bidang. Pd. Presiden Djuanda dalam konferensi persnja mengatakan, bahwa didalam Dekon tidak ada larangan untuk menaikkan tarif. Tetapi bagaimana bisa dikatakan bahwa tindakan² menaikkan harga dan tarif itu sesuai dengan Dekon jang mengatakan bahwa tindakan Pemerintah harus *„dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan” dan bahwa tindakan² itu ditudjukan untuk mengatasi inflasi?* Djustru sebaliknya: Tindakan² itu akan lebih memerosotkan produksi dan memperhebat inflasi, dan akan dirasakan serta dimengerti oleh Rakjat bahwa *„kepentingan mereka tidak diperhatikan”*. Ini adalah njata sekali dari protes² jang membandjir dari segala pendjuru. Partai² Nasakom dan organisasi² massa revolusioner sudah dan masih terus menjatakan ketjammannya terhadap kenaikan berbagai tarif.

TINDAKAN² 26 MEI 1963 : KONVENSIONIL !

Tindakan² 26 Mei itu adalah serupa dengan tindakan² jang pernah atau malahan sering diambil dahulu, artinja *konvensional*, jaitu mengabdikan segala sesuatu pada penyelesaian ketidak-seimbangan atau disparitet jang timbul dibidang ekspor dan impor dengan perubahan² transaksi-kurs. Sedjalan dengan itu, kehidupan Rakjat mendjadi lebih berat lagi karena kenaikan² jang keterlaluan dalam pungutan² terhadap impor. *Satu²nja segi jang „non-konvensional” ialah bahwa belum pernah di-*

lakukan serangan langsung dan demikian hebatnja terhadap kehidupan Rakjat. Belum pernah Rakjat kita menghadapi kenaikan² harga dan tarif sebesar 300% atau lebih dalam satu kali pukul.

Lagipula, tindakan² menaikkan harga sangat bertentangan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 yang dengan tegas menetapkan bahwa „politik harga harus ditundukkan untuk menjegah kenaikan harga dan tarif... dan menjamin peningkatan daya-beli Rakjat pekerdja, termasuk petani-produsen”. (Resolusi MPRS No. I/1963, bab 9, ayat 7).

Kesulitan² ekonomi yang diakibatkan oleh peraturan² 26 Mei disatu pihak telah membikin Rakjat menderita, tetapi di pihak lain telah membikin Rakjat bertambah mengerti hal² ekonomi, bertambah pandai dalam menjusun konsepsi²nja sendiri, dan bertambah teguh dalam memperjuangkan konsepsi²nja itu. Kenyataan ini harus diperhatikan oleh mereka yang mendjadi konseptor² peraturan² 26 Mei dalam menghadapi bandjir protes dan tuntutan² supaya peraturan² itu ditinjau kembali untuk diganti dengan yang sesuai dengan Dekon.

Mengenai hal devaluasi, Dekon djelas se-djelas²nja mengatakan bahwa „tidak akan diambil tindakan² moneter yang drastis, seperti umpamanja devaluasi”. (Dekon, fasal 31). Baru sebulan yang lalu, sewaktu saja memberikan teramah dimuka Himpunan Sardjana Indonesia (HSI), saja telah berkata sebagai berikut: „Djangan² misalnja, devaluasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadia diadakan perubahan² dalam peraturan² ekspor dan impor dengan berbagai matjam transaksi-kurs yang pada hakekatnja tidak lain daripada devaluasi yang diselimuti”. Seperti kita sama² tahu, peraturan-peraturan 26 Mei memang setjara efektif telah mengubah kurs rupiah terhadap dolar dari Rp. 45,— mendjadi kuranglebih Rp. 450,— (djka kita menghitung setjara kasar keuntungan² rupiah dari hak retensi sebesar 5% dari penghasilan devisa ditambah hak mendapat alokasi devisa sebanjak 10% bagi exportir dan 15% bagi exportir-produsen). Dalam sistim SIVA yang baru sadja dihapuskan dan yang djuga mengandung devaluasi, kurs dasar Rp. 45,— toh masih memegang peranan tertentu. Dalam sistim baru berdasarkan Perpres no. 5/1963, boleh dikatakan kurs Rp. 45,— samasekali tidak memegang peranan lagi.

Dengan demikian, peringatan saja ternyata masih kurang kena, karena devaluasi yang telah dilakukan itu ternyata samasekali tidak diselimuti. Jang terdjadi ialah suatu devaluasi de facto dan terbuka. *Hanja sadja, nama devaluasi tidak dipakai. Itulah satu²nja konsesi kepada Dekon! Devaluasi didjalankan tetapi tidak dinamakan devaluasi!*

BAHAJA KAPITALISME BIROKRATIS SEMAKIN BESAR

Saja ingin pada kesempatan ini membahas pula peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei jbl. mengenai Perusahaan² Dagang Negara, jaitu Perpres No. 7 tahun 1963. Saja anggap peraturan itu sangat perlu diperhatikan karena menjangkut hal susunan ekonomi yang mau kita bangun dalam tahap pertama Revolusi kita, jaitu tahap nasional dan demokratis. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang yang luas kepada PDN, sehingga mereka telah ditetapkan sebagai perusahaan² komersial biasa dengan BPU-PDN² sebagai sematjam Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. PDN boleh dikatakan tidak terikat lagi pada sesuatu kebidjaksanaan resmi, dan hanya didjalankan untuk mengedjar keuntungan². Disamping itu, didalam peraturan tanggal 26 Mei tentang apa yang dinamakan „kebidjaksanaan harga” (lebih baik dinamakan „tentang tidak adanja kebidjaksanaan harga”!) setiap usaha untuk mengendalikan harga barang² yang didjual oleh Pemerintah samasekali dibatalkan. *Jang berkuasa dan memimpin didalam ekonomi kita sedjak saat itu ialah harga pasar bebas alias kaum spekulan dan tukangjtjut²*. PDN malahan diwadajibkan mendekati harga pasar dan tidak boleh mendjual dengan selisih lebih besar dari 30% dengan harga pasar bebas setempat (lokal). Dapat dibayangkan bahwa akan terdjadi kongkalikong antara tukang² salahduduk dan salahurus didalam PDN dengan kaum spekulan dan tukangjtjut² dipasar bebas untuk mendjamin terus adanja „keuntungan² luar” bagi mereka sendiri.

Saja anggap hal ini sebagai hal yang sangat penting, karena disamping mengakibatkan kerugian² yang sangat besar bagi Rakjat, ia djuga berarti melanggar prinsip yang telah lama ditekankan, jaitu tentang *peranan komando atau peranan memimpin yang harus dipegang*

oleh sektor negara. Perusahaan² yang menjadi milik negara sebagai hasil perjuangan kaum buruh dan Rakjat yang mengambilalih perusahaan². Belanda 5 tahun yang lalu, telah dijadikan perusahaan² komersial biasa yang dapat pula dibebaskan dari kewajiban menjumbang kepada Dana Pembangunan. Kredit yang begitu banyak yang mereka peroleh dari Pemerintah untuk sebagian akan dijadikan modal perusahaan.

Dengan adanya peraturan² baru tersebut kita menghadapi bahaya bahwa ekonomi akan semakin dikuasai oleh kaum kapitalis birokrat, terutama mereka yang berkali besar. Mereka akan bisa memperoleh keuntungan-keuntungannya (namanya yang resmi sekarang bukan keuntungan melainkan „perangsang“!) seperti kapitalis biasa, tetapi berbeda dengan kapitalis biasa mereka tidak mengambil risiko apapun karena modalnya seluruhnya dari Pemerintah! Itulah bedanya antara kapitalis biasa dengan kapitalis birokrat! Itulah sebabnya mengapa kaum Komunis bisa menjetudjui adanya kapitalis² atau pengusaha² nasional pada tahap revolusi nasional dan demokratis sekarang, tetapi melawan dengan keras adanya kaum kapitalis birokrat. Pantas saja, djustru suara sikapitalis birokrat yang „sok-sosialis“ adalah satu²nja suara yang menjambut baik peraturan² 26 Mei dan kenaikan tarif² sehingga menjadikan dirinja ter-tawaan seluruh Rakjat.

REVISIONISME MODERN MENIKAM „PERUT NEGARA“

Tjara² mengatur perusahaan² milik negara seperti yang kita lihat sekarang ternjata diilhami oleh apa yang sedang terdjadi di Jugoslavia. Dengan demikian revisionisme modern yang sudah lama dilawan oleh kaum Komunis dalam berbagai bentuk kongkrit, seperti misalnya kegiatan mereka mengatjau perjuangan Rakjat² Asia-Afrika melawan imperialisme, Konferensi Kolombo. Konferensi Buruh Asia-Afrika dan lain² sebagainya, ternjata sudah mendjalar sehingga menjadi persoalan kongkrit bagi Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan susunan ekonomi yang mau dibangun. *Revisionisme modern telah menikam „perut negara“ atau perekonomian negara Republik Indonesia.*

Walaupun kita di Indonesia sekarang belum menghadapi persoalan pembangunan Sosialisme, namun oleh

karena perspektif Revolusi Indonesia adalah Sosialisme, maka dalam membangun susunan ekonomi nasional dan demokratis kita tidak boleh melakukan hal² yang bertentangan dengan pembangunan Sosialisme.

Tjara² mengatur ekonomi sektor negara di Jugoslavia dalam kenjataanja melepaskan perusahaan² milik negara dari kebidjaksanaan negara dan dari perentjanaan sentral sehingga menimbulkan klas kapitalis yang baru dan achirnja memperhebat anarki dibidang ekonomi. Inilah yang mau dipraktekkan dengan Perpres 7/1963. Saja tidak berkeberatan orang beladjar atau mengambil tjontoh dari luar negeri, malahan ada baiknya, tetapi lakukanlah dengan kritis dan tudjukanlah untuk memperkuat Republik dan memperbaiki penghidupan Rakjat Indonesia.

DJUGA KAUM PENGUSAHA NASIONAL HARUS MELAWAN KABIR

Kapitalisme birokrat (kabir) membahayakan ekonomi sektor negara karena menghilangkan samasekali sifat²-nja yang progresif. Ia membahayakan bagi kaum buruh karena penghisapan terhadap buruh ditutupi dengan kata² yang muluk² mengenai „kerjasama“ antara pimpinan dan buruh sebagai „karyawan“. Ia membahayakan bagi kaum tani karena persekutuannya dengan kaum tuantanah di-desa² yang berkepentingan untuk meneruskan penghisapan terhadap kaum tani. Tetapi tidak hanya itu. Kapitalisme birokratis djuga membahayakan bagi pengusaha² nasional, bagi sektor ekonomi swasta progresif, karena tjara²nja yang berdasarkan pensalahgunaan wewenang, tjatut, korupsi dan sebagainya. Di-mana² kaum pengusaha nasional menghadapi rintangan² yang mudah disingkirkan kalau „semir²“nja tjukup. Untuk dapat izin perusahaan, harus ada „semir“. Untuk membeli bahan bangunan perusahaan harus ada „semir“. Untuk dapat alokasi bahan², harus ada „semir“. Dan banyak lagi matjam² „semir“.

Dimana ada tjatut, korupsi, spekulasi, salahurus dan tjara² lain yang menjadi kelaziman kaum kapitalis birokrat, disitu tidak mungkin bagi pengusaha nasional untuk berkembang dengan sehat. Resolusi MPRS mengharuskan adanya fasilitas² bagi perusahaan² nasional, tetapi kapitalisme birokratis bukan hanya tidak memberikan fasilitas tetapi malahan menambah rintangan².

Lagipula, kapitalisme birokratis djuga bersekutu dengan kaum imperialis jang memang sengadja berusaha mendorong kapitalisme birokratis itu untuk menjele-wengkan kita dari ril jang benar jang menudju kearah ekonomi nasional dan demokratis, dengan Sosialisme Indonesia sebagai perspektifnja.

Oleh karena itu, kapitalisme birokratis dan pemberan-tasannja merupakan soal besar bagi seluruh Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusinja. Djuga kaum pengusaha jang sungguh² nasional harus ambilbagian dalam perdjjuangan jang besar ini, perdjjuangan melawan kaum kabir (kapitalis birokrat).

Demikianlah, Sdr.² hal² jang ingin saja sampaikan dalam tjeramah ini. Sekali lagi, saja mengutjapkan ban-jak-banjak terimakasih kepada Sdr.² jang mengundang saja untuk berbitjara disini atasnama PKI sebagai salah-satu partai Nasakom.

Mudah²an Musjawarah jang sedang Sdr.² langsung-kan ini akan mentjapai sukses se-besar²nja. Sukses bagi kaum veteran sendiri dalam memberi sumbangannja ke-pada pekerdjaan besar jang sedang dihadapi oleh negeri kita, maupun bagi seluruh Rakjat dalam lebih memper-kuat tekad untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini, untuk menjelamatkan Dekon dan menjelesaikan revolusi kita dibidang ekonomi.

Hanja dengan demikian tanahair kita bisa mendjadi negeri jang benar² merdeka, baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi.

(Pokok² tjeramah dihadapan Musja-warah Besar Keuangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia di Taman Tjibogo, Bogor, tgl. 6 Djuni 1963)

KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!

Pertama-tama saja ingin mengutjapkan banjak terima-kasih kepada pimpinan Departemen Perburuhan, chusus-nja J.M. Menteri Perburuhan, Sdr. Ahem Erningpradja, jang telah mengundang saja untuk memberi tjeramah dihadapan pegawai² Departemen Perburuhan.

Ini bukan untuk pertama kalinja saja, sebagai Ketua Comite Central PKI, memberi tjeramah dihadapan pe-gawai² negeri atas permintaan departemen jang ber-sangkutan. Ini sudah mendjadi tradisi, ja, sudah mendjadi salahsatu tjiri kepribadian bangsa kita jang dalam segala sepaakterdjangnja mengutamakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Ini telah dimulai dalam tahun 1961 ketika saja diminta oleh Departemen Luar Negeri untuk memberi tjeramah dimuka Konfe-rensi Diplomat² RI di Asia, Afrika dan Australia. Tje-ramah itu kemudian disusul dengan seri tjeramah tentang Marxisme, jang saja berikan dimuka Latihan Kemiliteran Pegawai Sivil Departemen Luar Negeri. Dan setelah itu, semakin sering permintaan kepada PKI untuk memberi tjeramah² dihadapan pegawai² dari berbagai departemen. Disamping itu banjak pula permintaan dari berbagai organisasi pemuda, sardjana, veteran, univer-sitas dll. jang semuanya dimaksudkan untuk mendengar pandangan kaum Komunis mengenai hal² jang dianggap hangat atau perlu dibahas.

Ini merupakan salahsatu bukti dari sekian banjak bukti jang ada, bahwa kehidupan kepartaian jang sehat telah berhasil melawan berbagai usaha untuk merong-rongnja dan ingin mematahkannja. Kehidupan kepartai-an jang sehat telah berkembang selama beberapa tahun ini dan telah merupakan kemenangan besar bagi Rakjat Indonesia. Tjeramah² sematjam ini ikut mengkonsolida-sikan kemenangan itu.

Saja merasa gembira dapat memberi tjeramah diha-dapan pegawai² Departemen Perburuhan. PKI adalah

Partainja klas buruh sehingga dengan sendirinja mem-
punjai hubungan jang erat sekali dengan kaum buruh
Indonesia. Djika Sdr.² sebagai petugas² jang mengurus
hal² jang berhubungan dengan kaum buruh, merasa
perlu mendengar pendapat dari Partainja klas buruh,
maka ini adalah tanda baik tentang tjara kerdja Sdr.²
sendiri. Memang ada orang jang suka „mengurusi“
kaum buruh sedangkan dia sendiri anti-buruh atau
buruh-phobi. Apa jang bisa diharapkan oleh kaum bu-
ruh dari orang² sematjam itu? Ja, apa jang dapat di-
harapkan oleh Republik kita, Republik jang ber-Pantja-
sila, ber-Manipol dan ber-NASAKOM dari orang² se-
matjam itu!

REVOLUSI DAN KAUM BURUH

Saja diminta untuk memberi tjeramah mengenai hu-
bungan kaum buruh dengan Dekon. Tema ini memang
merupakan tema jang baik sekali untuk dibahas. Dekon
adalah program untuk menyelesaikan Revolusi Indone-
sia dibidang ekonomi pada tahap pertama, jaitu tahap
nasional dan demokratis daripada revolusi kita. Kaum
buruh, seperti dikatakan didalam Manipol, merupakan
soko-guru Revolusi Indonesia, disamping kaum tani.
Dengan sendirinja, hubungannya soko-guru revolusi
atau tenaga pokok revolusi dengan program revolusi
adalah erat sekali. Pembahasan² tema ini perlu didengar
oleh siapa sadja jang sungguh² ingin menjalankan pro-
gram itu, jang sungguh² ingin menyelesaikan revolusi
kita. Samasekali tidak mungkin melaksanakan program
revolusi dengan mengabaikan kepentingan² soko-guru
revolusi, apalagi dengan ber-phobi terhadapnja. Ber-
bitjara kemak-kemik tentang Revolusi, tentang Mani-
pol, tentang Dekon dan sebagainya, sambil berbuat jang
merugikan kaum buruh atau melanggar hak² kaum buruh
adalah kemunafikan jang keterlaluan, jang tidak bisa
diampuni.

KAUM BURUH DAN DEKON

Sewaktu Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno
pada tanggal 28 Maret jhl. kaum buruh berdiri diba-
risan paling depan dalam menjambutnja. Bahkan lebih
dari itu. Djauh sebelum Dekon diumumkan, berbagai
golongan kaum buruh telah aktif membahas dan mengu-

pas kesulitan² ekonomi melalui seminar² dan diskusi²
produksi jang diadakan oleh serikatburuh². Ini semua
terdjadi terutama sedjak pidato *Tahun Kemenangan*
dimana Bung Karno telah menjatakan kesanggupan
untuk memberi perhatian khusus kepada persoalan
ekonomi.

Melalui seminar² itu, kaum buruh telah mengajukan
berbagai usul kongkrit tentang tjara² jang sebaiknja di-
tempuh untuk mengatasi kesulitan² jang timbul selama
beberapa tahun belakangan ini, seperti misalnja dibidang
pengangkutan, terutama kereta-api, dibidang perkebun-
an, dibidang pekerdjaan umum dsb. Melalui seminar²
itu, kaum buruh telah djuga mengutuk salah-urus jang
meradjalela di-mana² dan mulai menundjuk hidung
dari mereka jang bertanggungjawab. Melalui seminar²
itu, kaum buruh setjara aktif telah menegakkan pen-
dirian jang kemudian ternjata mendjadi pokok pendiri-
an didalam Dekon, jaitu bahwa *soal mempertinggi pro-
duksi merupakan kuntji dalam mengatasi kesulitan² eko-
nomi dewasa ini.*

Ini mendjadi djelas dari fasal 5 dan 6 Dekon dimana
dikatakan sebagai berikut: *„Dalam perjuangan untuk
menyelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka
sudah tibalah waktunya untuk mengerahkan segenap
potensi . . . dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan
untuk meningkatkan produksi dan menambahkan peng-
hasilan Negara. . . Karena itu, jang harus diselenggara-
kan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan
kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan
dasar² untuk industrialisasi“.*

Dengan demikian djelaslah bahwa sumbangan kaum
buruh dalam penjusunan Dekon sungguh besar. Kenja-
taan ini membuktikan betapa bohong dan keliru ang-
gapan sementara orang bahwa kaum buruh tidak tahu
apa², tidak perlu diadjak untuk mengatasi kesulitan²,
dan malahan tidak usah didengar pendapatnja. Djustru
sebaliknyaalah jang benar. Kaum buruh mengetahui ba-
njak sekali dari pengalamannya se-hari². Mereka meng-
ikuti dari dekat pengurusan didalam perusahaan dimana
mereka bekerdja dan mereka bisa setjara tadjam dan
tepat melandjangi sebab² pokok dari segala kematjet-
an. Malahan saja merasa bahwa sebab pokok mengapa
kaum buruh tidak diadjak, tidak didengar, ialah djustru
karena mereka mengetahui „terlalu banjak“ sehingga

dianggap bisa membahayakan kedudukan orang² tertentu.

Tak bisa disangkal bahwa kaum buruh dalam kerdjasama dengan para ahli dan pegawai² lainnja mampu mendobrak segala kematjetan jang timbul dibidang industri. Tentang ini sudah banjak buktinja, misalnja di-fabrik semen Gresik jang telah berhasil mentjatat kenaikan produksi jang terus-menerus sebagai akibat di-adjanknja kaum buruh serta adanja kerdjasama jang baik antara mereka dengan pimpinan management dan dengan para ahli.

Kaum buruh adalah salahsatu tenaga produktif jang pokok didalam ekonomi Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat memegang peranan jang besar sekali dalam melaksanakan Dekon chusunsja dibidang kenaikan produksi. Tanpa kaum buruh, tidak mungkin bagi negeri kita untuk mentjapai tudjuan itu.

Djika hal ini sudah disadari, maka kita menghadapi dua konsekwensi dalam pelaksanaan Dekon jang berhubungan dengan kaum buruh; *pertama*, kepentingan² mereka harus diperhatikan, jaitu seperti ditekankan didalam Dekon, dan *kedua*, kaum buruh harus diikutsertakan setjara aktif dalam pengurusan proses produksi dan bahwa mereka harus diikutsertakan setjara terorganisasi, jaitu melalui dewan² perusahaan, dewan² produksi, dewan-dewan pengangkutan, dewan² pertimbangan di-departemen² dan djawatan², dsb.

Mari kita mengupas kedua hal ini setjara lebih terperinci.

I. PERHATIAN KEPADA KEPENTINGAN² KAUM BURUH DAN RAKJAT PEKERDJA PADA UMUMNJA

Dalam menjambut hangat Dekon tempo hari, seluruh lapisan Rakjat termasuk kaum buruh memberi tekanan khusus pada hal *pelaksanaan*, karena djustru itulah jang dinanti-nantikan.

Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah mengeluarkan „peraturan² ekonomi 26 Mei 1963”, jang diktakan sebagai peraturan² „untuk melaksanakan Dekon”. Tak usah kiranja saja djelaskan disini betapa peraturan² jang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” itu telah menimbulkan protes² dan tjelaan² jang luas sekali. Ke-

naikan-kenaikan tarif dan harga jang terdjadi sedjak beberapa minggu jang lalu djuga dilakukan „atasnama Dekon”. Devaluasi didjalankan „atasnama Dekon”, walaupun semua orang tahu bahwa Dekon menolak devaluasi. Pengendalian harga dilepaskan dan anarki pasar dibiarkan berkuasa penuh, semuanya „atasnama Dekon”. Perusahaan² Dagang Negara (PDN²) diliberalisasi dan diberi fasilitas² dan perlakuan² istimewa atau privileges jang keterlaluan „atasnama Dekon”. Untung sadja, bahwa kesedaran politik Rakjat Indonesia termasuk kaum buruhnja sudah tjukup tinggi, pengalaman² serta pengetahuan ekonomi Rakjat Indonesia sudah lumajan, sehingga mereka dapat segera melihat bahwa tindakan² ini bertentangan dengan Dekon, meskipun dikatakan „atasnama” Dekon.

Dalam pernyataan jang dikeluarkan oleh Politbiro CC PKI pada tanggal 3 Djuni jbl, telah diuraikan setjara terperinci tentang pengaruh² peraturan² 26 Mei terhadap daja-beli Rakjat pekerdja. Sebagai akibat kenaikan² jang tinggi dalam pungutan² impor dan bea-masuk, harga² barang impor akan meningkat dengan melondjak-londjak. Ada barang² impor jang mengalami kenaikan sampai 700% atau 900%, termasuk barang² essensiil atau setengah essensiil, ataupun bahan² baku/penolong jang sangat diperlukan industri. Maksud Pemerintah untuk membandjiri pasaran dengan barang² impor djustru mengingatkan kita pada politik Sumitro jang djuga membuka lebar kraan impor setjara tak terbatas. Politik itu berarti meng-hambur²kan devisa negeri kita, mematikan industri nasional kita dan membikin kita semakin tergantug pada kredit luarnegeri.

TEROR KENAIKAN HARGA

Penghapusan pengendalian harga barang² sudah dan sedang membawa bentjana besar bagi Rakjat pekerdja dalam bentuk kenaikan harga. Ini betul² memberi angin kepada kaum tukang tjatut dan spekulan untuk dengan kongkalikong bersama kaum kapitalis birokrat leluasa melantjarkan teror kenaikan harga terhadap Rakjat.

Ja, demikianlah keadaan dinegeri kita pada saat ini. Disatu fihak teror dilantjarkan oleh kontra-revolusi dalam bentuk teror rasial jang sangat merusak aparat ekonomi dan penghidupan Rakjat kita. Difihak lain,

Rakyat menghadapi teror harga yang mengantjam seluruh kehidupan ekonomi. Kedua matjam teror ini merupakan antjaman besar bagi terlaksananya Dekon. Oleh karena itu, tugas untuk melawan dua matjam teror itu merupakan tugas yang mendesak bagi seluruh Rakyat Indonesia, untuk menjelaskan Dekon.

Serangan langsung terhadap kehidupan Rakyat merupakan satu hal prinsipil djika dihubungkan dengan pelaksanaan Dekon. Tidak ada gunanja untuk mengatakan, seperti dikatakan setjara resmi dalam konferensi pers Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl., bahwa Dekon tidak melarang adanya kenaikan tarif dan harga. Apalagi, bersamaan dengan itu dikatakan pula bahwa peraturan² ekonomi dan kenaikan harga serta tarif memang pahit bagi Rakyat. Apakah Dekon menjuruh membikin penghidupan Rakyat yang sudah pahit menjadi lebih pahit lagi? Saja anggap pendirian ini tidak dapat dipertahankan. Dekon menjatakan dengan tegas: „*Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran dan kesedaran ekonomi Rakyat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakyat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan*”. (Dekon, fasal 26). Perlu diperhatikan bahwa kedua perkataan „*kepentingan mereka*” digarisbawahi. Siapa yang akan dapat membantah bahwa Dekon melarang, dan melarang dengan keras, kenaikan² harga dan tarif yang keterlaluan? Siapa yang akan dapat membantah, bahwa Dekon melarang Pemerintah membikin kehidupan Rakyat bertambah pahit?

SEPENUHNJA TANGGUNGJAWAB PEMBANTU² PRESIDEN

Tetapi disamping itu, kalau kita mempeladjar pendjelasan Pemerintah tentang peraturan² 26 Mei yang dibatjakan oleh Sdr. Slamet Sutikno dalam konferensi pers tersebut, disitu dikatakan bahwa „*peraturan² dalam bidang impor (yang dimaksudkan ialah pungutan² impor yang amat tinggi itu) memang sangat dipengaruhi oleh keperluan keuangan negara*”, jaitu untuk „*mendapat penghasilan sekedarnya dari impor*”. Tentu Sdr. Slamet Sutikno sendiri tidak akan membantah bahwa yang memikul beban pungutan² impor itu tak lain tak bukan ialah Rakyat sebagai konsumen. Tetapi, apa yang dikatakan

di Dekon mengenai hal demikian? Dekon tidak ragu² sedikitpun mengatakan bahwa usaha² untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara „*harus ditjapai . . . dengan tidak menambah beban Rakyat*”. (Dekon, fasal 31). Bukankah ini larangan yang sedjelas-djelasnya terhadap apa yang disusun oleh konseptor² peraturan² 26 Mei?

Konfrontasi² sematjam ini membikin saja menjadi ragu apakah para konseptor itu pernah membuatja dan mempeladjar Dekon sehingga mengerti isinja, apalagi setjara sungguh² mau melaksanakan Dekon kita yang begitu baik itu. Saja memang gigih melawan peraturan ekonomi 26 Mei dan kenaikan harga serta tarif, karena saja sebagai anggota MPN (Musjawarah Pimpinan Negara) adalah salahseorang yang ikut aktif menjiapkan Dekon dan saja yakin bahwa Dekon dengan peraturan² tersebut ditjiderai. Selain daripada itu, dalam melawan peraturan² tersebut saja menunjukkan sasarannya, jaitu konseptor²nja. Djika tidak demikian, kemarahan Rakyat akan ditudjukan pada Dekon dan pada Presiden Sukarno. Padahal, Dekon adalah baik dan Presiden Sukarno sendiri sering berkata dengan djujur bahwa beliau „*tidak mengerti soal² ekonomi*”. *Djadi, mengenai soal² ekonomi dinegeri kita sepenuhnya tanggungjawab dari pembantu² Presiden Sukarno*. Djadi, saja bertitiktolak dari satu kejakinan yang taktergojahkan dalam melawan peraturan² tersebut.

BERTENTANGAN DENGAN RESOLUSI MPRS

Disamping itu, peraturan² tersebut bertentangan dengan Resolusi MPRS yang antara lain mengatakan bahwa „*Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menudju terlaksananya Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran B, Bab V, ayat 5, yang harus dilaksanakan setjara berentjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daja-beli Rakyat pekendja, termasuk petani produsen*”. (Resolusi MPRS No. I, 1963, fasal 9, ayat 7). Djadi, selain bertentangan dengan Resolusi MPRS, djuga bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran B, Bab V, ayat 5.

MPRS adalah lembaga negara tertinggi yang megang kedaulatan Rakyat. MPRS bukanlah suatu

debatng-club atau warung-kopi dimana anggota²nja berkumpul sekedar untuk bertukar pikiran. MPRS adalah lembaga negara yang oleh Undang² Dasar 1945 diserahkan tugas menjusun haluan Negara. Pendapat² yang terdapat dikalangan orang² yang bertanggungjawab untuk menganggap enteng MPRS, untuk samasekali tidak menggubris MPRS, sangat menusuk hati Rakjat dan berlawanan dengan Undang² Dasar.

PERATURAN 26 MEI PAHIT BAGI RAKJAT

Mungkin Sdr.² akan tertarik oleh kenyataan bahwa saja dalam membahas soal ini, banjak sekali mengutip. bahkan mungkin ada yang merasa terlalu banjak mengutip. Saja sengadja berbuat demikian, karena kalau kita mau memberitjarkan sesuatu dokumen resmi, apalagi untuk menentukan tjara² pelaksanaannya, kita harus kongkrit, kita harus terus-menerus berpegang kepada djiwa maupun kepada kata² dokumen itu. Konseptor² „peraturan² 26 Mei” selalu menekankan bahwa peraturan-peraturan itu ialah untuk „melaksanakan Dekon” tapi tidak pernah mendjelaskan fasal Dekon yang mana yang mau dilaksanakan itu. Tjara² yang demikian adalah sangat berbahaya, apalagi mengingat bahwa nama Dekon sudah demikian dikenal dinegeri kita.

Oleh karena itu, kalau berbitjara mengenai Dekon, sebagaimana djuga mengenai Manipol dan pedoman² pelaksanaannya, sebaiknya kita menggunakan kutipan². Tjara ini adalah tjara yang paling terdjamin. Djika tjara yang tepat ini ditempuh, maka mudah membuktikan setjara objektif bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei langsung bertentangan dengan Dekon, sebab Dekon bukan hanya tidak membenarkan devaluasi, liberalisasi perusahaan² negara, kenaikan² harga dan tarif, tetapi tegas² melarangnja. Demikian pula Resolusi MPRS.

Tjara kongkrit dalam membahas sesuatu adalah memang tjara kaum buruh, tjara proletar, oleh karena itu tjara inilah yang ditempuh oleh PKI.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl, antara lain dikatakan bahwa peraturan² 26 Mei 1963 adalah *pahit bagi Rakyat*. Djuga dikatakan bahwa „pembangunan semesta memang memerlukan pengorbanan yang tidak ringan”. Djadi, diusahakan untuk membenarkan kenaikan² harga dan tarif karena, katanja, kita

harus „berkorban”! Mungkin pendjelasan ini diberikan berhubung dengan fasal 26 Dekon dimana perkataan „pengorbanan” dipergunakan. Tetapi kalau kita meneliti fasal Dekon itu, mendjadi djelas bahwa maksud Dekon berlainan sekali. Sebaiknja kalau saja memberi kutipan yang setjukupnja :

„Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari Rakjat, baik dalam arti menambahkan keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunya”. (Dekon, fasal 26).

TENTANG PATRIOTISME DAN PENGORBANAN

Dari kutipan ini djelas sekali bahwa Dekon mengharuskan supaya kepentingan Rakjat diperhatikan djustru oleh karena dengan demikian perasaan patriotisme dan pengorbanan akan dapat dibangkitkan. Saja anggap sikap ini memang sangat tepat. Keharusan untuk memperhatikan kepentingan² Rakjat dengan demikian mempunyai satu tujuan nasional yang sangat penting, jaitu untuk „menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat” (Dekon, fasal 13).

Tidak ada Rakjat dimanapun didunia yang bersedia berkorban kalau mereka belum yakin bahwa kepentingan-kepentingan mereka diperhatikan. Rakjat Indonesia, termasuk kaum buruhnja tidak menolak untuk berkorban. Bahkan mereka telah lama berkorban. Setiap kemerosotan dalam penghasilan riil tak bisa diartikan lain daripada pengorbanan, dan djustru inilah nasibnja kaum buruh, pegawai dan seluruh Rakjat, pekerdja sedjak tahun 1950 dan terutama selama beberapa tahun ini.

Rakjat pekerdja memang selamanya siap untuk berkorban tapi djanganlah hendaknja hal ini disalahgunakan untuk keuntungan kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah. Jang dimaksudkan Dekon tentang pengorbanan ialah bekerdja keras untuk menaikkan produksi. Kesanggupan ini sudah djatakan dengan tegas didalam Pantja Program Front Nasional, dimana kaum buruh memegang peranan yang aktif, jaitu : „Me-

nanggulangi kesulitan² ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi". Sedangkan Pantja Program Front Nasional telah ditetapkan sebagai bagian integral pula daripada Dekon (lihat Dekon fasal 34).

Ini adalah kesanggupan berkorban yang bersifat menentukan, dan djika dipimpin dengan baik dapat membuka kemungkinan bagi negeri kita untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang meradjalela. Maka dari itu, lebih² diperlukan tindakan² dari Pemerintah yang „memperhatikan kepentingan Rakjat“, agar dengan demikian mendapat kepertajaan Rakjat. Kepertajaan Rakjat akan lenjap, djika Pemerintah mengadakan tindakan² yang djustru tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan² mereka, yang djustru bertentangan dengan Dekon.

II. PENGIKUTSERTAAN KAUM BURUH DALAM PENGURUSAN EKONOMI

Hal yang kedua yang saja sebutkan diatas yang harus didjadikan pegangan dalam melaksanakan Dekon dalam hubungannya dengan kaum buruh, ialah mengenai pengikutsertaan kaum buruh dalam mengawasi management atau pengurusan perusahaan. Hal ini ditegaskan didalam Dekon (fasal 34), dimana dikatakan supaya „diadakan penegasan tentang tugas² Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control“. Ini dikembangkan lebih lanjut didalam Resolusi MPRS No. I, 1963 dimana dikatakan sbb: „*Hak dan tugas Dewan² tersebut harus kongkrit, jaitu memusyawarahkan djatah-produksi, rehabilitasi alat² produksi, masalah² bahan baku/penolong serta spare-parts, ongkos produksi, penegakan maupun retooling organisasi, personalia dan mental, pentjegahan salah-urus/pentjolengan/manipulasi, dan lain² untuk management yang baik dan peningkatan produksi*“. (fasal 8, ayat 5).

Hal ini merupakan hal yang menentukan dalam mengatasi kesulitan² dewasa ini dan dalam mentjapai kelanjutan dalam usaha² pembangunan. Didalam Resolusinya yang telah beberapa kali saja kutip disini, MPRS menindjau sebab² dari ketidak-lantjaraan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan dengan tepat menundjukan bahwa salahsatu sebab ialah: „*Belum tjukupnja dilakukan usaha² memperhebat pengerahan segenap po-*

tensi nasional (funds and forces), terutama kaum buruh, kaum nelajan, kaum tani, dan potensi daerah sehingga terdjamin social participation, social support dan social control, untuk turut mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan“. (Resolusi MPRS No. 1, 1963, fasal 4, ayat 3h).

Tentu Sdr.² akan setuju bahwa penetapan² ini mempunjai arti yang penting terutama bagi mereka yang berkdja dibidang perburuhan. Kesulitan² dalam membentuk Dewan² Perusahaan yang, seperti pernah dikatakan oleh Bung Karno, berdjalan seperti keong, serta dalam memberikan kepadanya wewenang yang sesuai harus segera diatasi agar supaya Dekon dan Resolusi MPRS bisa dilaksanakan.

DEKON DAN RESOLUSI MPRS No. I/1963

Apa yang baru saja kutip ini, disamping mempunjai arti penting dalam rangka pembahasan tema yang menjadi pokok pemitjaraan dalam tjeramah sekarang ini, djuga merupakan tjontoh yang baik tentang hubungan erat antara Dekon dan Resolusi MPRS No. I, 1963 itu. Kedua dokumen itu memang saling melengkapi. Resolusi MPRS itu harus didjadikan pegangan dalam pelaksanaan Dekon. Resolusi MPRS itu menjuarakan kehendak Rakjat. Hanja djika suara itu didengar dan dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa yang menjadi tuanrumah dinegeri kita ialah Rakjat dan bukan elemen² yang samasekali tidak memahami kehendak Rakjat, yang samasekali menutup telinga terhadap Amanat Penderitaan Rakjat.

Dekon dan Resolusi MPRS memberi gambaran yang sungguh djelas mengenai tjara memobilisasi kaum buruh dalam mendjamin management yang baik. Ini djuga merupakan kongkritisasi dari apa yang dikatakan didalam Dekon mengenai „*pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi*“. (fasal 34), termasuk pengintegrasian kaum buruh yang terorganisasi didalam proses produksi dan management.

Dalam hubungan ini, saja ingin menjebut satu gejala yang kita hadapi sekarang dalam dunia perburuhan yang kiranya perlu mendapat perhatian setjukupnja terutama dari Sdr.² yang bertugas dibidang perburuhan.

SERIKATBURUH DAN „SERIKAT MADJIKAN“

Tak usah kiranya saja tekankan kepada Sdr.² betapa sedjak saat² permulaan gerakan kemerdekaan nasional kita, jaitu pada awal abad ini, kaum buruh melalui organisasi² mereka jaitu serikatburuh² telah memegang peranan aktif dalam melawan kolonialisme Belanda, kemudian dalam melawan pendudukan Djepang, dan kemudian dalam melawan agresi² Belanda dan membela Republik. Kisah kepahlawanan pengambilalihan perusahaan² Belanda pada akhir tahun 1957 dan permulaan tahun 1958 djuga ditulis oleh kaum buruh jang terorganisasi ber-sama² dengan Rakjat pekerdja umumnya. Dan pengambilalihan itu dengan sekaligus menumpas kekuasaan Belanda atas ekonomi kita serta memberi dasar bagi penegakan ekonomi nasional. Sedjarah memang membuktikan bahwa kaum buruh benar² merupakan soko-guru Revolusi Indonesia seperti dinjatakan didalam Manipol. Sumbangan kaum buruh sungguh besar sekali dalam menjediakan dasar² bagi pelaksanaan strategi dasar ekonomi seperti jang ditetapkan dalam Dekon, jaitu membangun susunan ekonomi jang nasional dan demokratis, jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Tetapi dalam alam Manipol dan Dekon, dimana disamping melandjutkan tradisi² anti-imperialisme jang heroik, kaum buruh djuga sanggup memberi sumbangan-nja untuk lebih memperkuat ekonomi nasional kita dengan peningkatan produksi, kita sekarang menghadapi usaha² kaum reaksioner untuk menjdirkan gerakan buruh kita. Kalangan² tertentu mau menjingkiikan perkataan buruh jang berdjalin erat dan tidak terpisahkan dengan tradisi² jang paling militant dalam gerakan kemerdekaan nasional kita. Perkataan itu mau diganti dengan karyawan jang sengadja membikin samasekali kabur garis pemisah antara peranan buruh dan peranan management. Lebih dari itu, dengan perkataan karyawan, dengan apa jang dinamakan persatuan karyawan atau organisasi² karyawan, kalangan² itu ternjata berusaha untuk mematahkan serikatburuh jang merupakan bentuk organisasi militant dari kaum buruh. Mereka berusaha mengobrak-abrik serikatburuh dengan mengintimidasi kaum buruh supaya meninggalkan serikatburuhnja dan memasuki organisasi karyawan. Dengan

demikian mereka lebih mendiskreditkan istilah „karyawan“ dimata Rakjat.

Gedjala ini telah menimbulkan reaksi jang keras dari kaum buruh sendiri jang telah memberi nama „serikat² madjikan“ kepada bentuk² organisasi² karyawan sematjam itu. „Serikat² madjikan“ adalah gedjala jang paling dikutuk dan paling dibentji oleh kaum buruh dinegeri manapun, sehingga penamaan itu memang sepatutnja mendapat perhatian dari siapa sadja jang bertugas dibidang perburuhan. „Serikat madjikan“ adalah pendjelmaan baru dari „Sarekat Hedjo“ dizaman kolonial dulu.

Pada pokoknja, serikat² madjikan mempunyai dua maksud, jaitu pertama menutupi penghisapan terhadap kaum buruh, dan kedua, mematahkan serikat² buruh militant jang tugas pokoknja ialah memperkuat kemerdekaan nasional, membela kepentingan kaum buruh dan melawan penghisapan.

PERUSAHAAN NEGARA DAN PENGHISAPAN

Didalam ekonomi kita sekarang, sudah banjak terdapat perusahaan² negara diberbagai bidang, dibidang produksi, pengangkutan, perbankan, perdagangan dsb. Apakah dengan adanya perusahaan² negara, maka dengan sendirinja bisa disimpulkan bahwa disitu sudah tidak terdjadi penghisapan lagi terhadap kaum buruh? Saja kira tidak demikian. Pada saat ini, nilai-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh di-perusahaan² negara pada prinsipnja menjadi milik negara sedangkan kaum buruh sendiri, atau Rakjat pekerdja pada umumnya belum mempunyai kedudukan jang bisa menentukan penggunaan daripada nilai-lebih itu. Lebih², kalau kita menghadapi gedjala dimana dalam kenjataan nilai-lebih itu malahan tidak menjadi milik negara melainkan masuk kantong kaum kapitalis birokrat, maka tentunja kaum buruh tidak akan merasa bahwa mereka tidak dihisap lagi.

TJARA KERDJA KAUM BURUH

Djika saja menjelaskan hal ini, bukanlah maksud saja untuk mengatakan bahwa kaum buruh jang bekerdja di-perusahaan² negara akan menghadapi management atau pimpinan perusahaan dengan tjara jang sama

seperti mereka menghadapi madjikan didalam perusahaan kapitalis yang dimiliki oleh swasta, terutama oleh modal monopoli asing. Kaum buruh Indonesia sepenuhnya didjivai oleh Manipol dan Dekon dan mereka men-tjurahkan segenap usaha dan tenagaja kepada tugas memperkuat kemerdekaan nasional dengan ikut mem-bangun ekonomi nasional dan demokratis. Sjarat mutlak dalam membangun ekonomi yang demikian ialah bahwa sektor negara harus memegang peranan yang memimpin. Perdjungan untuk memperkuat ekonomi sektor negara yang berkedudukan memimpin adalah perdjungan pa-triotik. Sesuai dengan pokok pendirian ini, maka per-djuangan kaum buruh di-perusahaan² negara, disamping membela kepentingan² kaum buruh sendiri dalam arti seluas-luasnja, harus ditudjukan untuk memperkuat ekonomi sektor negara, yang berarti memperkuat Repu-blik Indonesia yang ber-Manipol.

Ini berarti bahwa tugas² kaum buruh, disamping mem-bela kepentingan² mereka sendiri ialah : *pertama*, ber-usaha melalui Dewan² Perusahaan supaya perusahaan² negara didjalankan dengan baik; *kedua*, menentang pen-tjolehan kekajaan negara oleh kaum kapitalis birokrat; dan *ketiga*, berusaha melalui lembaga² negara supaya kekajaan materiil yang mereka hasilkan benar² mendjadi modal yang diakumulasi oleh negara dan dipergunakan untuk membangun ekonomi nasional dan demokratis, di-pergunakan untuk mengikis habis sisa² imperialis dan feodal. Dekon mengharuskan perdjungan demikian. Selama perdjungan ini belum berhasil sepenuhnya, ma-ka selama itu nilai-lebih yang dihasilkan oleh kaum bu-ruh dipergunakan dengan tjara² yang tidak sesuai de-ngan kepentingan kaum buruh dan Rakjat pada umum-nja, atau malahan dengan tjara² yang bertentangan de-ngan kepentingan²nja. Dan ini adalah penghisapan dan penghisapan oleh musuh² revolusi.

PERATURAN² 26 MEI LANGKAH MUNDUR

Dalam hubungan ini, perlu saja tegaskan bahwa Perpres No. 7, 1963 tentang PDN² yang termasuk da-lam 14 peraturan tanggal 26 Mei, 1963 merupakan satu langkah mundur bagi ekonomi sektor negara. Wewenang terlalu luas diberikan kepada PDN² dan boleh di-katakan perusahaan² itu sudah berada diluar pengawas-

an Pemerintah apalagi DPR-GR. Tugas mereka dalam ikut memimpin ekonomi sesuai dengan kebidaksanaan negara dan sesuai dengan perentjaan yang berpusat boleh dikatakan samasekali ditjairkan. Malahan djika kita mempeladjar Perpres No. 7 itu, tak bisa lain kita memperoleh kesan yang mendalam bahwa perusahaan² diserahkan kepada managers-nja untuk diurus sesuka hati. Mereka diberi kemungkinan, malahan disuruh, ber-saing mati²an diantara mereka sendiri sehingga dapat dibayangkan betapa akan terdjadi rebutan pasaran se-perti dalam alam "free-fight liberalism" yang terkutuk itu. Ini akan menambahkan kesulitan² bagi Rakjat se-bagai konsumen.

Melihat kenjataan² ini semua disamping penghapusan pengendalian harga, siapa akan pertjaja pada pendje-lasan Pemerintah yang diberikan dalam konferensi pers tanggal 5 Djuni jbl. bahwa peraturan² itu tidak berarti liberalisme. Siapa yang tidak akan heran melihat usaha itu untuk mejakinkan kepada kita bahwa langkah² itu „memperkembangkan Sosialisme“. Sosialisme yang nota bene belum ada, karena memang tugas kita belum untuk membangun Sosialisme.

„EKONOMI PDN“

Wewenang terlalu luas yang diberikan kepada PDN² menimbulkan perasaan tjemas dikalangan kaum buruh. Bukankah kaum buruh itu sendiri yang mengambil alih perusahaan² tersebut dan, dalam semangat patriotisme yang sangat tinggi, menjerahkannya tanpa ragu² kepada Pemerintah untuk diurus oleh Pemerintah guna kepen-tingan seluruh Rakjat? Liberalisme yang sedang didja-lankan disektor ekonomi negara benar² menjakiti hati kaum buruh yang melihat tindakan ini sebagai pelang-garan yang kasar terhadap strategi dasar ekonomi se-perti yang ditetapkan didalam Dekon. Djika ini diterus-kan tidak bisa diartikan lain ketjuali menghadihkan milik nasional kepada segenggam kapitalis birokrat, kaum pentjolek dan tukang tjatut. Dengan demikian, unsur E (Ekonomi Terpimpin) dalam USDEK men-djadi bujar samasekali.

Tetapi tidak hanya kaum buruh yang tjemas melihat perkembangan² itu. Perasaan itu ternjata djuga meliputi semua pihak yang bekerdja di-sektor² lain terutama sek-

tor produksi, termasuk pula perusahaan² negara disektor produksi, pengangkutan dsb. Sudah timbul perasaan setjara luas bahwa Dekon disalahgunakan untuk menganakmas-kan PDN² dan meng-anaktiri-kan sektor² lain.

Peraturan yang saja sebut diatas berarti bahwa PDN² mendapat kedudukan istimewa, baik karena mereka akan bisa setjara diam² mengumpulkan keuntungan² yang berlimpah², maupun karena mereka djustru berkepentingan untuk mempertahankan dan terus-menerus memupuk anarki pasar dan spekulasi. Dekon yang benar² produksi-sentris „dilaksanakan“ dengan peraturan yang seratus persen dagang-sentris. Tidak heran bahwa sudah banjak orang suka menamakan ekonomi kita bukan lagi „ekonomi terpimpin“ melainkan „ekonomi PDN“.

Sedjak detik pertama perusahaan² bekas Belanda diserahkan kepada Pemerintah, kaum buruh telah menjatakan perlawanannya terhadap setiap usaha untuk men-swastakan perusahaan itu. Gedjala yang selalu disinjalir itu ternjata telah mulai mendapat wujud kongkrit dalam Perpres No. 7, 1963.

RITULING DAN KOMPETISI PRESTASI

Tidak dapat dibenarkan kalau dikatakan bahwa pengurusan oleh negara menimbulkan kelemahan² birokrasi dan administrasi yang berlebihan. Kesalahannya tidak terletak kepada peranan negara melainkan pada orang² yang ditugaskan untuk menjelenggarakan peranan negara itu. Disinilah letak pentingnja tuntutan² luas supaya segera diadakan retuling yang terutama menjadi tuntutan kaum buruh sendiri. Tuntutan itu sepenuhnya dibenarkan didalam Dekon, fasal 34. Malahan djalan keluar sudah ditunjukkan oleh Dekon fasal 30 yang antara lain menjatakan: „Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selanjutnja perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaan² (dagang) Negara, antara bagian² dalam perusahaan dan antara para pekerdja dalam suatu rentjana produksi“. Kompetisi prestasi yang diadakan untuk membangun ekonomi nasional yang progresif samasekali tidak boleh disamakan dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" alias persaingan bebas. Kompetisi prestasi yang dimaksudkan oleh Dekon ialah kompetisi yang berwatak patriotik untuk meningkatkan produksi dan untuk mengabdikan ke-

pentingan tanahair dan Rakjat. Djadi tidak ada hubungannya dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" yang bertujuan mengedjar keuntungan perseorangan yang merupakan tjiri pokok atau hukum ekonomi pokok daripada ekonomi kapitalis. Ekonomi PDN" sekarang ini djauh lebih dekat kepada "free fight liberalism" daripada kepada kompetisi prestasi seperti yang dimuat dalam Dekon.

Dulu, perusahaan² milik modal Belanda berdjalan „baik“ dalam arti tidak ada salah-urus, pemborosan dan inefficiency sehingga menghasilkan keuntungan yang berlimpah² bagi kaum kapitalis Belanda. Ini adalah oleh karena mereka yang diserahi tugas untuk menjalankan perusahaan² itu (para managers nja) memang membela kepentingan² pemiliknja, jaitu kaum monopolis Belanda. dan pada umumnya mengabdikan diri kepada kaum monopolis itu. Kalau sekarang, perusahaan² negara dijinggapi oleh salah-urus, pemborosan yang luarbiasa dan inefficiency, ini adalah oleh karena terlalu banjak orang yang memegang pimpinan disitu bukannya membela dan mengabdikan kepada kepentingan² pemiliknja, jaitu negara, melainkan membela dan mengabdikan kepada kepentingan² mereka sendiri sehingga mereka sendiri menjadi kapitalis² birokrat yang kekajaannya berlimpah² sedangkan negara dan Rakjat tinggal menanggung segala kerugianja.

SALUT KEPADA ORANG² PDN YANG BAIK

Saja tidak bermaksud samasekali memberi kesan akan² semua orang yang bekerdja atau memimpin di perusahaan² negara berbuat yang demikian. Saja tahu bahwa ada diantara mereka yang memang didjwai oleh semangat patriotisme, dan saja yakin bahwa mereka sendiri akan paling keras mengutuk „kolega²“ mereka yang sangat merugikan kepentingan² kita bersama itu. Malahan mungkin mereka itu paling tahu tentang kebobrokan „kolega²“ mereka itu. Saja menjampaikan salut kepada orang² itu. Yang saja kutuk bukan mereka tetapi sistim „Ekonomi PDN“ yang liberal dan menjoba menggantikan sistim „Ekonomi Terpimpin“ yang saja kutuk ialah konseptor² „Ekonomi PDN“ dan kaum kapitalis birokrat serta pentjoleng² dan tukang tjatut² yang menjadi pelaksana.

Dengan dilantjarkannya serangan terhadap susunan ekonomi jang mau kita bangun dalam tahap nasional dan demokratis ini, melalui liberalisasi disektor ekonomi negara, maka menjadilah tugas bersama dari para pegawai didalam aparatatur Pemerintah dan disektor ekonomi negara pada umumnja, termasuk para pemimpin perusahaan² negara jang patriotik, ber-sama² dengan kaum buruh, untuk melawan kaum kapitalis birokrat, menuntut retuling jang sungguh² dan melawan usaha² untuk meliberalisasi atau men-semi-swastakan sektor negara itu.

III. SELAMATKAN DEKON DAN LAKSANAKAN SETJARA KONSEKWEN!

Dalam tjeramah ini saja telah banjak menjurahkan perhatian kepada soal² jang timbul sedjak diumumkannja Dekon, terutama langkah² jang diambil jang dengan djelas sekali melanggar Dekon.

Dalam bagian terachir ini, saja ingin setjara singkat menguraikan pokok² daripada Dekon terutama untuk menundjukkan apa jang menjadi sjarat² mutlak bagi pelaksanaannja setjara konsekwen. Saja kira saja mempunyai otoritet untuk berbitjara tentang ini, karena sebagai anggota MPN saja ikut aktif menjusun Dekon.

Dekon terdiri dari tiga bagian. Bagian *pertama* menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia jang tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia seperti ditetapkan didalam Manipol. Strategi dasar ekonomi Indonesia menetapkan bahwa kita sekarang berada didalam tahap pertama daripada revolusi kita, dimana kita harus menjiptakan *„susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme“*. Djuga ditetapkan bahwa tahap pertama ini *„adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia“* (Dekon, fasal 3).

Strategi dasar ekonomi ini mempunyai dua konsekwen-si jang amat penting, jaitu *pertama*, bahwa tugas kita dalam tahap pertama memang bukan untuk membangun Sosialisme, dan *kedua*, bahwa oleh karena perspektif daripada Revolusi kita adalah Sosialisme, maka tidak

boleh terdjadi hal² dalam tahap pertama jang berlawanan dengan perspektif itu.

Djadi, jang harus kita bangun, sekarang ialah ekonomi progresif, bukan ekonomi reaksioner; ekonomi progresif jang perspektifnja adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme.

Bagian *kedua* daripada Dekon ialah mengenai kebijaksanaan djangka pendek. Bagian ini pada pokoknja menentukan bahwa harus dilakukan usaha² dalam waktu singkat untuk menjukupi sandang-pangan, terutama pangan, serta merehabilitasi sektor industri, pengangkutan, pertanian dan lain² sektor produktif dengan memberi tekanan khusus pada persediaan bahan² baku/penolong dan spare-parts. Kebidjaksanaan djangka pendek djuga menetapkan berbagai hal jang penting sekali dalam hubungan dengan politik perpadjakan, politik fiskal, pembiajaan, penjempurnaan pengurusan perusahaan² negara, ekspor-impur, transport dan komunikasi, dsb.

Kebidjaksanaan djangka pendek tidak bisa dipisahkan dari strategi dasar ekonomi, atau dengan kata lain, kedua bagian ini merupakan satu kesatuan. Ini berarti bahwa strategi dasar dilaksanakan melalui kebidjaksanaan djangka pendek dan bahwa kebidjaksanaan djangka pendek harus dilaksanakan dengan tjara² jang sepenuhnya sesuai dengan strategi dasar itu jang berpokok pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Prinsip² pokok dalam melaksanakan strategi dasar serta kebidjaksanaan djangka pendek ialah dengan menggerakkan segenap kekuatan dan potensi Rakjat, dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, dengan membangun ekonomi jang tegak berdiri diatas dua kaki sendiri.

Bagian *ketiga* daripada Dekon adalah bagian mengenai sjarat² pelaksanaannja. Disitu ditetapkan bahwa *„agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun eksekutif, dipusat maupun di-daerah², begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah² Daerah dengan badan² legislatif“*. Bagian ini djuga menegaskan perlu di-intensifkan *„retuling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah²“*. (Dekon, fa-

sal 34) yang harus dilakukan dibawah pimpinan Presiden sendiri.

Kalau strategi dasar telah ditetapkan, kalau kebidjaksanaan djangka pendek telah digariskan, maka soal yang pokok yang harus diselesaikan ialah untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannja, dan kuntji daripada sjarat² itu, seperti digambarkan dalam fasal 34 dari Dekon ialah mentjiptakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM dibidang administratif dan eksekutif dipusat maupun di-daerah². Pada saat ini Rakjat pekerdja negeri kita, termasuk kaum buruhnja, termasuk kaum taninja, termasuk para pegawainja, termasuk semua lapisan Rakjat, menghadapi hal² yang pahit sekali dalam hubungan dengan apa yang dinamakan „pelaksanaan Dekon“. Oleh karena itu, lebih² dari sebelumnya, kebutuhan untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannja sudah mendjadi sangat mendesak. Kegandjilan dalam „pelaksanaan Dekon“ ini dimungkinkan karena alat eksekutif dipusat belum disesuaikan dengan prinsip kegotongrojongan berporoskan Nasakom, sehingga tidak semua pertimbangan tertjakup didalamnya.

Demikianlah pokok² yang ingin saja sampaikan kepada Sdr.² mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Djelaslah dari uraian diatas, bahwa kaum buruh bukan hanya menjambut Dekon dengan hangat, tetapi djuga membelanja dengan gigih dan menuntut pelaksanaannja yang konsekwen.

Mudah²an tjeramah ini akan berguna dalam memperkuat kerdjasama diantara Sdr.² sendiri dan para pegawai pada umumnja dengan kaum buruh dan dengan demikian ikut memperkuat kegotongrojongan nasional dari semua lapisan Rakjat dinegeri kita.

(Tjeramah didapan para pejabat dan pegawai Departemen Perburuhan pada tanggal 17 Djuni 1963)

LAMPIRAN

- Pernyataan Politbiro CC PKI

- Deklarasi Ekonomi

Pernyataan Politbiro CC PKI :

SELAMATKAN DEKON !

**Bersamaan Dengan Itu Ringkus Dan Ganjang
Kontra-Revolusi !**

Pada saat ini Rakjat Indonesia sedang mentjurahkan perhatian dan kekuatannya untuk melaksanakan instruksi Presiden Sukarno menghanturkan kontra-revolusi jang baru² ini mengambil bentuk teror rasial, membakar alat² produksi, pengangkutan, distribusi dll. Bersamaan dengan itu, Rakjat-pun sedang mengambil bagian aktif dalam menanggulangi kesulitan² ekonomi dengan melaksanakan Deklarasi Ekonomi setjara konsekwen. Dalam suasana jang demikian ini, tiba² Rakjat dikedjutkan oleh pengumuman Pemerintah pada tanggal 26 Mei 1963 tentang dikeluarkannya 14 Peraturan jang dinjatakan untuk melaksanakan Dekon, dan tentang kenaikan tarif² listrik, kereta-api, PTT, GIA, serta kenaikan harga barang² seperti kertas untuk surat kabar, dsb. Semuanya ini dilakukan tanpa setahu DPR atau Musjawarah Pimpinan Negara (MPN) jang menjusun Dekon. ✓

Dari 14 peraturan tersebut 9 diantaranya mengenai soal ekonomi, 4 mengenai soal kepegawaian dan 1 mengenai koordinasi pelaksanaan peraturan² tersebut. Mengenai kenaikan-kenaikan tarif diumumkan antara lain, bahwa tarif listrik dinaikkan rata² menjadi 300%, tarif kereta-api menjadi 300%-500%, tarif PTT menjadi 400%, tarif GIA menjadi rata² 500%. ✓

Jang sangat mengedjutkan dan menimbulkan ketjemasan dikalangan Rakjat ialah bahwa konseptor² atau perentjana² daripada peraturan² ekonomi tersebut „atasanama“ dan „untuk melaksanakan Dekon“ djustru menetapkan ketentuan² jang setjara langsung memberikan beban berlipatganda beratnja kepada penghidupan Rakjat jang sudah amat sangat beratnja itu. Adalah kewadajiban Rakjat Indonesia dari segala lapisan untuk mempeladjar peraturan² tersebut dengan teliti dan menjatakan pendapatnja. ✓

Chusus pendapat mengenai kenaikan tarif jang luarbiasa tingginja itu kini telah mulai dinjatakan oleh pemimpin² partai² NASAKOM dan organisasi² massa buruh dan tani jang demokratis. Hanja satu-dua orang Manipolis munafik sadja seperti tokoh² jang berlagak „sok-sosialis“, umumnja elemen² Soska dan Masjumi dengan badju baru, jang sudah berani menusuk perasaan Rakjat dengan menjatakan setudju kenaikan tarif dan harga. Kaum Manipolis gadungan ini menjatakan bahwa kaum tani tidak terkena dengan kenaikan² tarif dan harga dan mendorong Pemerintah supaja tidak ✓

menekan harga, melainkan mengikuti sadja harga pasar yang spekulatif dan anarkis sekarang ini yang praktis dikendalikan oleh kaum spekulan. Kaum Manipolis munafik ini pada hakekatnja mendjadi djurubitjara daripada tukang tjatut dan kaum kapitalis birokrat yang merupakan kaum penghisap besar dikota dan kaum tuantanah yang merupakan kaum penghisap besar didesa.

Peraturan Ekonomi 26 Mei 1963 Memerosotkan Dajabeli Rakjat

Diantara peraturan² ekonomi itu jang pokok adalah peraturan mengenai ekspor dan impor, penetapan harga resmi, distribusi bahan² pokok, dan mengenai PDN². Jang mengenai kepegawain mengatur soal kenaikan tundjangan kemahalan umum dengan 100% dan pensiun dengan 50%.

Dengan peraturan² impor-ekspor dan harga itu dapat diperhitungkan setjara pasti bahwa harga barang² sandang-pangan pada umumnja rata² akan meningkat paling sedikit dengan 300%. Dengan demikian, walaupun diadakan kenaikan tundjangan kemahalan umum pegawai dengan 100% atau bersihnja dengan kurang dari 100% karena ada tundjangan lain jang tidak dinaikkan, namun akan terjdjadi kemerosotan, dajabeli upah disekitar 50% daripada keadaan sebelum adanya peraturan² ekonomi baru itu. Oleh karena itu, akan dibuktikan dalam praktek bahwa peraturan² ekonomi tersebut, jang dinjatakan oleh konseptor²nja „untuk melaksanakan Dekon“, bertentangan samasekali dengan Dekon fasal 26 jang menjatakan „tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan“. Peraturan² ekonomi tersebut bukan sadja bertentangan dengan Dekon tetapi djuga dengan Pantja Program Front Nasional dan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 jang baru ini disahkan oleh Sidang Umum II MPRS dan telah disambut hangat oleh segenap golongan Rakjat, jang antara lain menjatakan bahwa: „Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menadju terlaksunnja Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1966 lampiran B. Bab V ayat 5, jang harus dilaksanakan setjara berantjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan dajabeli Rakjat pekerdja termasuk petani-produsen“. (Resolusi MPRS fasal 9, ayat 7)

Sekedar untuk mendjelaskan kesimpulan tersebut diatas mengenai peraturan² ekonomi dapattah dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Perpres No. 5 tahun 1963 jang mengatur soal ekspor, maka exportir akan mendapat keuntungan rupiah dan devisa (matauang asing seperti dolar Amerika Serikat misalnja) jang lebih besar daripada waktu masih berlakunja peraturan SIVA. Untuk tiap dolar dari hasil ekspornja, seorang exportir akan menerima kuranglebih Rp. 600,— (jaitu 95% dari Rp. 270,— plus Rp. 45,—) ditambah dengan

nak retensi 5% daripada hasil devisa jang dapat dipergunakan „sebebas-bebasnja“, serta hak menggunakan 10% dari hasil devisa itu untuk mengimpor barang². Dengan demikian exportir dapat memperoleh kl. Rp. 450,— atau lebih untuk setiap dolar, maka peraturan itu berarti devaluasi rupiah terhadap matauang asing sebesar kuranglebih 1000% (Rp. 450,— adalah 1000% daripada koers dasar Rp. 45,—). „Dengan peraturan SIVA berdasarkan koers 30 sudah berarti devaluasi rupiah terhadap tiap dolar jang dihasilkan oleh ekspor kuranglebih sebesar 500% dibandingkan dengan koers dasar. Djadi, walaupun Dekon menjatakan dalam fasal 31 : „tidak akan diambil tindakan² moneter jang drastis, seperti umpamanja devaluasi,“, tetapi Perpres No. 5/1963 djustru mendevalusi rupiah kita sampai 1000% atau dua-kali daripada devaluasi berdasarkan peraturan SIVA. Ini adalah suatu tindakan memerosotkan nilai rupiah jang paling besar semendjak tahun 1950.

II

Dengan Perpres No. 6/1963 mengenai impor, jang menentukan pungutan² atas impor berupa Hasil Perdagangan Negara (HPN), dan HPN-tambahan, ditambah lagi dengan tarif bea masuk baru jang lebih besar, maka barang² essensil, jaitu barang² pokok kebutuhan dalam negeri seperti tekstil, obat²an, kertas koran, benang tenun, buku² pelajaran dsb. akan mengalami kenaikan harga luarbiasa. Barang² essensil jang masuk Golongan I, meskipun hanja dikenakan HPN Rp. 270,—, disamping koers dasar Rp. 45,— dan bebas dari HPN-tambahan serta bea masuk, akan mengalami kenaikan harga kl. 35%, sedangkan beras dan pupuk jang dulu sama-sekali dibebaskan dari pungutan komponen harga akan mengalami kenaikan harga sebesar 700% djika dibandingkan dengan sebelum adanya peraturan baru.

Diantara barang² impor Golongan II jang djuga meliputi barang essensil dan jang dulu masuk dalam Golongan I, akan ada barang² jang mengalami kenaikan tak kurang dari 900%, misalnja sadja, susu baji, sedangkan barang² baku/penolong penting jang dulu masuk dalam Golongan II akan meningkat dengan kuranglebih 300%. Sebaliknya barang² jang dulu diimpor berdasarkan SIVA (barang² mewah) dan jang sekarang masuk Golongan II tidak akan mengalami kenaikan harga, dan barang² mewah jang sekarang masuk Golongan III hanja akan mengalami kenaikan kuranglebih 60%. Pembatasan² terhadap impor barang² mewah tidak ada, ketjuali mengenai 10% hasil devisa jang boleh digunakan oleh exportir hanja untuk mengimpor barang². Golongan I dan II.

Kenaikan² harga jang demikian itu dihitung berdasarkan kenaikan² pungutan impor, dan belum memperhitungkan kenaikan² jang disebabkan liberalisasi politik harga. Misalnja sadja, harga kertas koran telah dinaikkan 700% (dari Rp. 7,— per Kg. mendjadi Rp. 50,—), walaupun perhitungan kenaikan berdasarkan pungutan impor bisa kurang daripada itu. Barang² baku dan penolong untuk produksi dalam negeri

dengan harga yang sedemikian tingginya akan menyebabkan ongkos produksi makin meningkat, yang semuanya harus dipikul akibatnya oleh Rakyat. Bagi kaum pengusaha nasional yang terbatas modal kerjanya akan menjadi lebih merosot kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas kerja perusahaannya sehingga pengangguran sudah tentu akan menjadi lebih luas. *Semua kenaikan biaya impor yang dibayar oleh importir pada akhirnya harus dipikul oleh Rakyat sebagai konsumen, karena harus membeli harga barang dengan harga yang lebih tinggi.*

III

Peraturan Pemerintah 20/1963 tentang kebijaksanaan dibidang harga pada pokoknya menetapkan agar harga resmi selalu mendekati dan mengikuti harga pasar bebas setempat dengan tidak boleh berbeda lebih besar daripada 30% dengan harga itu. Perbedaan harga resmi sekarang dengan harga pasar bebas mengenai barang sandangpangan bergerak antara 300% sampai 500%.

Djadi menurut peraturan baru ini harga resmi harus dinaikkan dengan rata-rata lebih dari 300%. Harga tekstil kasar yang resminya sekarang Rp. 60,— per meter harus dinaikkan menjadi Rp. 210,— per meter karena dipasar bebas harganya Rp. 300,—. Kalau kaum spekulasi menaikkan harga pasar bebas, maka harga resmi Pemerintah akan segera mengendurnya, untuk memelihara perbedaan 30%. Ini adalah politik harga yang sangat liberal, yang samasekali tidak mengandung unsur pengendalian harga oleh Pemerintah dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan politik harga yang ditetapkan dalam Resolusi MPRS No. I/1963 sbb.: „Politik harga harus ditundukkan untuk menjegah kenaikan harga dan tarif. . . . yang harus dilaksanakan setjara berentjana berdasarkan tingkat perkembangan produksi dan menjamin peningkatan daya-beli Rakyat pekerja termasuk petani produsen”.

IV

Perpres No. 10/1963 menetapkan antara lain pembagian beras untuk pegawai negeri setiap jiwa 8 Kg. sebulan. Tetapi peraturan ini juga menetapkan bahwa Pemerintah akan membagikan pengganti berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras menurut harga distribusi Pemerintah, apabila Pemerintah ternjata tidak mampu memberikan distribusi beras. Kalau sudah ada bajangan demikian, bagaimana nasib Dekon yang menandakan perlunya ada „iron stock beras” untuk menjamin keperluan hidup dan menjegah kenaikan harga beras?

V

Perpres No. 7/1963 mengenai aktivitas PDN lebih lagi memberikan keleluasaan kepada PDN untuk bekerja tanpa pengawasan. Selama ini PDN telah banyak memboroskan dan merugikan keuangan negara. Sebabnya ialah karena

Badan Pemeriksa Keuangan, yang berwenang untuk memeriksa keuangan PDN dan PN, berhubung dengan kekurangan sjarat yang diperlukan oleh Badan tersebut, belum dapat melaksanakan tugasnya setjara efektif. Disamping itu, karena putusan DPRGR yang menghendaki disampalkannya Laporan Tahunan dari masing-masing PDN dan PN kepada DPRGR belum dilaksanakan. Djika Perpres No. 7/1963 ini dipadukan dengan peraturan mengenai kebidjaksanaan harga, maka sjarat ekonomi perusahaan yang lazim untuk melaksanakan efisiensi dalam management guna menjegah kerugian dan mendapatkan keuntungan bagi PDN dan PN menjadi dihapuskan samasekali. Dengan kekuasaan yang ada pada BPU-PDN dan wewenang yang luas yang diberikan kepada pemimpin PDN, mereka hanya menempuh jalan yang paling mudah saja untuk menambah penghasilan PDN dengan menaikkan harga barang dan mengikuti harga pasar bebas. Kredit yang telah diperolehnya dari Pemerintah sebagian dinjatakan sebagai modal perusahaan dan kewajiban menjetor kepada Dana Pembangunan Pemerintah dapat sewaktu-waktu dibebaskan. Ini samasekali berlawanan dengan garis agar PDN betul-betul memegang peranan sebagai ekonomi sektor negara yang memegang posisi komando dalam melantarkan peredaran barang dan mengendalikan harga. Dengan ini sudah lebih sulit diharap PDN dan PN akan memberi iuran yang besar kepada negara. Ini semua bertentangan pula dengan Dekon yang menjatakan: „perusahaan negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selanjutnya”.

Tindakan Moneter Konvensional Terulang Lagi

Dari uraian di atas jelas bahwa konseptor atau arsitek daripada peraturan ekonomi tersebut merupakan sumber bahaya bagi pelaksanaan Dekon. Peraturan ekonomi itu makin memperbesar penderitaan Rakyat karena ongkos hidup makin meningkat sedangkan nilai penghasilan riil Rakyat pekerja sangat merosot. Tindakan ekonomi yang akan dilakukan dengan peraturan negara tersebut pada hakekatnya adalah „tindakan moneter konvensional” yang justru ditolak oleh Dekon dalam fasal 13.

Pada exportir diberikan perangsang besar. Tetapi apakah produsen yang bukan exportir yang banjak jumlahnya itu juga mendapat perangsang? Ini tandatanya besar. *Jang sudah terang, kaum buruh, pegawai, anggota Angkatan Bersendjata, pendeknya semua yang hidup dari upah dan gaji. dibunuh semangat kerjanya, jadi samasekali tidak dirangsang untuk bekerja keras, dengan adanya kenaikan harga yang keterlambatan.*

Soal lain, pasti akan timbul kontradiksi baru antara produsen dan pedagang ekspor serta makelar yang dimana produsen, karena juga menderita akibat kenaikan harga, akan menetapkan ongkos produksi yang lebih tinggi. Dengan begitu akan timbul disparitet baru antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri yang akan menyebabkan penghalang bagi perkembangan ekspor. Tanda kenaikan harga karet

dalam negeri sekarang sudah nampak kearah itu, sedangkan harga karet diluar negeri masih tetap menghadapi bahaya kemerosotan sebagai akibat krisis ekonomi yang masih menimpa dunia kapitalis.

Selanjutnya tindakan moneter konvensional yang bertentangan dengan Dekon ini digunakan juga untuk mengadakan keseimbangan anggaran belanda negara atau setidaknya tidaknya memperketat jumlah defisit dengan jalan yang sangat memberatkan Rakjat. Jika kemampuan mengimpor dengan hasil ekspor setahun sama dengan tahun 1962, maka pungutan atas impor saja yang bisa diperoleh dari HPN-tambahan dan bea masuk dapat diperkirakan lebih dari 10 kali daripada anggaran pendapatan 1962 dari sektor perdagangan luar negeri. Diatas kertas nampaknya baik. Tetapi ini semua harus dipikul oleh Rakjat yang sudah demikian berat beban hidupnya, yang akhirnya akan memukul ekonomi negeri atau "perut negara" karena kenaikan harga yang terus-menerus. Apalagi uang Rakjat yang masuk kas negara itupun penggunaannya tidak terjamin berdasarkan satu prinsip prioritas pembangunan yang efektif sebagaimana ditetapkan dalam Memorandum Pimpinan MPRS.

Antusiasme Rakjat dalam pembangunan tak dapat dibangkitkan dengan jalan menjerang kepentingan ekonomi Rakjat yang sudah berat, tetapi dengan jalan mentjiptakan sjarat materiil yang diperlukan untuk hidup lajak sebagai manusia.

Konseptor peraturan ekonomi tersebut justru menempuh jalan yang dilcheudaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat dengan apa yang mereka namakan "program stabilitisasi ekonomi", yang isinya tidak lain ialah devaluasi, liberalisasi perusahaan negara dan kenaikan harga. Inilah hakekat dan jiwa daripada konseptor peraturan ekonomi 26 Mei 1963. Rakjat yang tinggi kesedaran politiknya tidak mudah ditipu dengan peraturan tersebut sekalipun dengan sembojan "untuk melaksanakan Dekon".

Selamatkan Pelaksanaan Dekon !

Pada waktu ini tidak ada jalan patriotik yang lain bagi Rakjat Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi ke-tjuali menjelamatkan dan melaksanakan Dekon dengan memperjuangkan hal sbb. :

- 1) Membentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM sekarang juga, sebagai djaminan politik agar Dekon tidak mudah disalahtafsirkan, dan mengadakan rituling disemua bidang khususnja dibidang ekonomi-keuangan, terutama sekali rituling personalia, sehingga tidak terdapat lagi konseptor ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol dan Deklarasi Ekonomi.
- 2) Peraturan kenaikan tarif dan kenaikan harga harus ditinjau kembali untuk dibatalkan.
- 3) Distribusi barang pokok dengan harga rendah harus diperlantjar dan diratakan dikalangan Rakjat, dan tidak

diganti dengan sistim memberi pengganti dalam bentuk uang.

- 4) Mempertinggi produksi dalam negeri dengan mengadakan pengurusan yang efisien, memberantas salah-urus dan salah-duduk, melaksanakan management terbuka, memperbaiki nasib kaum buruh dan kaum tani sebagai tenaga produktif yang pokok, mengerahkan funds and forces swasta nasional dan domestik dan terutama sekali mengembangkan daya produksi dan daya kerja perusahaan negara agar dapat merealisasi peranannya dalam memegang posisi komando. Harus didjamin persediaan spare parts, barang baku dan penolong.
- 5) Perangsang kepada exportir harus mengandung sjarat bagi peningkatan produksi barang ekspor, perbaikan kualitas, pentjegahan kerugian produsen akibat disparitet, perluasan pasaran ke-negeri the new emerging forces.
- 6) Segera menjelesaikan pembentukan dan mengaktifkan semua Dewan Perusahaan, Dewan Pertimbangan Departemen dan Djawatan, Dewan Kredit Luar negeri, Dewan Ekspor-Import, Dewan Produksi, Dewan Distribusi, Dewan Pengangkutan, dll. sebagai alat social control dan semuanya harus berkomposisi representatif dan mentjerminkan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM.
- 7) Pemasukan keuangan negara harus bersandar pada perkembangan kapasitas kerja perusahaan negara dan pengurusan yang efisien.
- 8) Memberantas penjelundupan dalam perdagangan luar negeri, dan memasukkan semua hasil devisa kedalam kas negara, termasuk hasil devisa dari perusahaan minjak asing.
- 9) Transport darat dan laut harus dilantjarkan dan mendapat prioritas.
- 10) Harus diadakan import planning yang mendjamin kebutuhan pokok dalam negeri untuk melantjarkan pembangunan dengan menggunakan persediaan devisa se efektif mungkin. Impor barang mewah harus dihentikan.
- 11) Peraturan ekonomi baru tanggal 26 Mei 1963 supaya ditinjau kembali dan diganti dengan yang sesuai dengan Dekon, sehingga tidak menambah berat beban Rakjat dan tidak lebih merusak ekonomi negeri.
- 12) Melaksanakan Undang Perdandjian Bagi Hasil dan Undang Pokok Agraria dengan lebih sungguh.

Achirnja, dengan ini Politbiro CC PKI menjerukan kepada Rakjat Indonesia untuk lebih mendalami Deklarasi Ekonomi, Perintjan Pantja Program Front Nasional dan Resolusi MPRS No. I/1963. Disamping itu peraturan tanggal 26 Mei 1963 supaya dipeladjar sungguh sehingga dapat diketahui seberapa jauh konseptor peraturan tersebut sudah menjimpang dari Deklarasi Ekonomi, Pantja Program Front Nasional dan Resolusi No. I MPRS tahun 1963 dan sampai dimana peraturan yang mengenai ekonomi, terutama yang

mengenai ekspor-impor, harga dan distribusi akan makin memberatkan beban Rakyat. Semuanya ini ditunjukkan untuk memperoleh pengertian dan kesadaran yang lebih tinggi lagi sehingga dapat ditijptakan kekuatan dan tekad yang lebih bulat guna menjelamatkan Pelaksanaan Dekon.

Njatakanlah perasaan dan fikiran mengenai Peraturan² 26 Mei 1963 !

Perkuat Persatuan Nasional untuk meringkus dan mengganjang kontra-revolusi !

Dengan persatuan nasional yang lebih kuat, selamatkan Dekon !

Politbiro CC PKI

Djakarta, 3 Djuni 1963.

DEKLARASI EKONOMI

Saudara-saudara sekalian,

1. Sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia saja menjadari sedalam-dalamnja, seperti djuga telah saja utarakan dengan kata-kata yang djelas dalam pidato 17 Agustus 1962, tekad bangsa Indonesia untuk menanggulangi setjara keseluruhan dengan kekuatan sebulat-bulatnja persoalan ekonomi nasional kita.

2. Disamping itu, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, untuk keselamatan pertumbuhan Revolusi setjara keseluruhan, saja tidak dapat melepaskan diri daripada hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita.

Hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita menentukan prioritas-prioritas yang mutlak perlu bagi Revolusi kerakjatan dalam abad ke-20.

3. Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia.

Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannja telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, yang mendjadi bagian mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus mentijptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa „exploitation de l'homme par l'homme". Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang didjamin akan pekerdjaan, sandang-pangan, perumahan serta kehidupan kulturil dan spirituil yang lajak. Susunan ekonomi yang demikian inilah yang harus mendjadi tudjuan segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap putera Indonesia.

4. Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewadajiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini ialah mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju ke masyarakat Sosialis Indonesia.

5. Dalam perdjongan untuk menyelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) ✓

dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Negara.

6. Karena itu yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Dalam tingkatan sekarang ini harus disadari bahwa modal terpenting bagi pembangunan nasional ialah menggali dan mengolah kekayaan alam kita itu.

Ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, yang tentunya hanya dapat memberikan hasil sebesar-besarnya jika dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara massa rakyat dan Pemerintah, sebagai syarat untuk menimbulkan dan menyalurkan daya kerja dan daya kreatif rakyat setjara maksimal.

7. Untuk mentjapai kegotong-rojongan itu saja peringatan bahwa dimasa lampau *potensi dan kekuatan rakyat merupakan tulang-punggung* dari alat perdjangan dan alat Revolusi Indonesia. Hal ini terbukti umpamanya :

- a. Dalam melaksanakan Revolusi fisik, menghadapi kekuatan dan kekuasaan Belanda, kita menang karena melandaskan perdjangan kita pada potensi dan kekuatan rakyat;
- b. Dalam menghadapi pemberontakan dan subversi-asing yang setjara simultan berlangsung dengan politik konfrontasi terhadap Belanda, kita menang djuga karena melandaskan perdjangan kita pada potensi dan kekuatan rakyat;
- c. Dalam menemukan kembali Revolusi kita yang dapat melahirkan Manipol Usdek sebagai ideologi nasional progresif, kita djuga memakai sumber potensi dan kekuatan rakyat sebagai landasan;
- d. Tri-Komando Rakyat, sebagai tingkat terakhir dalam perdjangan merebut Irian Barat, berhasil dengan gemilang djuga karena kita melandaskan perdjangan kita pada potensi dan kekuatan rakyat.

8. Perdjangan-perdjangan tadi *menghasilkan kelengkapan* dari alat-alat Revolusi Indonesia yang berupa :

- a. kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,
- b. ideologi nasional progresif Manipol/Usdek,
- c. satu pimpinan Revolusi, Re-So-Pim,
- d. keamanan dan
- e. kekuatan Angkatan Bersendjata yang kokoh, bersatu dan bermutu tinggi.

Alat-alat ini merupakan syarat mutlak bagi kelanjutan Revolusi Indonesia, untuk menjaga kesatuan Indonesia dari antjaman, baik dari dalam maupun dari luar dan bagi segala pembangunan ekonomi selanjutnya.

9. Dalam melaksanakan Revolusi dibidang sosial dan ekonomi selanjutnya, maka — sesuai dengan hukum Revolusi — kita harus mempergunakan sepenuhnya semua alat Revolusi yang sudah kita miliki itu, dengan selalu melandaskan perdjangan kita pada potensi dan kekuatan rakyat.

10. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sadar bahwa sisa-sisa kolonial dan sisa feodal dan demikian pula sifat-sifat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih djuga memberikan rintangan dalam pertumbuhan keraharajuan Sosialisme Indonesia. Khususnya blok-blok ekonomi menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari "the old established forces". Berhubung dengan itu maka Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, yang tidak hanya menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi yang disamping itu terlebih-lebih menekan perkembangan pembangunan ekonomi dinegara-negara yang baru sadja memasuki alam kemerdekaan.

11. Dalam melanjutkan pertumbuhan-pertumbuhan dibidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik-pangkal pada modal yang sudah kita miliki ialah :

- a. Aktivitas ekonomi Indonesia dewasa ini kurang lebih 80% sudah berada ditangan Bangsa Indonesia. Dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa asing sehingga, baik Pemerintah maupun rakyat, tidak dapat mengadakan perentjanaan setjara pokok bagi pertumbuhan ekonomi setjara revolusioner.
- b. Pada waktu-waktu belakangan ini Pemerintah sudah mulai dapat setjara aktif menjusun aktivitas ekonominya dalam arti konsepsionil, organisatoris dan struktural.
- c. Meskipun demikian kita belum dapat berkembang setjara mendalam, oleh karena perhatian Pemerintah dan kekuatan rakyat masih dititik-beratkan kepada penjusunan alat-alat Revolusi, yang baru pada waktu sekarang ini dapat dikatakan lengkap.

Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa baru sekarang kita dapat menggerakkan segala usaha dan perhatian rakyat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara konsepsionil, organisatoris dan struktural dalam arti keseluruhan.

Usaha-usaha Pemerintah dan rakyat yang sudah ditempuh setjara konsepsionil, organisatoris dan struktural ialah misalnya :

- 1) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama yang sudah disahkan oleh MPRS,
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi-Hasil,
- 3) peranan Pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional, dan
- 4) penjusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS, Koperasi dsb.

12. Semua ini merupakan modal bagi kita untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara integral. Dengan modal itu maka baru sekaranglah kita dapat menggerakkan segala potensi dan kekuatan rakyat.

Disamping itu perlu diperhatikan sedalam-dalamnya, bahwa kita harus menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman dimasa yang lampau, khususnya pengalaman-pengalaman yang tidak memberikan hasil seperti yang ditjita-tjitakan. Selanjutnya

djuntamente perlu diperhatikan pengalaman-pengalaman dari negara² dan bangsa² lain, yang djuga menempuh djalan pertumbuhan kearah sosialisme setjara revolusioner.

13. Disamping modal positif ini, sebagai akibat dari perdoangan untuk menanam setjara teguh alat-alat Revolusi, kita sekarang menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomis yang agak mendesak seperti inflasi, kekurangan devisa yang mengakibatkan pembatasan impor bahan-bahan baku sehingga kegiatan alat-alat produksi menurun. Keadaan yang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah yang berdiri sendiri, lebih-lebih tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensional belaka. Sebaliknya, tidak ada djalan mudah yang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuahi atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita.

14. Ini berarti bahwa segala perhatian, segala usaha dan segala aktivitas untuk memetjahkan persoalan ekonomi sekarang ini harus berlandaskan pada kelengkapan konsepsi, organisasi dan struktur setjara integral, dalam rangka kewadajiban kita menumbuhkan Revolusi yang perspektifnja tidak ada lain jalah Sosialisme Indonesia.

15. Potensi rakjat yang telah saja sebutkan beberapa kali dan yang selalu tumbuh dan meningkat itu antara lain berupa :

- a. kesadaran sosial yang sangat mendalam,
- b. kesadaran akan pentingnja dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi,
- c. penambahan ketrampilan dan keahlian,
- d. kerajinan dan tjinta-kerdja rakjat serta
- e. semangat patriotisme.

16. Pada hakekatnja dasar ekonomi terpinin jalah menjalurkan dan memperkokoh potensi rakjat tsb. agar supaja dapat berkembang sepenuhnya, berdasarkan perentjanaan dan pelaksanaan setjara teratur dan perhitungan (kalkulasi) yang seksama. Segala tindakan, baik dari fihak-fihak Eksekutif dan Legislatif maupun dari fihak alat-alat Negara, harus ditudjukan kepada perkembangan potensi rakjat sesuai dengan sifat ekonomi terpinin menudju ke Sosialisme Indonesia.

17. Berhubung dengan keadaan dan titik dari perdoangan kita maka dimasa yang lampau sebagian besar dari bimbingan ekonomi terdesak oleh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat. Pada waktu itu diberikan prioritas setinggi-tingginja kepada tindakan-tindakan untuk menghadapi bahaya-bahaya terhadap kesatuan Negara dan bahaya-bahaya terhadap keamanan politis dan fisik bangsa kita.

18. Dalam menilai aktivitas ekonomi nasional kita yang meliputi aktivitas Pemerintah, aktivitas koperasi dan aktivitas swasta, perlu disadari bahwa peranan rakjat pada waktu ini, rakjat sebagai tani, rakjat sebagai buruh, pendeknja rakjat sebagai produsen, yang merupakan potensi dan kekuatan riil dan materiil. Dalam garis besarnya a.l. dapat

diambil tjontoh, bahwa 60% dari penghasilan karet jalah karet rakjat, kopra dan produksi padi 100% dihasilkan oleh rakjat, 60% dari transport bermotor bersifat swasta. Selanjutnja perlu diketahui bahwa pengangkutan inter-insuler untuk 50% dilaksanakan dengan perahu-perahu dan kapal-kapal rakjat sederhana.

Disamping itu, adalah kenjataan pula bahwa dilapangan perdagangan ketjil dan menengah, rakjat mendjalankan peranan besar, baik berupa swasta modern maupun berupa usaha rakjat sederhana. Pun perlu diterangkan bahwa koperasi djuga sudah mulai bergerak dilapangan produksi.

Dilapangan industri, impor dan ekspor, kita mengenal pengusaha-pengusaha yang kita sebut golongan swasta.

19. Semua aktivitas ini membangkitkan dikalangan rakjat setjara keseluruhan tuntutan-tuntutan yang makin meningkat (rising demands) dalam arti konsumtif dan produktif, serta memperkokoh kesadaran sosial dan memperdalam pengertian rakjat tentang persoalan-persoalan ekonomi. Ini berarti bahwa tiap "exploitation de l'homme par l'homme" oleh siapapun, apalagi djika dilakukan oleh alat-alat Negara, akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, yang paling sedikit akan ditjerminkan sebagai sifat pasif atau atjauh ta' atjuh, dan dengan demikian mengurangi aktivitas ekonomi setjara nasional.

20. Teranglah, Saudara-saudara, bahwa djalan kearah Sosialisme Indonesia harus ditempuh setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan rakjat. Khususnja dalam keadaan sekarang soal pembangunan di Indonesia tidak berlangsung hanja melalui modal Pemerintah akan tetapi djuga modal yang dikumpulkan oleh rakjat, baik modal materiil maupun modal pengalaman, dan lebih-lebih modal dalam arti semangat dan patriotisme merupakan sjarat mutlak bagi kemadjuan kita semuanya. Pertumbuhan selanjutnja kearah Sosialisme Indonesia akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setjara kreatif, disesuaikan dengan tjiri-tjiri kepribadian nasional dari bangsa Indonesia sendiri.

21. Dalam melaksanakan kegotong-rojongan ini yang meliputi semua "funds and forces", Pemerintah memegang pimpinan kearah tudjuan Sosialisme Indonesia. Pimpinan dimasa yang lampau, oleh karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan kegiatan administratif (bureaucratisme) dan peraturan serta kegiatan dilapangan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat, menekan dan menghambat potensi dan daja kreatif rakjat untuk berkembang.

22. Dalam keadaan sekarang, maka sifat tegas dari pimpinan pemerintahan seharusnya adalah sebagai berikut :

- a. memiliki perentjanaan pembangunan nasional dan memimpin pelaksanaannja;
- b. memperkembangkan segala aktivitas dan daja kreatif rakjat;
- c. memberikan pelayanan sepenuhnya kepada keperluan-keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang;
- d. memberikan perhatian sepenuhnya kepada landasan-landasan ekonomi, agar supaja dengan demikian menguasai

pengemudian hukum-hukum ekonomi, sehingga dapat dihindari kerugian-kerugian nasional seperti kita alami di waktu jang lampau.

23. Dalam hubungan ini diterangkan bahwa perhatian akan hukum ekonomi setjara umum dan pelajaran kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan :

- a. dalam penanaman modal dan penentuan nilai dari pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth);
- b. dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif serta terus-menerus memperjuangkan keseimbangan antara harga-harga bahan mentah dan harga-harga bahan terolah;
- c. dalam penentuan oleh Pemerintah mengenai sifat management, pengawasan dan perangsang (incentives);
- d. dalam penentuan aktivitas ekonomi jang setjara mutlak harus dipegang oleh Pemerintah;
- e. dalam menentukan bahagian dari aktivitas ekonomi jang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak swasta, jang dilaksanakan sebagai bagi-hasil atau "production sharing" antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi atau Swasta di pihak Indonesia dengan Pemerintah atau Swasta di pihak asing, perlu ditegaskan bahwa production sharing pada hakekatnja merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan sesuatu projek, jang akan dibayar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh projek tsb.; milik dan pimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia.

24. Mengingat luasnja Indonesia setjara geografis, dan untuk memenuhi tudjuan kita untuk menggali potensi rakjat disemua daerah Indonesia, lagi pula mengingat bahwa perhubungan pada waktu ini, baik didalam satu pulau maupun perhubungan antar pulau, masih sangat sederhana, serta mengingat pengalaman-pengalaman negara-negara lain jang menempuh djalan kearah sosialisme, maka dirasakan bahwa konsentrasi pimpinan (management) dalam suatu pusat di Djakarta tidak akan memberikan hasil jang ditjita-tjitakan. Ini berarti bahwa kita harus mengadakan *dekonsentrasi dalam soal management* dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Misalnja : sesuatu tjabang dari sesuatu bank Negara harus dapat memberi keputusan mengenai sesuatu hal, jang hanya mengenai daerah atau wilayah tjabang itu sendiri tanpa minta persetujuan dulu dari pusat bank itu di Djakarta.

Ini tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam perencanaan (planning) dan pengawasan (control) terachir, jang ada ditangan pihak pusat. Hal-hal ini dengan sendirinja tidak mengurangi usaha-usaha jang dilakukan oleh Daerah-daerah Otonom.

Dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal, sebagaimana halnja dengan beberapa urusan Pemerintah Pusat jang telah diserahkan kepada daerah-daerah otonomi.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, maka selandjutnja perlu diberikan kekuasaan selajaknja kepada management untuk berfikir dan bertindak setjara efisien dan efektif.

25. Untuk mendapat dukungan masyarakat atau "social support", maka perlu golongan karyawan dalam arti rakjat pekerdja diikutsertakan dalam kebidjaksanaan dan pengawasan. Ini akan menghilangkan kontradiksi antara pimpinan diatas dengan para pekerdja. Dan selandjutnja tiap perusahaan harus dapat dirasakan oleh masyarakat sekelilingnja sebagai suatu usaha kegotong-rojongan dalam memperbaiki taraf kehidupannja. Achirnja, pertumbuhan perekonomian daerah setjara mutlak merupakan bagian dari suatu perekonomian nasional jang tak dapat terpisah-pisah, sehingga pengawasan terachir setjara keseluruhan tetap ditangan Pemerintah Pusat.

26. Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa *kepentingan mereka* diperhatikan.

Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari rakjat, baik dalam arti menambah keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunja. Selain perangsang atau "incentive" setjara umum ini perlu djuga diperhatikan sepenuhnya perangsang setjara khusus dalam bentuk pelajaran jang sebaik-baiknja bagi produsen dan pengusaha.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau melaksanakan pengawasan bagi pertumbuhan kearah itu.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa segala tindakan tadi tidak menghambat atau mematjetkan kelantjaran dalam produksi dan lalu-lintas barang; peraturan-peraturan jang dibuat dalam hal ini harus luwes (flexibel), tidak boleh kaku. Selandjutnja perlu diperhatikan bahwa perangsang tidak hanya perlu difikirkan bagi perseorangan atau golongan, akan tetapi djuga sebagai gandjaran setjara khusus oleh Pemerintah untuk kegiatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, maka akan dirasakan oleh daerah bahwa kegiatan untuk menambah penghasilan Negara djuga mengakibatkan perkembangan jang baik dalam arti sosial-ekonomis bagi kehidupan masyarakat didaerah itu.

27. Berhubung dengan pertumbuhan ekonomi nasional kita, maka terasa keperluan untuk merobah sistim perpajakan. Pada umumnja sistim pajak sekarang ini masih melandjutkan sistim pajak jang lama, jaitu menjadikan pajak-pajak sebagai sumber penghasilan Negara jang utama. Karena itu perlu diadakan perobahan dalam sistim perpajakan :

- a. untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka;
- b. untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan
- c. untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja.

28. Dalam memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi harus disadari selanjutnya bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita harus mementingkan penjelenggaraan lalu-lintas barang antar pulau dan kita harus berdagang dengan dunia luar guna pembangunan dan penghidupan sehari-hari. Berhubung dengan itu maka kita harus memperhatikan perhubungan, baik dalam satu pulau maupun antar pulau. Karena itu maka soal perhubungan menempati fungsi ekonomis yang maha penting. Selama ini belum diatur setjara rapi, maka hasil usaha² kita tidak akan memuaskan.

29. Setelah menguraikan strategi dasar ekonomi Indonesia, saja sekarang akan memberi keterangan mengenai *kebidjaksanaan djangka pendek* yang hendak ditempuh oleh Pemerintah.

30. Dalam Amanat saja pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul „Tahun Kemenangan” telah saja tandaskan, bahwa pada dewasa ini harus diutamakan penyelesaian pasal 1 dari Tri-program Pemerintah, yaitu program sandang-pangan.

Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi-keuangan sekarang maka titik-berat politik-ekonomi djangka pendek harus diletakkan pada soal sandang-pangan itu.

Didalam kebidjaksanaan djangka pendek ini, soal memenuhi keperluan pangan harus mendapat prioritas utama, karena rakjat yang diharuskan ikut-serta didalam gerakan produksi sehebat-hebatnya itu, harus ada djaminan pangan, chususnja „beras”.

Buat djaminan itu Pemerintah perlu mempunyai dan menguasai persediaan beras yang tjukup, yang berarti bahwa Pemerintah harus mempunyai dan menguasai „iron stock” beras.

Berhubung dengan itu kebidjaksanaan djangka pendek harus berpangkal pada :

- a. penyelesaian soal sandang-pangan sampai pada tingkat yang lajak;
- b. menjempurnakan aparat produksi yang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini.

Penyelesaian kedua hal ini sudah dapat dilakukan dengan kekuatan masyarakat yang telah ada pada kita, djika terdjamin :

- a. adanya persediaan beras yang tjukup;
- b. adanya persediaan bahan baku/penolong dan spare-parts yang tjukup. Maka dari itu mengenai „iron stock” beras dan persediaan bahan baku/penolong serta spare-parts dalam 2 (dua) tahun harus diberi prioritas utama.

Semua kegiatan harus di-konsentrir pada kedua usaha tersebut, sehingga usaha-usaha itu mempengaruhi bidang² dan tindakan-tindakan lainnya.

Pembiajaan untuk kedua usaha itu ditjapai :

- a. dengan kekuatan kita sendiri;
- b. bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjarkan kredit-kredit luar negeri dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

Disamping mengadakan djaminan pangan itu, maka alat-alat produksi, yang sudah kita miliki, harus mendapat djaminan bahan-bahan baku dan penolong serta spare-parts, supaya dapat memperbesar daja-produksinya, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnya peredaran barang didalam masyarakat sebagai imbangan daripada beredarnya uang.

Paralel dengan penjediaan „iron stock” beras tersebut, maka dalam djangka waktu yang bersamaan (± 2 tahun), harus digerakkan penambahan produksi bahan makanan (beras, djagung dsb.), setjara besar-besaran dengan djalan :

- a. meng-estensifkan pertanian dengan menambah areal dan transmigrasi.
- b. meng-intensifkan pertanian dengan mekanisasi dan memperbaiki tjara-tjara bertjotjok-tanam.
- c. mempergunakan Civic-missions Angkatan Bersendjata.
- d. menjempurnakan penjelenggaraan Landreform, agar dapat diselesaikan pada waktunya sebagaimana ditetapkan oleh M.P.R.S.
- e. mendjamin supaya projek-projek yang berhubungan langsung dengan usaha mempertinggi produksi pangan (seperti projek Djatiluhur dan projek-projek pabrik pupuk) selesai pada waktu yang direntjanakan.
- f. mengurangi sedjauh mungkin impor bahan-bahan lux.

Front Nasional harus segera melaksanakan social support-nja dan social control-nja untuk men-sukseskan politik-ekonomi djangka pendek ini, dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk itu.

Selanjutnya transport dan komunikasi, sebagai urat-nadi perekonomian umumnya, chususnja per-edaran barang, harus diperbaiki dan dipelihara dengan baik, guna melantjarkan distribusi.

Ekspor dan impor dalam masa kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas, harus diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 pasal 6 ayat 3. Dalam melaksanakan ketentuan ini Presiden/Mandataris M.P.R.S., dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mendjamin berhasilnya garis politik ekonomi ini untuk menguasai dan menjelenggarakan semua impor dengan mempergunakan pengalaman dan keahlian pengusaha-pengusaha swasta.

Buat sementara untuk mendjamin kelantjaran ekspor dalam djangka pendek ini, perlu para eksportir diberi djaminan incentive yang menarik. Dengan mengingat pengalaman pada tahun-tahun terachir ini, maka dirasa perlu mengadakan de-konsentrasi dalam pengurusan administrasi impor dan ekspor dari instansi-instansi pada tingkat pusat kepada instansi-instansi pada tingkat daerah, segala sesuatu sesuai dengan politik dan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Produksi sandang menurut kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek tsb. diatas harus dititik-beratkan kepada produksi didalam negeri lebih dulu dalam waktu ± 2 tahun, dengan mendjamin bahan-bahan baku pertenunan dan merasionalisir bahan-bahan baku tsb. serta mendjamin arus bahan-bahan

baku dan spare-parts, untuk menghemat devisa maka impor tekstil-djadi harus dibatasi.

Dalam rehabilitasi alat-alat produksi pada umumnya, maka rehabilitasi dan pengurusan penggilingan beras harus mendapat perhatian yang khusus.

Dalam rangka menaikkan produksi, maka penjemputan management perusahaan-perusahaan Negara diarahkan kepada keadaan, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Negara itu bergerak dengan bebas (otonomi) dalam garis-garis kebijaksanaan Menteri-menteri yang bersangkutan, dengan disertai sistem kontrol yang efektif.

Kepada perusahaan-perusahaan (dagang) Negara diberikan incentives berupa jasa produksi, bonus dsb. untuk efisiensi, segala sesuatu menurut ukuran yang objektif, misalnya untuk ketepatan „omzet“ dan ketajiln jumlah kredit Bank yang digunakan, dengan menjempurnakan tjara-tjaranja yang berlaku hingga sekarang dengan mengadakan retooling.

Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selanjutnya perlu diadakan sistem kompetisi prestasi antara perusahaan-perusahaan (dagang) Negara, antara bagian-bagian dalam perusahaan dan antara para pekerdja, dalam suatu rentjana produksi.

31. Berhubung dengan uraian saja tadi maka penjurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diadakan pada kebijaksanaan ekonomi djangka pendek ini, disamping mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, yang harus ditjapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama, dan dengan tidak menambah beban rakjat banjak. Dengan demikian maka dasar pokok pemikiran dalam penjurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah, bahwa Anggaran Negara harus merupakan alat untuk menukseskan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi tersebut tadi.

Itulah sebabnya bahwa penjurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sekarang ini harus disesuaikan dengan politik ekonomi djangka pendek seperti sudah saja uraikan.

Berhubung dengan itu maka penjampaian Rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1963 kepada D.P.R.-G.R. ditunda untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah guna mengadakan peninjauan kembali, dengan tjatatan bahwa penjurunan Anggaran Negara itu ditudjukan untuk mendjamin terlaksananya kebijaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaannya Poja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Dalam pada itu untuk menjaga ketertiban didalam pengeluaran uang Negara, maka Pemerintah dengan bantuan Panitia Anggaran D.P.R.-G.R. menjusun pedoman-pedoman tertentu yang mengikat untuk penertiban tersebut. Sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 13 Maret j.b.l. maka Pemerintah telah menegaskan bahwa untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang *tidak akan diambil*

tindakan-tindakan moneter yang drastis, seperti umpamanya devaluasi, pengguntingan uang, pengeluaran uang nilai baru dsb., karena mengadakan tindakan-tindakan seperti itu pada waktu ini, didalam keadaan seperti sekarang, akan menimbulkan kegontjangan dan kegelisahan tidak saja dibidang ekonomi, tetapi djuga dikalangan rakjat luas.

Untuk menghadapi kenjataan bahwa nilai uang rupiah sudah merosot dan bahwa ada berbagai ketentuan mengenai nilai uang rupiah terhadap mata-uang asing dan kegandjilan dalam pembentukan harga, maka perlu diadakan tinjauan kembali terhadap segala Peraturan Negara dan Daerah dibidang ekonomi-keuangan untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan djangka pendek tsb. diatas guna keseragaman dalam pembentukan harga, kelantjaran produksi maupun distribusi.

32. Pembiasaan untuk menukseskan politik ekonomi djangka pendek tsb. diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut :

- a. dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestic) kita sendiri.
- b. bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjarikan kredit luar negeri, dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

33. Didalam ichtiar untuk menjehatkan ekonomi-keuangan sekarang ini, usaha-usaha pembangunan akan terus dilanjutkan berdasarkan Memorandum Pimpinan M.P.R.S. tanggal 5 Djanuari 1963 dengan menetapkan prioritas yang lebih tjermat.

Dalam pembangunan itu perlu segera dilaksanakan inzeptensi Angkatan Bersendjata guna membantu pembangunan „infra structure“ terutama didaerah-daerah terpencil, seperti perbaikan/pembukaan djalan-djalan, djembatan dan pembukaan tanah tanpa mengurangi kesempatan bekerdja bagi buruh dan menghindarkan dua kali untuk sesuatu projek.

34. Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi, maka perlu diadakan peng-integrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun eksekutif, dipusat maupun didaerah-daerah, begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah² Daerah dengan badan-badan legislatif.

Peng-integrasian tsb. harus pula ditjapai dengan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dalam rangka penyelesaian Tri-program Kabinet Kerdja.

Peng-integrasian seperti yang dimaksudkan selanjutnya dapat ditjapai dengan meng-intensifkan retooling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah², menurut persjajaran yang lebih sempurna yang ditentukan lebih dulu, dibawah pimpinan saja sendiri.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan djangka pendek ini, harus segera dimulai dengan segala keberanian untuk merombak struktur dan kebiasaan yang hingga kini merupakan

hambatan-hambatan, sambil meratakan dan meng-amalkan indoktrinasi dibidang pembangunan mental nasional. Berhubung dengan uraian saja tadi, maka Pemerintah selanjutnja akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

P e r t a m a :

Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas-tugas Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control.

Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah.

Badan Musjawarah Nasional Swasta jang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaja badan ini a.l. dapat menggerakkan modal dalam masyarakat dan „domestic capital“ kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terahir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungan keluar negeri).

K e d u a :

Perlu meninjau kembali dan dimana perlu mengubah berbagai peraturan, proses serta prosedur administratif jang kompleks untuk dapat mentjapai efisiensi, menghindarkan pemborosan dan doubleures.

K e t i g a :

Perlu terus-menerus berchtiar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada Lembaga-lembaga Keuangan, seperti aparatur fiskal, perbankan, chususnja Bank-bank Pembangunan Daerah dan Swasta.

K e e m p a t :

Usaha penjempurnaan labour forces harus terus-menerus dilakukan dengan menjempurnakan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training.

K e l i m a :

Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang-bidang operasi-onil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada.

Karena prosedur, proses dan administrasi jang bertalian dengan ekspor dan impor ternjata sangat kompleks, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur-prosedur jang bersangkutan.

Komando Operasi Ekonomi harus memberikan djasa-djasa baiknja kepada Badan Pemeriksa Keuangan didalam melakukan tugas di Pusat maupun di Daerah-daerah, agar supaja pedjabat-pedjabat Badan Pemeriksa Keuangan dapat mela-

kukan tugasnja dengan leluasa, tanpa halangan dari setiap aparatur Negara sipil maupun militer jang keuangannja akan diperiksa.

Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan diperbaiki, sedang keperlumannja akan tenaga-tenaga ahli dan alat-alat akan dipenuhi.

Selanjutnja Komando Operasi Ekonomi akan diberi tugas untuk mengadakan research pada Perusahaan-perusahaan Negara dan Lembaga-lembaga Negara lainnja untuk kepentingan menambah efisiensi.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek jang segera akan ditempuh oleh Pemerintah.

Djakarta, 28 Maret 1963.

Presiden Republik Indonesia,
ttd.

SUKARNO.

I S I

	hlm.
Pengantar Penerbit	3
DEKON DAN SJARAT² PELAKSANAANNJA	5
I. <i>Prinsip² pokok Deklarasi Ekonomi</i>	6
a. Strategi dasar ekonomi dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan	9
b. Arti tugas membersihkan ekonomi Indone- sia dari sisa ² imperialisme dan feodalisme	15
c. Mengikis habis sisa ² feodalisme	22
d. Peranan sektor koperasi dan sektor swasta	25
II. <i>Hal² jang perlu diperhatikan dalam melaksana- kan kebidjaksanaan djangka pendek</i>	30
a. Tentang „Iron Stock” beras	32
b. Usaha ² untuk memulihkan kembali aparat produksi	37
c. Dekonsentrasi dalam soal management ...	39
d. Perubahan ² dalam sistim perpadjakan	41
e. Production-sharing dan kredit luarnegeri	46
Kesimpulan-kesimpulan	52
DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!	54
KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!	71
I. Penhatian kepada kepentingan ² kaum buruh dan Rakjat pekerdja pada umumnja	74
II. Pengikutsertaan kaum buruh dalam pengurusan ekonomi	80
III. Selamatkan Dekon dan laksanakan setjara kon- sekwen!	88
LAMPIRAN :	
Selamatkan Dekon!	93
Deklarasi Ekonomi	101

P.I.R. 239/63 — 10.000